

PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Jalan Pangeran Muda Nomor 230 Telp. (0565) 21004 -21007
SINTANG 78611



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

TAHUN 2019



RINGKASAN EKSEKUTIF (*Eksekutif Summary*)

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Sintang Tahun 2019 melaporkan capaian kinerja (*performance results*) sesuai dengan rencana kinerja (*performance plan*) yang merupakan jabaran tahunan dari Rencana Strategis Pembangunan Daerah.

Sesuai dengan RPJMD Tahun 2016-2021, yang mana telah dilakukan perbaikan dengan penyederhanaan sasaran dan Indikator Kinerja Utama, sehingga terlaksana 17 sasaran strategis dengan rincian hasil sebagai berikut :

A. Kategori SANGAT BERHASIL

- 1) Meningkatnya angka melek huruf dan tuntasnya wajib belajar pendidikan 9 tahun (92,50);
- 2) Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan terutama untuk kesehatan ibu dan anak serta penduduk miskin (89,50);
- 3) Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk (92,50);
- 4) Tersedianya sumber daya air untuk memenuhi kebutuhan pertanian (irigasi) (92,50);
- 5) Meningkatnya kualitas lingkungan hidup (92,50);
- 6) Meningkatnya kerukunan antar umat beragama (92,50);
- 7) Meningkatnya perekonomian daerah (92,50);
- 8) Meningkatnya investasi yang berbasis potensi unggulan lokal dan lapangan pekerjaan (89,50);
- 9) Meningkatnya daya saing potensi unggulan daerah dan terwujudnya sentra pertumbuhan ekonomi berbasis keunggulan lokal (85,00);
- 10) Meningkatnya peran koperasi, UMKM, dan lembaga keuangan non perbankan dalam pengembangan perekonomian rakyat (92,50);
- 11) Profesionalisme Pengelolaan Keuangan Daerah (92,50).

B. Kategori BERHASIL

- 1) Meningkatnya nilai budaya lokal (82,50);
- 2) Meningkatnya produksi dan produktivitas komoditi pertanian dan perkebunan di desa serta meningkatnya ketahanan pangan (80,92).



- 3) Meningkatnya transparansi, akuntabilitas dan partisipasi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah (77,50)

C. Kategori CUKUP BERHASIL

- 1) Tersedianya infrastruktur transportasi yang handal untuk mendukung pergerakan orang dan barang (60,00);
- 2) Meningkatnya akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana dasar pemukiman (mencakup persampahan, air bersih, air limbah) (44,17);
- 3) Meningkatnya Kesadaran Hukum Masyarakat, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Umum (62,50).

Dari 17 sasaran tersebut dapat disimpulkan: **11 sasaran (64,70%)** dengan predikat **sangat berhasil** dengan **38 Indikator Kinerja Utama**, **tiga sasaran (17,65%)** dengan predikat **berhasil** dengan **20 Indikator Kinerja Utama**, dan **tiga sasaran (17,65%)** dengan predikat **cukup berhasil** dengan **6 Indikator Kinerja Utama**.

LKjIP Kabupaten Sintang ini menggambarkan keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran yang ditetapkan untuk tahun 2019. Pemerintah Kabupaten Sintang tahun 2019 ini berupaya kuat dalam mencapai keberhasilan sebagaimana yang tertuang pada RPJMD Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021, dimana pada Tahun 2019 ini merupakan tahun keempat dalam pencapaian target sasaran strategis sebagaimana yang ditetapkan dalam RPJMD.

RPJMD Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021 secara umum dapat dilaksanakan secara baik dengan memberdayakan segala aspek yang ada dalam upaya mewujudkan visi Kabupaten Sintang yaitu:

TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN SINTANG YANG CERDAS, SEHAT, MAJU, RELIGIUS, DAN SEJAHTERA DIDUKUNG PENERAPAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN BERSIH PADA TAHUN 2021.

Oleh karena itu, Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Sintang Tahun 2019 yang disusun ini, diharapkan dapat memberikan dayaguna, baik untuk peningkatan kinerja organisasi dan aparatur maupun bagi peningkatan akuntabilitas instansi dalam upaya mewujudkan “**Good Governance**” serta dapat dijadikan bahan masukan untuk penetapan perencanaan pembangunan selanjutnya.



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Sintang Tahun 2019 dapat diselesaikan sebagai upaya melaksanakan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

LKjIP Kabupaten Sintang Tahun 2019 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijakan operasional yang telah digariskan dalam rangka pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Sintang sesuai RPJMD Tahun 2016-2021 dan Perjanjian Kinerja Kabupaten Sintang Tahun 2019 serta sebagai alat umpan balik (*feedback*) untuk melakukan perbaikan dalam perencanaan tahun selanjutnya.

Laporan ini telah menggambarkan kinerja yang ideal, namun kami terus berupaya menyempurnakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang telah dibangun di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang dan berharap laporan kinerja ini berguna sebagai tambahan masukan bagi pengelolaan dan penataan serta peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dalam pembangunan dan pelayanan prima kepada masyarakat, menuju pencapaian visi Kabupaten Sintang: ***“TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN SINTANG YANG CERDAS, SEHAT, MAJU, RELIGIUS, DAN SEJAHTERA DIDUKUNG PENERAPAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN BERSIH PADA TAHUN 2021”***

BUPATI Sintang, Maret 2020
Bupati Sintang,

H.T. JAROT WINARNO, M.Med.PH



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Gambaran Umum Kabupaten Sintang	1
B. Permasalahan Utama (<i>Strategic Issue</i>)	18
BAB II : PERENCANAAN KINERJA	19
A. RPJMD Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021	19
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2019	26
BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Capaian Kinerja	29
B. Realisasi Anggaran	131
BAB IV : PENUTUP	139



BAB I

PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Sintang

1. Pendahuluan

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Sintang tahun 2019 berdasarkan pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKjIP ini merupakan dokumen yang berisi gambaran perwujudan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang disusun dan disampaikan secara sistematis. LKjIP Kabupaten Sintang tahun 2019 merupakan Laporan yang telah mengacu pada Rencana Strategis (RENSTRA) yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sintang periode 2016-2021.

Laporan kinerja ini dimaksudkan untuk mengkomunikasikan capaian kinerja pemerintah Kabupaten Sintang dalam tahun anggaran 2019 yang dikaitkan dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2019 serta perbaikan dan penguatan SAKIP Kabupaten Sintang melalui perubahan sasaran dan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana yang telah ditetapkan melalui Keputusan Bupati Sintang Nomor 69 Tahun 2018 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Sintang 2016-2021.

Adapun tujuan penyusunan LKjIP ini diantaranya adalah untuk dapat memberikan dayaguna, baik untuk peningkatan kinerja organisasi dan



aparatur maupun peningkatan akuntabilitas Instansi Pemerintah Kabupaten Sintang dalam upaya mewujudkan “**Good Governance**”.

Sedangkan manfaat yang diharapkan dari LKJIP ini adalah untuk mendapatkan masukan atau kritikan serta umpan balik dari berbagai pihak, sehingga masukan tersebut menjadi motivasi kinerja bagi Pemerintah Kabupaten Sintang untuk berbuat lebih optimal dalam mewujudkan pembangunan disegala bidang.

1.1. Aspek Geografi dan Demografi

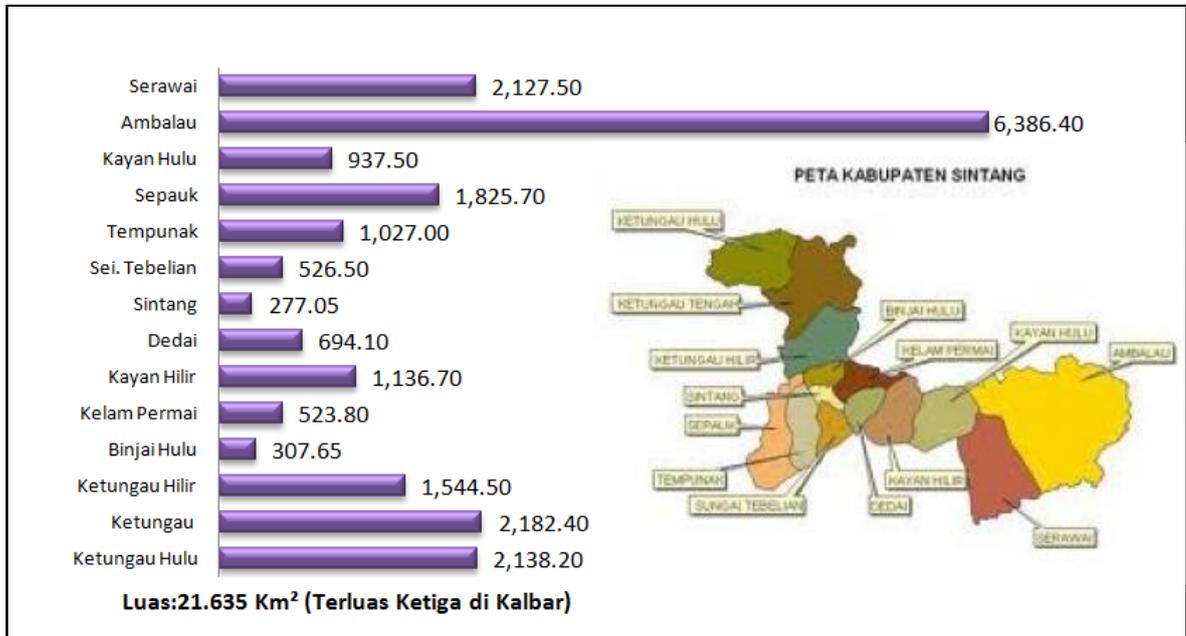
1.1.1. Luas Wilayah dan Batas Administrasi

Kabupaten Sintang merupakan Kabupaten yang memiliki luas wilayah ketiga terbesar di Provinsi Kalimantan Barat setelah kabupaten Ketapang dan Kabupaten Kapuas Hulu. Luas wilayah Kabupaten Sintang yaitu 21.635 km². Jarak antara Kabupaten Sintang dengan Ibukota Provinsi yaitu 395 km². Secara administratif, wilayah Kabupaten Sintang terbagi menjadi 14 Kecamatan, 16 Kelurahan dan 391 Desa. Kecamatan-Kecamatannya adalah: Ambalau, Binjai Hulu, Dedai, Kayan Hilir, Kayan Hulu, Kelam Permai, Ketungau Hilir, Ketungau Hulu, Ketungau Tengah, Sungai Tebelian, Sepauk, Serawai, Tempunak dan Kecamatan Sintang. Kecamatan Ketungau Hulu dan Ketungau Tengah berbatasan langsung dengan Negara Malaysia.

Kecamatan yang terluas adalah Kecamatan Ambalau dengan luas 6.386,40 Km² (29,52%) dari luas Kabupaten Sintang. Sedangkan luas masing-masing Kecamatan lainnya hanya berkisar 1–29 persen dari luas Kabupaten Sintang. Adapun Kecamatan terkecil wilayahnya adalah Sintang, seluas 277,05Km² (1,28%). Gambaran luas wilayah di Kabupaten Sintang dapat dilihat pada Gambar 2.1. di bawah ini. Beberapa hal yang patut diperhatikan dalam hal pemetaan luas wilayah Kecamatan, pertama ketimpangan luas wilayah, meskipun sebagian besar wilayah Kecamatan



memiliki luas yang relatif seimbang, namun terdapat satu kecamatan, yaitu Kecamatan Ambalau yang memiliki area yang terlalu luas.



Gambar 1.1. Luas wilayah Kabupaten Sintang Per Kecamatan

Keadaan ini relatif menyulitkan masyarakatnya untuk mendapatkan akses pembangunan yang lebih mudah dan murah. Kedua, masalah perbatasan antar negara, di mana terdapat dua Kecamatan yaitu Kecamatan Ketungau Tengah dan Ketungau Hulu, yang berbatasan langsung dengan Sarawak Malaysia. Terdapat dua tantangan yang kadang-kadang dilematis untuk disikapi. Tantangan pertama dalam bentuk peluang pengembangan ekonomi masyarakat. Tantangan kedua dalam bentuk dampak letak akses perbatasan yang cenderung menyajikan kegiatan ekonomi yang bersifat illegal, serta mempengaruhi kearifan budaya masyarakat tradisional.

1.1.2. Letak dan kondisi geografis

Kabupaten Sintang merupakan salah satu daerah bagian timur di Provinsi Kalimantan Barat yang dilalui oleh garis Khatulistiwa dengan Ibukotanya Sintang terletak di antara 1° 05' Lintang Utara dan 0° 46'



Lintang Selatan serta $110^{\circ} 50'$ Bujur Timur dan $113^{\circ} 20'$ Bujur Timur. Secara geografis batas administrasi Kabupaten Sintang berbatasan dengan wilayah Kabupaten, Propinsi dan Negara Lain, yaitu :

- Utara berbatasan dengan Serawak, Malaysia Timur dan Kabupaten Kapuas Hulu.
- Selatan berbatasan dengan Kalimantan Tengah dan Kabupaten Melawi serta Kabupaten Ketapang.
- Timur berbatasan dengan Kalimantan Tengah dan Kabupaten Kapuas Hulu.
- Barat berbatasan dengan Kabupaten Ketapang, Sanggau dan Sekadau.

Kabupaten Sintang merupakan salah satu Kabupaten yang berbatasan langsung dengan negara tetangga yaitu Malaysia, khususnya negara bagian Serawak. Wilayah Kabupaten Sintang yang berbatasan langsung dengan negara Malaysia adalah Kecamatan Ketungau Tengah dan Kecamatan Ketungau Hulu.

1.1.3. Topografi

Wilayah Kabupaten Sintang merupakan daerah perbukitan dengan luas sekitar $13.573,75 \text{ km}^2$ atau sekitar 62,74 persen dari luas Kabupaten Sintang (21.635 km^2). Sebagai daerah yang berhutan tropis dan memiliki kelembaban udara yang cukup tinggi, Sintang memiliki curah hujan yang cukup tinggi. Intensitas curah hujan di daerah ini sebesar 249,08 milimeter perbulan dengan rata-rata hari hujan sebanyak 17 hari perbulan, tantangan berat dari kondisi topografi ini adalah bagaimana meningkatkan upaya-upaya pemanfaatan lahan hendaknya disinkronisasikan antara komoditas yang akan ditanam dengan kondisi lahan agar ekosistemnya terjaga dan produktivitasnya optimal. Kabupaten Sintang dilalui oleh dua sungai besar, yaitu Sungai Kapuas dan Sungai Melawi. Selain sungai juga terdapat empat gunung yang cukup tinggi, yaitu: Gunung Batu Raya (tinggi 2.278 m) di



Kecamatan Serawai, Gunung Batu Maherabut (tinggi 1.270 m), Gunung Batu Baluran (tinggi 1.556 m), dan Gunung Batu Sambung (tinggi 1.770) di Kecamatan Ambalau.

Kabupaten Sintang memiliki potensi alam yang dapat dijadikan objek wisata, namun hingga saat ini potensi tersebut belum dimanfaatkan secara maksimal. Potensi alam tersebut berupa air terjun sebanyak 19 air terjun yang tersebar di 7 Kecamatan, yaitu Sepauk, Kayan Hulu, Kayan Hilir, Serawai, Ambalau, Ketungau Tengah dan Ketungau Hulu. Kabupaten Sintang juga memiliki 4 gunung yang terdapat di Kecamatan Serawai dan Kecamatan Ambalau. Kondisi tofografi wilayah Kabupaten Sintang dapat dilihat pada Tabel 2.1.

Tabel 1.1.
Luas Wilayah Kabupaten Sintang Menurut Ketinggiannya

No.	Kecamatan	Luas (Ha)	Wilayah Datar (Ha)	Wilayah Bukit dan Gunung / (Ha)
1.	S e r a w a i	212.750	-	212.750
2.	A m b a l a u	638.640	-	638.640
3.	Kayan Hulu	93.750	29.573	64.177
4.	S e p a u k	182.570	71.936	110.634
5.	Tempunak	102.700	58.632	44.068
6.	Sungai Tebelian	52.650	49.850	2.800
7.	S i n t a n g	27.705	27.705	-
8.	D e d a i	69.410	57.792	11.618
9.	Kayan Hilir	113.670	88.838	24.832
10.	Kelam Permai	52.380	49.780	2.600
11.	Binjai Hulu	30.765	30.021	744
12.	Ketungau Hilir	154.450	127.954	26.496
13.	Ketungau Tengah	218.240	121.116	97.124
14.	Ketungau Hulu	213.820	92.928	120.892
	Kabupaten Sintang	2.163.500	806.125	1.357.375

Sumber : *Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sintang*



1.1.4. Geologi

Berdasarkan peta geologi, Kabupaten Sintang meliputi formasi Alat Sandstone, Alluvial Deposits, Betung Volcanics, Dangan Sandstone, Disected Alluvial Deposits, Haloq Sandstone, Ingar Formation, Kantu Formation, Ketungau Formation, Mensibau Granodiorite, Payak Formation, Pinoh Metamorphics, Reef Limestone, Sekayam Sandstone, Selangkai Group, Semitau Complex, Sepauk Tonalite, Silat Shale, Sintang Intrusives, Sukadana Granite, Talus Deposit, Tebidah Formation, Tutoop Sandstone, dan Undiff Melawi Group. Berbagai lapisan batuan yang tersebut terdapat diseluruh lapisan di wilayah Kabupaten Sintang.

Jenis batuan yang mendominasi di Kabupaten Sintang adalah Tebidah Formation seluas 410.448,58 Ha atau mencapai 18,61% dari luas wilayah Kabupaten Sintang terdapat di kecamatan-kecamatan Ambalau, Dedai, Kayan Hilir, Kayan Hulu, Sepauk, Serawai, Sintang, Sui Tebelian, dan Tempunak. Selanjutnya batuan dominan berikutnya adalah Mensibau Granodiorite yang mencapai 10,70% dari luas wilayah Kabupaten Sintang terdapat di beberapa kecamatan yaitu Kecamatan Sepauk, Kecamatan Ambalau dan Kecamatan Serawai.

Dilihat dari tekstur tanahnya, sebagian besar daerah Kabupaten Sintang terdiri dari tanah latasol meliputi areal seluas 1,02 juta hektar atau sekitar 46,99 % dari luas daerah yaitu 2,16 juta, selanjutnya tanah podsolit sekitar 0,93 juta hektar atau 42,89 % yang terhampar hampir di seluruh kecamatan sedangkan jenis tanah yang paling sedikit ditemui di Kabupaten Sintang yaitu jenis tanah organosol hanya sekitar 0,05 juta hektar atau sebesar 2,08 %.



1.1.5. Hidrologi

Kabupaten Sintang dilalui oleh 2 sungai besar yaitu Sungai Kapuas dan Sungai Melawi, serta dua sungai kecil yaitu Sungai Ketungau yang merupakan anak dari Sungai Kapuas dan Sungai Kayan yang merupakan anak dari Sungai Melawi. Sungai Kapuas melalui Kecamatan Ketungau Hilir, Kelam Permai, Binjai Hulu, Sintang, Tempunak sampai ke Sepauk. Sedangkan Sungai Melawi melalui Kecamatan Ambalau, Serawai, Dedai sampai ke Sintang. Sungai Kayan melalui Kecamatan Kayan Hulu sampai ke Kayan Hilir, sedangkan Sungai Ketungau melalui Kecamatan Ketungau Hulu, Ketungau Tengah sampai ke Ketungau Hilir.

Sistem hidrologi wilayah Kabupaten Sintang memiliki 8 buah DAS yang meliputi DAS Ambalau, DAS Hulu Melawi, DAS Jungkit, DAS Kayan, DAS Ketungau, DAS Lebang dan Kebiyau, DAS Melawi dan DAS Tempunak. DAS terluas adalah DAS Melawi, sedangkan DAS Jungkit merupakan DAS dengan wilayah tersempit di Kabupaten Sintang.

Luasan dan wilayah cakupan dari delapan DAS tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel I.2.
Cakupan Wilayah dan Luasan DAS Kabupaten Sintang

No	DAS	Kecamatan	Luas (Ha)	Luas DAS (Ha)
1	DAS Ambalau	Serawai	2.798,69	241.323,49
		Ambalau	238.524,80	
2	DAS Hulu Melawi	Serawai	1.992,94	372.901,81
		Ambalau	364.471,12	
		Kayan Hulu	6.437,75	
3	DAS Jungkit	Ketungau Tengah	18.416,01	105.287,06
		Sintang	75,57	
		Sepauk	13.776,68	
		Tempunak	241,02	
		Ketungau Hilir	65.058,76	
		Binjai Hulu	7.719,03	



No	DAS	Kecamatan	Luas (Ha)	Luas DAS (Ha)
4	DAS Kayan	Dedai	3.433,54	277.512,22
		Serawai	995,20	
		Ambalau	1.385,36	
		Kayan Hulu	166.504,84	
		Kayan Hilir	102.545,74	
		Kelam Permai	2.647,54	
5	DAS Ketungau	Ketungau Hulu	196.185,57	455.744,95
		Ketungau Tengah	182.717,42	
		Ketungau Hilir	76.841,96	
6	DAS Lebang dan Kebiyau	Sintang	7.735,69	110.870,66
		Dedai	686,71	
		Kelam Permai	59.369,24	
		Binjai Hulu	22.658,62	
		Ketungau Hilir	20.420,40	
7	DAS Melawi	Dedai	56.587,24	485.556,68
		Kayan Hilir	3.217,63	
		Kelam Permai	4.988,02	
		Sintang	14.616,07	
		Sui Tebelian	15.913,23	
		Sepauk	126.753,14	
		Tempunak	1.602,41	
		Serawai	249.060,02	
		Ambalau	11.092,33	
		Kayan Hulu	1.726,59	
		8	DAS Tempunak	
Tempunak	78.581,70			
Sintang	10.846,72			
Sepauk	15.818,77			
Binjai Hulu	10.970,93			

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sintang

Kondisi hidrologi secara khusus di Kabupaten Sintang adalah dilaluinya wilayah ini oleh 2 sungai besar yaitu Sungai Kapuas dan Sungai Melawi. Sungai Kapuas melalui Kecamatan Ketungau Hilir, Kelam Permai, Binjai Hulu, Sintang, Tempunak sampai ke Sepauk. Sedangkan Sungai Melawi melalui Kecamatan Ambalau, Serawai, Dedai sampai ke Sintang. Sungai Kayan melalui Kecamatan Kayan Hulu sampai ke Kayan Hilir,



sedangkan Sungai Ketungau melalui Kecamatan Ketungau Hulu, Ketungau Tengah sampai ke Ketungau Hilir.

Beberapa sungai yang mengalir di seluruh wilayah Kabupaten Sintang memberikan jaminan ketersediaan air yang menunjang kehidupan masyarakat Kabupaten Sintang. Selain ketersediaan air permukaan yang cukup, kualitas air sungainya juga menunjukkan tidak adanya zat berbahaya, meskipun bukan merupakan kualitas yang layak dikonsumsi. Secara umum sebaran potensi hidrologis (sungai, danau, dan embung) utama di Kabupaten Sintang dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel I.3.
Profil Sungai di Kabupaten Sintang

No	Nama Sungai	Anak Sungai	Lokasi Kecamatan
1	Sungai Kapuas	Sungai Ketungau	1. Ketungau Hilir, 2. Kelam Permai, 3. Binjai Hulu, 4. Sintang, 5. Tempunak 6. Sepauk.
2	Sungai Melawi	Sungai Kayan	1. Ambalau, 2. Serawai, 3. Dedai 4. Sintang
3	Sungai Kayan		1. Kayan Hulu 2. Kayan Hilir
4	Sungai Ketungau		1. Ketungau Hulu, 2. Ketungau Tengah 3. Ketungau Hilir

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sintang

1.1.6. Klimatologi

Kabupaten Sintang dikenal sebagai daerah penghujan dengan intensitas yang tinggi. Hal tersebut dikarenakan Kabupaten Sintang sebagian besar wilayahnya merupakan daerah perbukitan yaitu sebesar 53,50 persen. Sepanjang tahun, rata-rata curah hujan di Kabupaten Sintang sebesar 249,08 milimeter per bulan dengan rata-rata hari hujan



sebanyak 17 hari per bulan. Menurut Stasiun Meteorologi Susilo Sintang, intensitas curah hujan yang cukup tinggi ini, terutama dipengaruhi oleh keadaan daerah yang berhutan tropis dan disertai dengan kelembaban udara yang cukup tinggi.

Rata-rata bulanan curah hujan tertinggi tahun terjadi pada bulan November, yaitu mencapai 388,8 milimeter dengan hari hujan sebanyak 26 hari, sedangkan rata-rata curah hujan terendah terjadi pada bulan Agustus yaitu mencapai 55,8 milimeter dengan hari hujan sebanyak 7 hari. Intensitas hujan yang tinggi biasanya mempengaruhi kecepatan angin. Faktor angin ini sangat mempengaruhi kegiatan penerbangan serta kegiatan-kegiatan lainnya.

Temperatur udara di Kabupaten Sintang setiap bulannya rata-rata berkisar antara 26,4°C sampai dengan 27,7°C di mana temperatur udara terendah sebesar 23°C dan temperatur udara tertinggi sebesar 33,4°C. Penyinaran matahari yang dicatat dari Stasiun Meteorologi Susilo Sintang berkisar antara 45,16 persen sampai dengan 84,77 persen dengan rata-rata penyinaran matahari sebesar 61,02 persen.

1.1.7. Penggunaan Lahan

Hingga tahun 2018, luas lahan yang ada di Kabupaten Sintang sebesar 2.163.500 Ha dimana luas lahan pertanian sebanyak 1.435.367 Ha dan lahan Non Pertanian sebanyak 728.133 Ha. Kondisi penggunaan lahan di Kabupaten Sintang dapat dilihat pada tabel berikut ini :



Tabel I.4.
Kondisi Penggunaan Lahan di Kabupaten Sintang

NO.	JENIS LAHAN	LUAS LAHAN (Ha)
A.	LAHAN PERTANIAN	1.435.367
1.	Lahan Sawah (Irigasi, Tadah Hujan, Rawa Pasang Surut, Rawa Lebak)	20.138
2.	Tegal/ Kebun	42.608
3.	Ladang/Huma	21.794
4.	Perkebunan	676.260
5.	Ditanami Pohon/Hutan rakyat	211.003
6.	Padang Pengembalaan/Rumput	2.232
7.	Sementara tidak diusahakan	41.291
8.	Lainnya (Tambak, kolam, empang, hutan negara, dll)	420.041
B.	LAHAN BUKAN PERTANIAN	728.133
	Total Luas Wilayah	2.163.500

Sumber: Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sintang

2. Susunan Organisasi Perangkat Daerah

Struktur Organisasi Pemerintah Kabupaten Sintang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sintang yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Tugas dan Fungsi Staf Ahli, Sekretariat DPRD, 4 Badan dan 3 Lembaga Teknis, 20 Dinas termasuk Satuan Polisi Pamong Praja, 1 Kantor dan 1 RSUD, 14 Pemerintahan Kecamatan, 16 Pemerintahan Kelurahan, dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Sekretariat Daerah
- 2) Tugas dan Fungsi Staf Ahli
- 3) Sekretariat DPRD
- 4) Inspektorat Daerah



5) Dinas Daerah, terdiri dari:

1. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang
2. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupten Sintang
3. Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sintang
4. Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang
5. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang
6. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sintang
7. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang
8. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Sintang
9. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang
10. Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sintang
11. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sintang
12. Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang
13. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sintang
14. Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sintang
15. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sintang
16. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang
17. Dinas Perhubungan Kabupaten
18. Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sintang
19. Dinas Sosial Kabupaten Sintang
20. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sintang

6) Badan dan Lembaga Teknis, terdiri dari:

1. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sintang.



2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sintang.
3. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sintang
4. Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Sintang
5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sintang
6. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sintang
7. Rumah Sakit Umum Daerah Ade M. Djoen.

7) Kecamatan terdiri atas 14 Kecamatan, yaitu:

Tabel I.5

No	Nama Kecamatan	Nama Ibu Kota	Luas Area (Km2)
1	Dedai	Nanga Dedai	694,10
2	Kayan Hilir	Nanga Mau	1.136,70
3	Kayan Hulu	Nanga Tebidah	937,50
4	Sintang	Sintang	277,05
5	Kelam Permai	Kebong	523,80
6	Binjai Hulu	Binjai	307,65
7	Ketungau Hilir	Nanga Ketungau	1.544,50
8	Ketungau Tengah	Nanga Merakai	2.182,40
9	Ketungau Hulu	Senaning	2.138,20
10	Serawai	Nanga Serawai	2.127,50
11	Ambalau	Nanga Kemangai	6.386,40
12	Sungai Tebelian	Sungai Ukoi	526,50
13	Tempunak	Nanga Tempunak	1.027,00
14	Sepauk	Nanga Sepauk	1.825,70
J u m l a h			21.635,00



8) Kelurahan terdiri atas 16 Kelurahan, yaitu:

Tabel I.6

No	Nama Kelurahan
1	Kelurahan Akcaya
2	Kelurahan Alai
3	Kelurahan Batu Lalau
4	Kelurahan Kapuas Kanan Hilir
5	Kelurahan Kapuas Kanan Hulu
6	Kelurahan Kapuas Kiri Hilir
7	Kelurahan Kapuas Kiri Hulu
8	Kelurahan Kedabang
9	Kelurahan Ladang
10	Kelurahan Mekar Jaya
11	Kelurahan Mengkurai
12	Kelurahan Menyumbang Tengah
13	Kelurahan Rawa Mambok
14	Kelurahan Sengkuang
15	Kelurahan Tanjung Puri
16	Kelurahan Ulak Jaya

Namun pada Bulan September 2019 terjadi perubahan status terhadap beberapa Organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang, dengan berdasarkan kepada Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sintang masing-masing sebagai berikut:

1. Perda Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pembentukan Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Sintang.
2. Perda Kabupaten Sintang Nomor 2 tahun 2019 tentang Pembentukan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sintang.
3. Perda Kabupaten Sintang Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sintang.

3. Sumber Daya Aparatur

Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang didukung oleh sumber daya manusia dengan jumlah per 31 Desember 2019 sebanyak **5.796** orang, sebagaimana tercantum dalam tabel berikut :



Tabel I.7

Jumlah Pegawai Berdasarkan Wilayah Kerja

NO.	WILAYAH KERJA	Laki-laki	Perempuan	JUMLAH PEGAWAI
1	KAB/KOTA SINTANG	1405	1311	2.716
2	KECAMATAN AMBALAU	72	80	152
3	KECAMATAN BINJAI HULU	65	67	132
4	KECAMATAN DEDAI	146	146	292
5	KECAMATAN KAYAN HILIR	134	107	241
6	KECAMATAN KAYAN HULU	150	76	226
7	KECAMATAN KELAM PERMAI	99	92	191
8	KECAMATAN KETUNGAU HILIR	120	82	191
9	KECAMATAN KETUNGAU HULU	124	91	215
10	KECAMATAN KETUNGAU TENGAH	168	120	288
11	KECAMATAN SEPAUK	184	160	344
12	KECAMATAN SERAWAI	120	89	209
13	KECAMATAN SUNGAI TEBELIAN	164	154	318
14	KECAMATAN TEMPUNAK	138	132	270
	JUMLAH	3089	2707	5.796

4. Sumber Daya Keuangan

Ringkasan APBD Pemerintah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2019 sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2019.



Tabel I.8
Ringkasan APBD Kabupaten Sintang 2019

Kode Rek.	Uraian	Jumlah (Rp.)		Bertambah/(berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(Rp.)	%
1.	PENDAPATAN DAERAH	1.848.353.806.100,00	1.931.279.888.829,29	82.926.082.729,29	4,49
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	150.923.284.660,00	177.924.246.157,00	27.000.961.497,00	17,89
1.1.1	Hasil Pajak Daerah	58.582.000.000,00	65.582.000.000,00	7.000.000.000,00	11,95
1.1.2	Retribusi Daerah	4.833.984.416,00	4.833.984.416,00	0,00	0,00
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	10.500.000.000,00	10.500.000.000,00	0,00	0,00
1.1.4	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	77.007.300.244,00	97.008.261.741,00	20.000.961.497,00	25,97
1.2	DANA PERIMBANGAN	1.336.343.383.000,00	1.336.343.383.000,00	0,00	0,00
1.2.1	Dana bagi Hasil Pajak/Bagi hasil Bukan Pajak	42.000.000.000,00	42.000.000.000,00	0,00	0,00
1.2.2	Dana Alokasi Umum	933.800.038.000,00	933.800.038.000,00	0,00	0,00
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	360.543.345.000,00	360.543.345.000,00	0,00	0,00
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	455.576.326.000,00	457.610.374.000,00	2.034.048.000,00	0,45
1.3.1	Dana Hibah	66.422.600.000,00	66.422.600.000,00	0,00	0,00
1.3.2	Dana Bagi Hasil Dari Provinsi Dan Pemerintah Daerah Lainnya	50.000.000.000,00	50.000.000.000,00	0,00	0,00
1.3.3	Dana Penyesuaian Dan Otonomi Khusus	339.153.726.000,00	338.481.456.000,00	(672.270.000,00)	(0,20)
1.3.4	Bantuan Keuangan Dari Provinsi Atau Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	2.706.318.000,00	2.706.318.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH	1.942.842.993.660,00	1.971.878.003.157,00	29.035.009.497,00	1,49
2	BELANJA DAERAH				
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.195.321.432.938,98	1.189.190.652.939,80	(6.130.779.999,18)	(0,51)
2.1.1	Belanja Pegawai	664.523.039.768,98	645.617.428.704,80	(18.905.611.064,18)	(2,84)
2.1.2	Belanja Subsidi	1.849.459.758,00	0,00	(1.849.459.758,00)	(100,00)
2.1.3	Belanja Hibah	55.496.337.000,00	73.586.543.000,00	18.090.206.000,00	32,60
2.1.4	Belanja Bantuan Sosial	5.112.000.000,00	5.112.000.000,00	0,00	0,00
2.1.5	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	15.617.006.412,00	15.617.006.412,00	0,00	0,00
2.1.6	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/kota	448.723.590.000,00	448.242.468.000,00	(481.122.000,00)	(0,11)



Kode Rek.	Uraian	Jumlah (Rp.)		Bertambah/(berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(Rp.)	%
	dan Pemerintahan Desa				
2..1.7	Belanja Tidak Terduga	4.000.000.000,00	1.015.206.823,00	(2.984.793.177,00)	(74,62)
2.2	BELANJA LANGSUNG	866.918.456.382,00	1.015.864.862.449,23	148.946.406.067,23	17,18
2.2.1	Belanja Pegawai	95.870.482.092,00	99.909.504.934,00	4.039.022.842,00	4,21
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	423.101.149.220,00	503.333.122.547,23	80.231.973.327,23	18,96
2.2.3	Belanja Modal	347.946.825.070,00	412.622.234.968,00	64.675.409.898,00	18,59
	JUMLAH BELANJA DAERAH	2.062.239.889.320,98	2.205.055.515.389,03	142.815.626.068,05	6,93
	SURPLUS (DEFISIT)	(119.396.895.660,98)	(233.177.512.232,03)	(113.780.616.571,05)	95,30
3.	PEMBIAYAAN	131.946.767.660,98	245.727.384.232,03	113.780.616.571,05	86,23
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	131.946.767.660,98	245.727.384.232,03	113.780.616.571,05	86,23
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	131.946.767.660,98	245.727.384.232,03	113.780.616.571,05	86,23
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	12.549.872.000,00	12.549.872.000,00	0,00	0,00
3.2.1	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	12.549.872.000,00	12.549.872.000,00	0,00	0,00
	PEMBIAYAAN NETTO	119.396.895.660,98	233.177.512.232,03	113.780.616.571,05	95,30
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	0	0	0,00	

B. PERMASALAHAN UTAMA (*STRATEGIC ISSUE*)

Dalam upaya menjamin terwujudnya masyarakat Kabupaten Sintang yang cerdas, sehat, maju, religius dan sejahtera didukung penerapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih pada tahun 2021, maka strategi pembangunan yang akan dijalankan adalah:

1. **Pro Education Strategy** adalah strategi yang berorientasi pada pembangunan Pendidikan Formal dan Informal di Masyarakat.



2. **Pro Health Strategy** adalah suatu strategi yang berorientasi pada peningkatan Kesehatan Masyarakat secara menyeluruh.
3. **Pro Public Good Strategy** adalah suatu strategi yang berorientasi pada peningkatan kualitas dan kuantitas barang publik.
4. **Pro Empowering Strategy** adalah suatu strategi yang berorientasi pada pelibatan dan peningkatan kapasitas masyarakat sebagai subyek pembangunan.
5. **Pro Growth Strategy** adalah suatu strategi yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi.
6. **Pro Good Governance Strategy** adalah suatu strategi yang berorientasi pada Peningkatan Kemampuan Aparatur Birokrasi dalam rangka Penyelenggaraan Pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

Disamping strategi pembangunan sebagaimana diuraikan di atas, dalam upaya mewujudkan visi dan misi Bupati Sintang periode tahun 2016-2021 juga diperkuat dengan menetapkan penggerak utama (*prime mover*) pembangunan daerah yang terdiri dari:

1. Membangun wilayah dari pinggiran;
2. Penataan dan pemekaran wilayah;
3. Aksesibilitas terhadap sumber daya listrik dan energi lainnya;
4. Hilirisasi produk;
5. Kegawatdaruratan infrastruktur transportasi; dan
6. Tata kelola pemerintahan.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021

RPJMD Kabupaten Sintang periode 2016-2021 sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2016 disusun dengan maksud sebagai upaya memenuhi kebutuhan daerah terhadap suatu rencana pembangunan daerah dalam dimensi waktu lima tahun ke depan yang memberikan arah dan sekaligus pedoman kepada seluruh *stakeholders* pembangunan di Kabupaten Sintang. Disamping itu, penyusunan RPJMD Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021 merupakan upaya penjabaran dari visi, misi dan program prioritas Bupati Sintang hasil Pemilihan Kepala Daerah yang dilaksanakan langsung Tahun 2015.

Sedangkan tujuan penyusunan RPJMD Kabupaten Sintang periode 2016-2021 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati tersebut adalah sebagai berikut :

- a. terjabarnya visi, misi, agenda pembangunan dan program Bupati/Wakil Bupati ke dalam arah kebijakan dan program pembangunan yang rinci, terarah, terukur, dan dapat dilaksanakan dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2021;
- b. menyediakan satu acuan resmi bagi seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang dalam menentukan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan dengan dana yang bersumber baik dari APBD, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, maupun Sumber dana lainnya;



- c. mendorong terwujudnya koordinasi, integrasi, sinergi, dan sinkronisasi pembangunan, baik antar SKPD, maupun antar Pemerintah Kabupaten Sintang dengan Pemerintah Kabupaten/Kota lainnya, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan Pemerintah Pusat;
- d. tersedianya tolok ukur untuk mengukur kinerja dan mengevaluasi kinerja setiap SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang;
- e. terciptanya iklim pemerintahan yang aman dan kondusif dalam melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan;
- f. mengoptimalkan kerjasama dan kemitraan antara Pemerintah Kabupaten Sintang, swasta, dan masyarakat.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Pemerintah Kabupaten Sintang memiliki fungsi sebagai:

- a. Pedoman bagi Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) SKPD;
- b. Pedoman bagi Pemerintah Kabupaten dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang pada tahun 2018 ini merupakan tahun kedua dari lima tahun RPJMD Kabupaten Sintang tahun 2016–2021;
- c. Pedoman bagi Pemerintah Kabupaten dalam menyusun Kebijakan Umum APBD (KUA).



1. Visi

Visi Pembangunan Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021, yaitu:

“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Sintang Yang Cerdas, Sehat, Maju, Religius, dan Sejahtera didukung Penerapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Dan Bersih pada Tahun 2021”

Makna yang terkandung dalam visi tersebut, diperoleh beberapa komponen pokok adalah:

- **Masyarakat Kabupaten Sintang Yang Cerdas** adalah keadaan dimana masyarakat memiliki keunggulan intelektual yang berdaya saing tinggi, berperadaban, profesional serta berwawasan kedepan yang luas sehingga mau dan mampu berperan secara optimal dalam kehidupan sosial.
- **Masyarakat Kabupaten Sintang Yang Sehat** adalah keadaan dimana kondisi masyarakat, baik jasmaniah maupun rohaniyah, dalam keadaan baik, dalam arti memiliki daya tahan hidup yang tinggi.
- **Masyarakat Kabupaten Sintang Yang Maju** adalah keadaan dimana Masyarakat memiliki kondisi fisik dan non fisik yang unggul, mandiri, dan berwawasan kedepan luas dengan pemanfaatan segenap potensi sumber daya manusia, sumber daya alam, dan sumber daya buatan, yang dilandasi kearifan dalam pengelolaan dan pemanfaatan lingkungan hidup dan tata ruang.
- **Masyarakat Kabupaten Sintang Yang Religius** adalah keadaan dimana Masyarakat menghayati dan mengamalkan nilai-nilai luhur agama yang dianutnya.



- **Masyarakat Kabupaten Sintang Yang Sejahtera** adalah keadaan dimana kebutuhan masyarakat terpenuhi secara optimal, adil, dan merata.
- **Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih** adalah keadaan dimana pemerintah daerah menerapkan nilai-nilai transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sehingga terwujud pemerintahan daerah yang bersih, efektif, efisien, jujur, dan bertanggung jawab.

2.Misi

Dalam upaya mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021 tersebut, maka misi pembangunan Kabupaten Sintang adalah sebagai berikut:

- Misi 1 : Melaksanakan pembangunan pendidikan berkualitas yang berakar pada budaya lokal.
- Misi 2 : Melaksanakan pembangunan kesehatan yang menyeluruh, adil dan terjangkau bagi masyarakat.
- Misi 3 : Mengoptimalkan penyediaan infrastruktur dasar guna pengembangan potensi ekonomi dan sumber daya daerah.
- Misi 4 : Meningkatkan pemahaman, penghayatan dan pengamalan agama dalam kehidupan sosial.
- Misi 5 : Mengembangkan ekonomi kerakyatan berbasis pedesaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- Misi 6 : Menata dan mengembangkan manajemen pemerintah daerah yang sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.



3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran merupakan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah dalam mendukung pelaksanaan misi. Tujuan dan sasaran untuk masing-masing Misi sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :

1. Misi pertama, “Melaksanakan pembangunan pendidikan berkualitas yang berakar pada budaya lokal” dirumuskan dengan tujuan Meningkatkan kualitas pendidikan yang berakar pada budaya lokal, dengan sasaran :
 - 1.1. Meningkatnya angka melek huruf.
 - 1.2. Tuntasnya wajib belajar pendidikan 9 tahun.
 - 1.3. Meningkatnya budaya dan minat baca masyarakat.
 - 1.4. Meningkatnya kualitas materi ajar budaya dan bahasa lokal dalam kurikulum pendidikan dasar
 - 1.5. Meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat ke jenjang menengah dan tinggi.
2. Misi kedua, “Melaksanakan pembangunan kesehatan yang menyeluruh, adil dan terjangkau bagi masyarakat.” dirumuskan dengan tujuan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, dengan sasaran :
 - 2.1. Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan terutama untuk kesehatan ibu dan anak.
 - 2.2. Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk.
 - 2.3. Meningkatnya prestasi olahraga untuk mendukung pola hidup sehat.



3. Misi ketiga, “Mengoptimalkan penyediaan infrastruktur dasar guna pengembangan potensi ekonomi dan sumber daya daerah” dirumuskan dengan tujuan : a) Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur dan b) Meningkatkan kualitas lingkungan hidup, dengan sasaran :
 - 3.1. Tersedianya infrastruktur/prasarana dan sarana transportasi yang handal untuk mendukung pergerakan orang dan barang..
 - 3.2. Tersedianya sumber daya air yang handal dan berkualitas untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga (domestik), pertanian (irigasi), industri, dan untuk berbagai keperluan lainnya.
 - 3.3. Meningkatnya akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana dasar pemukiman (mencakup persampahan, air bersih, air limbah).
 - 3.4. Meningkatnya cakupan pelayanan dan kualitas infrastruktur energi dan ketenagalistrikan.
 - 3.5. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup.
 - 3.6. Terwujudnya tata ruang wilayah sesuai dengan Peraturan daerah mengenai RTRW.
4. Misi keempat, “Meningkatkan pemahaman, penghayatan dan pengamalan agama dalam kehidupan sosial” dirumuskan dengan tujuan mewujudkan kualitas kehidupan keagamaan, toleran dalam kemajemukan masyarakat, dengan sasaran :
 - 4.1. Meningkatnya kualitas kehidupan beragama.
 - 4.2. Meningkatnya kerukunan antar umat beragama.
5. Misi kelima, “Mengembangkan ekonomi kerakyatan berbasis pedesaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat” dirumuskan dengan tujuan : a) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berbasis ekonomi kerakyatan, dan b) Meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat desa, dengan sasaran:



-
- 5.1. Meningkatnya perekonomian daerah.
 - 5.2. Meningkatnya investasi yang berbasis potensi unggulan daerah.
 - 5.3. Meningkatnya daya saing potensi unggulan daerah.
 - 5.4. Terwujudnya sentra pertumbuhan ekonomi berbasis keunggulan lokal.
 - 5.5. Meningkatnya peran koperasi, UMKM dan lembaga keuangan non perbankan dalam pengembangan perekonomian rakyat.
 - 5.6. Meningkatnya produksi dan produktivitas komoditi pertanian dan perkebunan di desa.
6. Misi keenam, “Menata dan mengembangkan manajemen pemerintah daerah yang sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih” dirumuskan dengan tujuan : a) Meningkatkan kapasitas SDM aparatur; b) Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan; c) Melakukan reformasi birokrasi di pemerintahan daerah; dan d) Meningkatkan kapasitas pemerintahan desa, dengan sasaran :
 - 6.1. Meningkatnya kompetensi SDM aparatur daerah.
 - 6.2. Meningkatnya objektivitas penempatan pejabat daerah.
 - 6.3. Profesionalisme pengelolaan keuangan daerah.
 - 6.4. Meningkatnya transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
 - 6.5. Meningkatnya kesadaran dan partisipasi politik masyarakat.
 - 6.6. Meningkatnya kesadaran hukum masyarakat, stabilitas keamanan dan ketertiban umum.
 - 6.7. Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pemerintahan desa
 - 6.8. Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur pemerintahan desa dan BPD



B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Perjanjian Kinerja Tahun 2019 ini merupakan hasil perbaikan dan evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kabupaten Sintang yang dilakukan oleh Kementerian PANRB dan ditetapkan melalui Peraturan Bupati Sintang Nomor 69 Tahun 2018 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021

Pemerintah Kabupaten Sintang telah menyediakan dana melalui APBD tahun 2019 sebesar Rp. 430.131.255.080,00 untuk mendukung implementasi perjanjian kinerja tersebut. Adapun sasaran dan indikator kinerja beserta targetnya yang dilaksanakan pada tahun 2019 adalah sebagai berikut :

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Target
1.	Meningkatnya Angka Melek Huruf an Tuntasnya Wajib Belajar Pendidikan 9 Tahun	1. Angka Melek Huruf (AMH)	%	92,04
		2. Angka Partisipasi Sekolah SD/MI	%	98,55
		3. Angka Partisipasi Sekolah SMP/MTs	%	68,84
		4. Angka Partisipasi Kasar (APK) SD / MI	%	122,40
		5. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP / MTs	%	101,39
		6. Angka Partisipasi Murni (APM) SD / MI	%	98,69
		7. Angka Partisipasi Murni (APM) SMP / MTs	%	80,52
		8. Angka Rata-rata Lama Sekolah (ARLS)	Tahun	7,43
2.	Meningkatnya nilai budaya lokal	1. Jumlah grup kesenian	grup	37
		2. Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya	even	2
		3. Tingkat Pengenalan Budaya Lokal pada Jalur Pendidikan Formal dan Informasl	Kegiatan	75
3.	Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan terutama untuk kesehatan ibu dan anak serta penduduk miskin	1. Angka Usia Harapan Hidup	tahun	71,85
		2. Angka Kelangsungan hidup bayi (AKHB) per 1000 Kelahiran Hidup	per 1000 kh	976
		3. Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan Yang Memiliki Kompetensi Kebidanan	%	93,50
		4. Persentase Balita Gizi Buruk	%	2,30
		5. Persentase Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan	%	100
		6. Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	%	93,04
		7. Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA (+)	%	80,02
		8. Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin	%	25,55
		9. Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu per 100.000 penduduk	Per 100 ribu pddk	21,69



No.	Sasaran	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Target
		10 Rasio Rumah Sakit per 100.000 penduduk	Per 100 ribu pddk	1,09
4.	Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk	1. Rasio Akseptor KB 2. Cakupan Peserta KB Aktif 3. Jumlah Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I	% Aseptor KK	75,16 55.392 19.299
5.	Tersedianya infrastruktur transportasi yang handal untuk mendukung pergerakan orang dan barang	1. Proporsi Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Baik dan Sedang 2. Persentase Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam)	% %	49,28 20,96
6.	Tersedianya sumber daya air untuk memenuhi kebutuhan, pertanian (irigasi)	1. Rasio Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik 2. Luas Irigasi Kabupaten dalam Kondisi Baik	% ha	50,21 5.353
7.	Meningkatnya akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana dasar pemukiman (mencakup persampahan, air bersih, air limbah)	1. Persentase Rumah Tangga Pengguna Air Bersih/Minum (PDAM) 2. Rasio Tempat Pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk 3. Persentase Penanganan Sampah	% % %	5,8 1/402= 0,24 75
8.	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	1. Tingkat Pencemaran Udara 2. Pencemaran Status Mutu Air (14 Sungai)	ISPU Status Kondisi	25 14
9.	Meningkatnya kerukunan antar umat beragama	1. Nilai Toleransi antara Pemeluk Agama	nilai	100
10.	Meningkatnya perekonomian daerah	1. Porsentase Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	5,5
11.	Meningkatnya investasi yang berbasis potensi unggulan lokal dan lapangan pekerjaan	1. Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA) 2. Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA) 3. Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi PMDN (Milyar Rupiah) 4. Angka Partisipasi Angkatan Kerja 5. Tingkat Pengangguran Terbuka	buah Milyar Rp. Milyar Rp. % %	227 1.695,20 325 85,6 3,01
12.	Meningkatnya daya saing potensi unggulan daerah dan terwujudnya sentra pertumbuhan ekonomi berbasis keunggulan lokal	1. Persentase Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB 2. Persentase Pertumbuhan Industri Usaha Kecil dan Menengah yang Bersertifikat 3. Persentase Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	% % %	10,73 50 17,88



No.	Sasaran	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Target
13.	Meningkatnya peran koperasi, UMKM, dan lembaga keuangan non perbankan dalam pengembangan perekonomian rakyat	1. Persentase Koperasi Aktif	%	71,50
14.	Meningkatnya produksi dan produktivitas komoditi pertanian dan perkebunan di desa serta meningkatnya ketahanan pangan	1. Nilai Tukar Petani	point	102
		2. Jumlah Produksi Padi per tahun	ton/thn	87,078
		3. Jumlah Produksi Jagung per tahun	ton/thn	3.960
		4. Persentase Kontribusi Sektor Pertanian/Perkebunan terhadap PDRB	%	28,43
		5. Produksi Karet per tahun	ton/thn	57.286
		6. Produksi Kelapa Sawit per tahun	ton/thn	1.330.360
		7. Produksi Lada per tahun	ton/thn	1.350
		8. Produksi Kakao per tahun	%	24,30
		9. Produksi Kopi per tahun	%	112
		10. Jumlah Produksi Peternakan (daging) per tahun	ton/thn	6,343
		11. Jumlah Produksi Perikanan per tahun	ton/thn	1,969
		12. Luas Kebun Karet	ton/thn	94,935
		13. Luas Kebun Kelapa Sawit	ton/thn	212.078
		14. Luas Kebun Lada	ha	1,712
		15. Luas Kebun Kakao	ha	425
		16. Luas Kebun Kopi	ha	400
		17. Persentase Ketersediaan Pangan Utama	%	99
		18. Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah	ha	90
15.	Profesionalisme Pengelolaan Keuangan Daerah	1. Penetapan APBD tepat waktu	nilai	100
		2. Opini WTP dari BPK	nilai	100
16.	Meningkatnya transparansi, akuntabilitas dan partisipasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	1. Ketersediaan Sistem Informasi Pelayanan Perijinan dan Administrasi Pemerintah	unit	1
		2. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	nilai	65
		3. Persentase Hasil Musrebang yang terakomodir dalam RPJMD/RKPD	%	90
17.	Meningkatnya kesadaran hukum masyarakat, stabilitas keamanan dan ketertiban umum.	1. Cakupan Penyelesaian Pelanggaran Peraturan Daerah	Per 10.000 pddk	0,85



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Sintang

Hasil pengukuran kinerja sesuai mekanisme perhitungan pencapaian kinerja sasaran Pemerintah Kabupaten Sintang tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel III.1
Capaian Kinerja Sasaran

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama (IKU)	SATUAN	TAHUN 2019			Capaian Kinerja Sasaran
				TARGET	REALISASI	%	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Meningkatnya angka melek huruf dan tuntasnya wajib belajar pendidikan 9 tahun	1. Angka Melek Huruf (AMH)	%	92,04	91,18	99,07	92,50
		2. Angka Partisipasi Sekolah SD/MI	%	98,55	96,97	98,40	92,50
		3. Angka Partisipasi Sekolah SMP/MTs	%	68,84	58,76	85,36	92,50
		4. Angka Partisipasi Kasar (APK) SD / MI	%	122,40	116,97	95,56	92,50
		5. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP / MTs	%	101,39	100,97	99,59	92,50
		6. Angka Partisipasi Murni (APM) SD / MI	%	98,69	99,99	101,32	92,50
		7. Angka Partisipasi Murni (APM) SMP / MTs	%	80,52	70,17	87,15	92,50
		8. Angka Rata-rata Lama Sekolah (ARLS)	Tahun	7,43	6,73	90,58	92,50
Capaian Kinerja Sasaran Sangat Berhasil						94,63	92,50
2.	Meningkatnya nilai budaya lokal	1. Jumlah grup kesenian	Grup	37,00	51	137,84	92,50
		2. Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya	Even	2,00	2	100,00	92,50
		3. Tingkat Penganalan Budaya Lokal	Kegiatan	75,00	50	66,67	62,50
Capaian Kinerja Sasaran Berhasil						101,50	82,50



No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama (IKU)	SATUAN	TAHUN 2019			Capaian Kinerja Sasaran
				TARGET	REALISASI	%	
1	2	3	4	5	6	7	8
3.	Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan terutama untuk kesehatan ibu dan anak serta penduduk miskin	1. Angka Usia Harapan Hidup	tahun	71,85	71,29	99,22	92,50
		2. Angka Kelangsungan hidup bayi (AKHB) per 1000 Kelahiran Hidup	per 1000 kh	976,00	990	101,43	92,50
		3. Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan Yang Memiliki Kompetensi Kebidanan	%	93,50	81,97	87,67	92,50
		4. Persentase Balita Gizi Buruk	%	2,30	0,26	188,70	92,50
		5. Persentase Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan	%	100,00	100,00	100,00	92,50
		6. Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	%	93,04	85,01	91,37	92,50
		7. Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA (+)	%	80,02	45,37	56,70	62,50
		8. Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin	%	25,55	62,63	245,13	92,50
		9. Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu per 100.000 penduduk	Per 100 ribu pddk	21,69	92,52	426,56	92,50
		10. Rasio Rumah Sakit per 100.000 penduduk	Per 100 ribu pddk	1,09	0,97	88,99	92,50
Capaian Kinerja Sasaran Sangat Berhasil						148,58	89,50
4.	Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk	1. Rasio Akseptor KB	%	75,16	78,45	104,38	92,50
		2. Cakupan Peserta KB Aktif	Akseptor	55.392	61.227	110,53	92,50
		3. Jumlah Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I	KK	19.299	19.299	100,00	92,50
Capaian Kinerja Sasaran Sangat Berhasil						104,97	92,50
5.	Tersedianya infrastruktur transportasi yang handal untuk mendukung pergerakan orang dan barang	1. Proporsi Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Baik dan Sedang	%	49,28	50,16	101,79	92,50
		2. Persentase Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam)	%	20,96	9,36	44,66	27,50
Capaian Kinerja Sasaran Cukup Berhasil						66,61	60,00
6.	Tersedianya sumber daya air untuk memenuhi kebutuhan pertanian (irigasi)	1. Rasio Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik	%	50,21	48,82	97,23	92,50
		2. Luas Irigasi Kabupaten dalam Kondisi Baik	Ha	5.353	5.546,21	103,61	92,50
Capaian Kinerja Sasaran Sangat Berhasil						100,42	92,50



No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama (IKU)	SATUAN	TAHUN 2019			Capaian Kinerja Sasaran
				TARGET	REALISASI	%	
1	2	3	4	5	6	7	8
7.	Meningkatnya akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana dasar pemukiman (mencakup persampahan, air bersih, air limbah)	1. Persentase Rumah Tangga Pengguna Air Bersih/Minum (PDAM)	%	5,80	4,60	79,31	77,50
		2. Rasio Tempat Pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk	%	0,24	0,11	45,83	27,50
		3. Persentase Penanganan Sampah	%	75,00	62,37	83,16	77,50
Capaian Kinerja Sasaran Cukup Berhasil						69,43	60,83
8.	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	1. Tingkat Pencemaran Udara (ISPU 0-50 =Baik)	ISPU	25,00	27,71	110,84	92,50
		2. Pencemaran Status Mutu Air (14 Sungai)	Kondisi sedang	14,00	7,00	50,00	27,50
Capaian Kinerja Sasaran Sangat Berhasil						80,42	92,50
9.	Meningkatnya kerukunan antar umat beragama	1. Nilai Toleransi antara Pemeluk Agama	nilai	baik	baik	100,00	92,50
Capaian Kinerja Sasaran Sangat Berhasil						100,00	92,50
10.	Meningkatnya Perekonomian Daerah	1. Persentase Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	5,5	5,09	90,00	92,50
Capaian Kinerja Sasaran Sangat Berhasil						90,00	92,50
11.	Meningkatnya investasi yang berbasis potensi unggulan lokal dan lapangan pekerjaan	1. Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)	buah	227	272	119,82	92,50
		2. Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)	Milyar Rp.	1.695,20	3.489,20	205,83	92,50
		3. Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi PMDN = Rp. 250 M	Milyar Rp.	325,00	1.461,75	449,77	92,50
		4. Angka Partisipasi Angkatan Kerja	%	85,60	72,20	84,35	77,50
		5. Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3,01	2,99	100,66	92,50
Capaian Kinerja Sasaran Sangat Berhasil						140,79	89,50
12.	Meningkatnya daya saing potensi unggulan daerah dan Terwujudnya sentra pertumbuhan ekonomi berbasis keunggulan lokal	1. Persentase Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB	%	10,73	9,31	86,77	92,50
		2. Persentase Produk Usaha Kecil dan Menengah yang Bersertifikat	%	50,00	37,00	74,00	77,50
		3. Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB	%	17,88	9,32	52,13	27,50
Capaian Kinerja Sasaran Sangat Berhasil						80,38	85,00



No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama (IKU)	SATUAN	TAHUN 2019			Capaian Kinerja Sasaran
				TARGET	REALISASI	%	
1	2	3	4	5	6	7	8
13.	Meningkatnya peran koperasi, UMKM, dan lembaga keuangan non perbankan dalam pengembangan perekonomian rakyat	1. Persentase Koperasi Aktif	%	71,50	87,00	121,68	92,50
Capaian Kinerja Sasaran Sangat Berhasil						121,68	92,50
14.	Meningkatnya produksi dan produktivitas komoditi pertanian dan perkebunan di desa serta meningkatnya ketahanan pangan	1. Nilai Tukar Petani	poin	102,00	99,00	97,06	92,50
		2. Jumlah Produksi Padi per tahun	ton/thn	87.078,00	77.516,00	89,02	92,50
		3. Jumlah Produksi Jagung per tahun	ton/thn	3.960,00	8.758,00	221,16	92,50
		4. Persentase Kontribusi Sektor Pertanian/Perkebunan terhadap PDRB	%	28,43	21,23	74,67	77,50
		5. Produksi Karet per tahun	ton/thn	57.286,00	39.274,00	68,56	62,50
		6. Produksi Kelapa Sawit per tahun	ton/thn	1.330.360,00	1.169.879,00	87,94	92,50
		7. Produksi Lada per tahun	ton/thn	1.350,00	901,00	66,74	62,50
		8. Produksi Kakao per tahun	ton/thn	24,30	10,00	41,15	27,50
		9. Produksi Kopi per tahun	ton/thn	112,00	99,00	88,39	92,50
		10. Jumlah Produksi Peternakan (daging) per tahun	ton/thn	6.343,00	5.677,00	89,50	92,50
		11. Jumlah Produksi Perikanan per tahun	ton/thn	1.969,00	19.449,00	987,76	92,50
		12. Luas Kebun :	ha	309.550,00	278.857,00	90,08	92,50
		- Karet	ha	94.935,00	97.167,00	102,35	92,50
		- Kelapa Sawit	ha	212.078,00	178.992,00	84,40	77,50
- Lada	ha	1.712,00	2.217,00	129,50	92,50		
- Kakao	ha	425,00	107,00	25,18	27,50		
- Kopi	ha	400,00	374,00	93,50	92,50		
13. Persentase Ketersediaan Pangan Utama	%	99,00	100,00	101,01	92,50		
14. Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah	ton	90,00	75.612,00	84.013,33	92,50		
Capaian Kinerja Sasaran Berhasil						4.555,33	80,92
15.	Profesionalisme Pengelolaan Keuangan Daerah	1. Penetapan APBD tepat waktu	nilai	100,00	100,00	100,00	92,50
		2. Opini WTP dari BPK	nilai	100,00			
Capaian Kinerja Sasaran Sangat Berhasil						100,00	92,50



No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama (IKU)	SATUAN	TAHUN 2019			Capaian Kinerja Sasaran
				TARGET	REALISASI	%	
1	2	3	4	5	6	7	8
16.	Meningkatnya transparansi, akuntabilitas dan partisipasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	1. Ketersediaan sistem informasi pelayanan perijinan dan administrasi pemerintah	unit	1,00	1,00	100,00	92,50
		2. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Nilai	65,00	55,15	84,85	77,50
		3. Persentase Hasil Musrembang Yang Terakomodir dalam RPJMD/RKPD	%	40,00	23,00	57,50	62,50
Capaian Kinerja Sasaran Berhasil						80,78	77,50
17.	Meningkatnya Kesadaran Hukum Masyarakat, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Umum	1. Cakupan Penyelesaian Pelanggaran Peraturan Daerah	per 10.000 pdk	0,85	0,59	69,41	62,50
Capaian Kinerja Sasaran Cukup Berhasil						69,41	62,50

Kesimpulan dari 17 (tujuhbelas) sasaran tersebut, adalah sebagai berikut :

- Sangat Berhasil 11 = 64,70%
- Berhasil 3 = 17,65%
- Cukup Berhasil 3 = 17,65%
- Jumlah 17 = 100,00%

Satu sasaran (dalam dokumen IKU sasaran nomor 9) tidak dimasukkan ke dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2019 karena tidak didukung program dan kegiatan pada tahun anggaran 2019.

a. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Sasaran 1: Meningkatnya Angka Melek Huruf dan Tuntasnya Wajib Belajar Pendidikan 9 Tahun

Pelaksanaan sasaran ini untuk mencapai misi “Melaksanakan pembangunan pendidikan berkualitas yang berakar pada budaya lokal”.



Kinerja sasaran “Meningkatnya angka melek huruf dan tuntasnya wajib belajar pendidikan 9 tahun” dapat dilihat dari capaian indikator kinerja sebagai berikut :

1. Perbandingan Antara Target Dan Realisasi Kinerja Tahun 2019

Tabel III.2

Indikator Pencapaian Sasaran 1

	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Angka Melek Huruf (AMH)	%	92,04	91,18	99,07
2	Angka Partisipasi Sekolah SD/MI	%	98,55	96,97	98,40
3	Angka Partisipasi Sekolah SMP/MTs	%	68,84	58,76	85,36
4	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD /MI	%	122,40	116,97	95,56
5	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs	%	101,39	100,97	99,59
6	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI	%	98,69	99,99	101,32
7	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs	%	80,52	70,17	112,62
8	Angka Rata-rata Lama Sekolah (ARLS)	Tahun	7,43	6,73	90,58
	Capaian Kinerja Sasaran Sangat Berhasil				92,50

Tabel di atas menggambarkan pencapaian sasaran selama tahun 2019, secara ringkas diuraikan berikut ini:

1) Prosentase Angka Melek Huruf (AMH)

Capaian indikator Prosentase Angka Melek Huruf sebesar 99,07%, sehingga dapat dikategorikan **Sangat Berhasil**. Pada tahun 2019 indikator tersebut ditargetkan sebesar 92,04% dan terealisasi 91,18%. Realisasi tersebut diperoleh dengan membandingkan antara Jumlah Penduduk usia 15 tahun ke atas yang dapat baca tulis dengan Jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas.

2) Prosentase Angka Partisipasi Sekolah SD/MI

Capaian indikator Prosentase Angka Partisipasi Sekolah SD/MI sebesar 98,40%, sehingga dapat dikategorikan **Sangat Berhasil**. Pada tahun 2019 indikator Prosentase Angka Partisipasi Sekolah SD/MI ditargetkan sebesar 98,55% dan sudah terealisasi 96,97%.



3) Angka Partisipasi Sekolah SMP/MTs

Capaian indikator Prosentase Angka Partisipasi Sekolah SMP/MTs sebesar 85,36%, sehingga dapat dikategorikan **Sangat Berhasil**. Pada tahun 2019 indikator tersebut ditargetkan sebesar 68,84% dan sudah terealisasi 58,76%.

4) Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI

Capaian indikator Prosentase Angka Partisipasi Kasar SD/MI sebesar 95,56%, sehingga dapat dikategorikan **Sangat Berhasil**. Pada tahun 2019 indikator tersebut ditargetkan sebesar 122,40% dan terealisasi 116,97%. Realisasi Angka Partisipasi Kasar (APK) diperoleh dengan membandingkan antara jumlah siswa usia sekolah (7-12 tahun) yang bersekolah di SD/MI dengan jumlah penduduk usia sekolah dan bukan usia sekolah (kurang atau lebih dari usia sekolah) pada periode yang sama.

5) Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs

Capaian indikator Prosentase Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs sebesar 99,59%, sehingga dapat dikategorikan **Sangat Berhasil**. Pada tahun 2019 indikator ini ditargetkan sebesar 101,39% dan terealisasi 100,97%. Realisasi Angka Partisipasi Kasar (APK) diperoleh dengan membandingkan antara jumlah siswa usia sekolah (13-15 tahun) yang bersekolah di SMP/MTs dengan jumlah penduduk usia sekolah dan bukan usia sekolah (kurang atau lebih dari usia sekolah) pada periode yang sama.

6) Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI

Capaian indikator Prosentase Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/ sebesar 101,32%, sehingga dapat dikategorikan **Sangat Berhasil**. Pada tahun 2019 indikator ini ditargetkan sebesar 98,69,% dan sudah terealisasi 99,99%. Realisasi tersebut diperoleh dengan membandingkan



antara Jumlah siswa usia 7-12 tahun dijenjang SD/MI dengan Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun.

7) Prosentase Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs

Capaian indikator Prosentase Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs sebesar 87,15%, sehingga dapat dikategorikan **Sangat Berhasil**. Pada tahun 2019 indikator ini ditargetkan sebesar 80,52% dan terealisasi 70,17%. Realisasi tersebut diperoleh dengan membandingkan antara Jumlah siswa usia 13-15 tahun dijenjang SMP/MTs dengan Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun.

8) Angka Rata-rata Lama Sekolah (ARLS)

Capaian indikator Angka Rata-rata Lama Sekolah (ARLS) sebesar 90,58%, sehingga dapat dikategorikan **Sangat Berhasil**. Pada tahun 2019 indikator ini ditargetkan sebesar 7,43 Tahun dan terealisasi 6,73 Tahun. Angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS) merupakan bagian dari aspek pendidikan yang digunakan dalam menilai perkembangan pembangunan pendidikan. Capaian ini bermakna bahwa hingga tahun 2019 tingkat pendidikan penduduk Kabupaten Sintang rata-rata kelas 1 SMP. Oleh karenanya, untuk meningkatkan RLS harus diupayakan menekan serendah mungkin penduduk buta huruf sekaligus menjalankan dengan konsisten program wajib belajar 12 tahun untuk peningkatan APM pada semua jenjang pendidikan, terutama APM SMA dan Perguruan Tinggi.

2. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel III.3
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya



No	Sasaran Strategis	Program	Anggaran			Capaian Kinerja (%)	Tingkat Efisiensi
			Target (Rp.)	Realisasi Rp.)	%		
1	Meningkatnya angka melek huruf dan tuntasnya wajib belajar pendidikan 9 tahun	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	94.996.341.156,00	58.019.125.077,00	61,08	94,63	
			Rata-rata			61,08	94,63

Apabila dibandingkan antara persentase realisasi anggaran sebesar 61,08% dan realisasi capaian kinerja sasaran sebesar 94,63%, maka pada sasaran ini tingkat efisiensi penggunaan sumber dayanya belum efisien.

3. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Angka Melek Huruf (AMH) merupakan salah satu unsur yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pembangunan pendidikan di dunia, termasuk Kabupaten Sintang. Peningkatan AMH mengindikasikan keberhasilan pembangunan pendidikan melalui program pemberantasan buta huruf (PBH), Kejar Paket A dan Paket B. Jumlah penduduk usia 15 tahun keatas yang bisa baca dan tulis (tidak buta huruf) pada tahun 2016 mencapai 233.014 sedangkan jumlah penduduk usia > 15 tahun seluruhnya mencapai 261.000 jiwa.

Pencapaian sasaran tuntasnya wajib belajar 9 tahun berkat dukungan dan kontribusi baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun peran serta masyarakat. Pemerintah Kabupaten Sintang dalam mendukung sasaran ini, telah melakukan perluasan akses pendidikan pada jenjang SD dan SMP dengan melakukan pembangunan Ruang Kelas Baru, rehabilitasi ruang Kelas, pemberian bantuan operasional sekolah daerah kepada sekolah SD Negeri dan Swasta, SMP Negeri dan Swasta serta MI dan MTs Swasta.



4. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2019 Dengan Kondisi Awal (Tahun 2015), Realisasi Tahun 2017 Dan Tahun 2018 Serta Target Akhir (Tahun 2021) RPJMD, Target RPJMD Provinsi dan Target Nasional

Tabel III.4
Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 1 dengan kondisi awal dan target akhir RPJMD, RPJMD Provinsi dan RPJMN

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal (Tahun 2015)	Realisasi Tahun 2017	Realisasi Tahun 2018	Realisasi Tahun 2019	Target Tahun 2021	Target RPJMD Provinsi Tahun 2018	Target RPJMN Tahun 2019	
1	2	3	4	5	6	7	6	7	8	
2	Meningkatnya angka melek huruf dan Tuntasnya wajib belajar pendidikan 9 tahun.	1	Angka melek huruf	88,69 %	90,19%	90,19%	91,18%	93,92%	98,50%	96,10%
		2	APS D/MI	97,35%	96,97%	96,97%	96,97%	99,15%	-	-
		3	APS MP/MTs	53,84%	58,76%	58,76%	58,76%	78,84%	-	-
		4	APK D/MI	122,36%	118,87%	118,87%	116,97%	122,42%	122%	114,1
		5	APK MP/ MTs	101,35%	104,45%	104,45%	100,97%	101,41%	95%	106,9%
		6	APM D/MI	96,29%	99,96%	99,96%	99,99%	100%	100%	94,8%
		7	APM MP/ MTs	74,4%	88,96%	88,96%	70,17%	83,58%	77%	82%
		8	ARLB	6,63 thn	7,03 Thn	7,03 Thn	6,73Thn	8 Thn	7,5 Thn	8,8 Thn

Realisasi Angka Melek Huruf pada tahun 2019 dibandingkan dengan kondisi awal indikator kinerja di dalam RPJMD sebesar 88,69%, tahun 2017 dan 2018 yaitu sama sebesar 90,19%, maka realisasi pada tahun 2019 mengalami kenaikan 2,49% dan 0,99%. Apabila dibandingkan dengan target kinerja pada akhir periode RPJMD tahun 2021 sebesar 93,92%, realisasi pada tahun 2019 baru mencapai 97%. Hal ini menunjukkan adanya perkembangan dan peningkatan ke arah yang lebih baik. Lebih lanjut bila dibandingkan dengan Prosentase Penduduk yang berusia >15 tahun melek huruf pada kinerja akhir periode RPJMD Provinsi Kalimantan Barat tahun 2018 sebesar 98,50% dan pada kinerja akhir periode RPJMN tahun 2019 sebesar 96,10%, maka realisasi tahun 2019 mencapai 92,57% dan 94,88%.

Realisasi Angka Partisipasi Sekolah SD/MI pada tahun 2019 dibandingkan dengan kondisi awal indikator kinerja di dalam RPJMD sebesar 97,35%, realisasi tahun 2017 dan 2018 sebesar 98,99% dan 96,97%, mengalami penurunan 0,38%, 1,92% dan 0% (tidak mengalami



perubahan). Apabila dibandingkan dengan target kinerja pada akhir periode RPJMD tahun 2021 sebesar 99,15%, realisasi pada tahun 2019 baru mencapai 97,80%.

Realisasi Angka Partisipasi Sekolah SMP/MTs pada tahun 2019, dibandingkan dengan kondisi awal indikator kinerja di dalam RPJMD sebesar 53,84% mengalami kenaikan 4,92%, dibandingkan realisasi tahun 2017 dan 2018 sebesar 58,76% tidak mengalami perubahan. Apabila dibandingkan dengan target kinerja pada akhir periode RPJMD tahun 2021 sebesar 78,84%, realisasi pada tahun 2019 baru mencapai 74,53%.

Realisasi Angka Partisipasi Kasar SD/MI pada tahun 2019, dibandingkan dengan kondisi awal indikator kinerja di dalam RPJMD sebesar 122,36%, realisasi tahun 2017 dan 2018 sebesar 118,87%, mengalami penurunan sebesar 5,39% dan 1,90%. Apabila dibandingkan dengan target kinerja pada akhir periode RPJMD tahun 2021 sebesar 122,42%, realisasi pada tahun 2019 sudah mencapai 95,57%. Lebih lanjut bila dibandingkan dengan target kinerja akhir periode RPJMD Provinsi Kalimantan Barat tahun 2019 sebesar 122% dan pada kinerja akhir periode RPJMN tahun 2019 sebesar 114,1%, maka realisasi tahun 2019 mencapai 95,88% dan 102,52%.

Realisasi Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs pada tahun 2019, dibandingkan dengan kondisi awal indikator kinerja di dalam RPJMD sebesar 101,35%, realisasi tahun 2017 dan 2018 sebesar 104,45% mengalami penurunan 0,38% dan 3,48%. Apabila dibandingkan dengan target kinerja pada akhir periode RPJMD tahun 2021 sebesar 101,41%, realisasi pada tahun 2019 sudah mencapai 99,57%. Lebih lanjut bila dibandingkan dengan target kinerja akhir periode RPJMD Provinsi Kalimantan Barat tahun 2018 sebesar 95% dan pada kinerja akhir



periode RPJMN tahun 2019 sebesar 106,9%, maka realisasi tahun 2019 mencapai 106,28% dan 94,45%.

Realisasi Angka Partisipasi Murni SD/MI pada tahun 2019, dibandingkan dengan kondisi awal indikator kinerja di dalam RPJMD sebesar 96,29%, realisasi Tahun 2017 dan 2018 sebesar 99,96% mengalami kenaikan 3,70% dan 0,03%. Apabila dibandingkan dengan target kinerja pada akhir periode RPJMD tahun 2021 sebesar 100%, realisasi pada tahun 2019 sudah mencapai 99,99%. Lebih lanjut bila dibandingkan dengan target kinerja akhir periode RPJMD Provinsi Kalimantan Barat tahun 2018 sebesar 100% dan pada kinerja akhir periode RPJMN tahun 2019 sebesar 94,8%, maka realisasi tahun 2019 mencapai 99,99% dan 105,47%.

Realisasi Angka Partisipasi Murni SMP/MTs pada tahun 2019, dibandingkan dengan kondisi awal indikator kinerja di dalam RPJMD sebesar 74,40%, realisasi tahun 2017 dan 2018 sebesar 88,96%, mengalami penurunan 4,23% dan 18,79%. Apabila dibandingkan dengan target kinerja pada akhir periode RPJMD tahun 2021 sebesar 83,58%, realisasi pada tahun 2019 sudah mencapai 83,96% atau sudah melebihi target. Lebih lanjut bila dibandingkan dengan target kinerja akhir periode RPJMD Provinsi Kalimantan Barat tahun 2018 sebesar 77% dan pada kinerja akhir periode RPJMN tahun 2019 sebesar 82%, maka realisasi tahun 2019 mencapai 91,13% dan 85,57% atau sudah melewati target provinsi dan target nasional.

Realisasi Angka Rata-rata Lama Sekolah (ARLS) pada tahun 2019, dibandingkan dengan kondisi awal indikator kinerja di dalam RPJMD selama 6,63 tahun, realisasi tahun 2017 dan 2018 selama 7,03 tahun mengalami kenaikan 0,10 tahun dan penurunan 0,30 tahun. Apabila dibandingkan dengan target kinerja pada akhir periode RPJMD tahun



2021 selama 8 tahun, realisasi pada tahun 2019 sudah mencapai 84,1%. Lebih lanjut bila dibandingkan dengan target kinerja akhir periode RPJMD Provinsi Kalimantan Barat tahun 2018 selama 7,5 tahun dan pada kinerja akhir periode RPJMN tahun 2019 selama 8,8 tahun, maka realisasi tahun 2019 baru mencapai 89,7% dan 76,5%.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/-Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

a) Hambatan dan kendala dalam pencapaian kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut:

1. Pemerataan pendidikan yang diukur beberapa indikator, diantaranya APK dan APM, di Kabupaten Sintang masih rendah yang diakibatkan sulitnya transportasi dan ekonomi masyarakat.
2. Angka melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi masih rendah akibat sulitnya ekonomi masyarakat serta biaya pembangunan.
3. Banyak daerah tempat tinggal penduduk yang terletak jauh dari fasilitas pendidikan. Hal ini disebabkan belum meratanya pembangunan fasilitas sekolah.
4. Belum meratanya tenaga pengajar di setiap sekolah baik pada jenjang SD atau SMP, antara perkotaan dengan pedesaan.
5. Belum meratanya masyarakat yang mendapatkan sasaran program karena faktor kondisi geografis yang berada di daerah pedalaman/pedesaan sehingga sulit dijangkau, pendataan penduduk buta huruf masih belum dapat dilakukan sesuai target.

b) Upaya Pemecahan dalam mengantisipasi hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah Kabupaten Sintang berusaha untuk memperpendek rentang kendali pengelolaan pendidikan mengingat kondisi geografis yang begitu sulit seperti Kecamatan Ambalau, Serawai, Ketungau Hulu dengan memperbaiki infrastruktur jalan.



2. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mendukung kegiatan pemerintah dalam mencerdaskan semua lapisan masyarakat.
3. Selain itu perlu peningkatan kegiatan pengembangan Pendidikan Keaksaraan Fungsional, pemberdayaan masyarakat melalui kursus di SKB.
4. Menumbuhkan kesadaran motivasi belajar, juga dijalinnya kerjasama dengan perguruan tinggi untuk ikut membantu meningkatkan angka melek huruf.
5. Meningkatkan APK, APM dan angka rata-rata lama sekolah melalui pemberian bantuan, beasiswa atau program anak asuh serta penyuluhan yang berkelanjutan, untuk menangani rendahnya angka melanjutkan sekolah maka perlu meningkatkan penyuluhan dan sosialisasi program kepada masyarakat mengenai adanya bantuan pemerintah pusat tentang biaya belajar.

Sasaran 2: Meningkatnya Nilai Budaya Lokal

Pelaksanaan sasaran ini untuk mencapai misi “Melaksanakan Pembangunan Pendidikan Berkualitas Yang Berakar Pada Budaya Lokal”.

Kinerja sasaran “Meningkatnya nilai budaya lokal” dapat dilihat dari capaian indikator kinerja sebagai berikut:

1. Perbandingan Antara Target Dan Realisasi Kinerja Tahun 2019

Tabel III.5

Indikator Pencapaian Sasaran 2



	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Jumlah grup kesenian	Grup	37	51	137,84
2	Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya	Even	2	2	100
3	Tingkat pengenalan budaya lokal pada jalur pendidikan formal & informal	kegiatan	75	50	66,67
Capaian Kinerja Sasaran Sangat Berhasil					82,50

1) Jumlah Grup Kesenian

Capaian indikator jumlah grup kesenian sebesar 137,84%, sehingga dapat dikategorikan **Sangat Berhasil**. Pada tahun 2019 indikator jumlah grup kesenian ditargetkan sebesar 37 grup dan terealisasi 51 grup.

Adapun jumlah 51 sanggar/grup seni sampai tahun 2019 tersebar di beberapa kecamatan berikut ini :

No	Nama Sanggar	Lokasi
1	Sanggar Jujung Buih	Kecamatan Sintang
2.	Sanggar Seni Bayangkara	Kecamatan Sintang
3.	Sanggar Sultan nata	Kecamatan Sintang
4.	Sanggar Teater Lantang	Kecamatan Sintang
5.	Sanggar Dayang Kumang	Kecamatan Sintang
6.	Sanggar Delima	Kecamatan Sintang
7.	Sanggar Bujang Sibeji	Kecamatan Sintang
8.	Sanggar Gentra Pasundan	Kecamatan Sintang
9.	Sanggar Pagar Lestari Budaya	Kecamatan Sintang
10.	Sanggar Seni Tubagus	Kecamatan Sintang
11.	Sanggar Dahlia	Kecamatan Sintang
12.	Sanggar Swadesi	Kecamatan Sintang
13.	Sanggar Meh Wa	Kecamatan Sintang
14.	Sanggar Saka Widya Budaya Bakti	Kecamatan Sintang
15.	Sanggar Seni Tradisional Nusantara	Kecamatan Sintang
16.	Sanggar Singo Mulong Joyo	Kecamatan Sungai Tebelian
17.	Sanggar Kencana Budaya	Kecamatan Sungai Tebelian
18.	Sanggar Panca Walit	Kecamatan Sungai Tebelian
19.	Sanggar Singo Joyo Manggolo	Kecamatan Sungai Tebelian



No	Nama Sanggar	Lokasi
20.	Sanggar Sekar Melati	Kecamatan Sungai Tebelian
21.	Sanggar Keladan Nimbang	Kecamatan Sungai Tebelian
22.	Sanggar Bual Nasi	Kecamatan Sungai Tebelian
23.	Sanggar Aster	Kecamatan Sungai Tebelian
24.	Sanggar Kuda Lumping Taronggo	Kecamatan Sungai Tebelian
25.	Sanggar Hadro Qasidah Qurata	Kecamatan Sungai Tebelian
26.	Sanggar Condro Mulyo	Kecamatan Sungai Tebelian
27.	Sanggar Kencana Budaya	Kecamatan Sungai Tebelian
28.	Sanggar Teronggo Mudo	Kecamatan Sungai Tebelian
29.	Sanggar Tirta Kencana	Kecamatan Sungai Tebelian
30.	Sanggar Suro Muko	Kecamatan Sungai Tebelian
31.	Sanggar Dwi Sinta	Kecamatan Dedai
32.	Sanggar Demong Iloi	Kecamatan Dedai
33.	Sanggar Lepung Iring	Kecamatan Dedai
34.	Sanggar Sri Rahayu	Kecamatan Sepauk
35.	Sanggar Sari Warni Tunas baru	Kecamatan Sepauk
36.	Sanggar Kuda Lumping Timbul	Kecamatan Sepauk
37.	Sanggar Tarunggo Saputro Joyo	Kecamatan Sepauk
38.	Sanggar Prima Nada Grup	Kecamatan Sepauk
39.	Sanggar Kelindang Grup band	Kecamatan Sepauk
40.	Sanggar Kerinda Budaya	Kecamatan Tempunak
41.	Sanggar Suluk Wali	Kecamatan Tempunak
42.	Sanggar Sri Tarunggo Cipto	Kecamatan Tempunak
42.	Sanggar Seberuang	Kecamatan Tempunak
44.	Sanggar Menua Menyadik	Kecamatan Tempunak
45.	Sanggar Tri Utomo Bhati	Kecamatan Tempunak
46.	Sanggar Turonggo Seto	Kecamatan Tempunak
47.	Sanggar Ngesti Budoyo	Kecamatan Binjai Hulu
48.	Sanggar Krido Budhoyo	Kecamatan Binjai Hulu
49.	Sanggar Bintang Belulong	Kecamatan Kayan Hilir
50.	Sanggar Tupang Kumbai	Kacamatan Kayan Hilir
51.	Sanggar Sakang Bungai	Ketungau Tengah



2) Jumlah Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya

Capaian indikator Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya sebesar 100%, sehingga dapat dikategorikan **Sangat Berhasil**. Pada tahun 2019 indikator Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya ditargetkan sebesar 2 event dan sudah terealisasi 2 event.

3) Jumlah Tingkat Pengenalan Budaya Lokal Pada Jalur Pendidikan Formal dan Informal

Capaian indikator Tingkat Pengenalan Budaya Lokal Pada Jalur Pendidikan Formal dan Informal sebesar 66,67%, sehingga dapat dikategorikan **Cukup Berhasil**. Pada tahun 2019 indikator Jumlah Tingkat Pengenalan Budaya Lokal Pada Jalur Pendidikan Formal dan Informal ditargetkan sebesar 75 kegiatan dan sudah terealisasi 50 kegiatan.

2. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel II.6

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran Strategis	Program	Anggaran			Capaian Kinerja (%)	Tingkat Efisiensi
			Target (Rp.)	Realisasi Rp.)	%		
2	Meningkatnya nilai budaya lokal	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	943.932.000,00	941.737.727,00	99,77	101,50	
		Program Pengembangan Nilai Budaya	1.419.574.750,00	1.411.952.112,00	99,46		
		Program Pengelolaan Keragaman Budaya	10.000.000,00	9.395.000,00	93,95		
		Rata-Rata				97,73	101,50

Apabila dibandingkan antara persentase realisasi anggaran sebesar 99,73% dan realisasi capaian kinerja sasaran sebesar 101,50%, maka pada sasaran ini tingkat efisiensi penggunaan sumber dayanya sudah efisien dengan tingkat efisiensi 3,77%.



3. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Kecintaan masyarakat terhadap seni dan budaya, sehingga merasa penting untuk dilestarikan dengan berbagai kreativitas. Berbagai ide di bidang seni dan budaya yang muncul lebih efektif dituangkan melalui media sanggar. Dukungan pemerintah Kabupaten Sintang dalam memberikan suport berupa pembinaan dan penganggaran untuk para pelaku seni dan budaya sangat diperlukan. Guna mendukung kegiatan seni di tampung dalam beberapa program berikut ini:

- Program Pengembangan Nilai Budaya
- Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
- Program Penataan Kawasan Budaya dan Permukiman.

4. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2019 Dengan Kondisi Awal RPJMD (tahun 2015), Realisasi Tahun 2017 Dan 2018 Serta Target Akhir RPJMD (tahun 2021)

Tabel III.7

Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 2 dengan kondisi awal, realisasi tahun 2017 dan 2018 serta target akhir RPJMD

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	KONDISI AWAL TAHUN 2015	REALISASI TAHUN 2017	REALISASI TAHUN 2018	REALISASI TAHUN 2019	TARGET TAHUN 2021	
1	2	3	4	5	6	6	6	7	
2	Meningkatnya nilai budaya lokal.	1	Jumlah grup kesenian	Grup	32	35	35	51	40
		2	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	even	2	2	2	2	2
		3	Tingkat Pengenalan Budaya Lokal pada Jalur Pendidikan Formal dan Informal.	kegiatan	15	15	15	50	15

Realisasi Jumlah Grup Kesenian pada tahun 2019, dibandingkan dengan kondisi awal indikator kinerja di dalam RPJMD sebanyak 32



grup, realisasi tahun 2017 dan 2018 sebanyak 35 grup, mengalami kenaikan 17 grup dan 15 grup. Apabila dibandingkan dengan target kinerja pada akhir periode RPJMD tahun 2021 sebanyak 40 grup, realisasi pada tahun 2019 sudah mencapai 127,5% atau sudah melewati target.

Realisasi jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya pada tahun 2019, dibandingkan dengan kondisi awal indikator kinerja di dalam RPJMD sebanyak 2 event tidak mengalami perubahan dan tetap sama dengan realisasi tahun 2017 dan 2018. Apabila dibandingkan dengan target kinerja pada akhir periode RPJMD tahun 2021 juga sebanyak 2 event, realisasi pada tahun 2019 sudah mencapai 100%.

Realisasi tingkat pengenalan budaya lokal pada tahun 2019, dibandingkan dengan kondisi awal indikator kinerja di dalam RPJMD, realisasi tahun 2017 dan 2018 sebanyak 15 kegiatan, mengalami kenaikan yang luar biasa sebesar 35 kegiatan. Sedangkan apabila dibandingkan dengan target kinerja pada akhir periode RPJMD tahun 2021 juga sebanyak 15 kegiatan, realisasi pada tahun 2019 sudah mencapai 333,3%.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

a) Kegagalan atau penurunan pencapaian kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut:

- 1) Masih rendahnya peran aktif lembaga sekolah dalam melestarikan dan menggali budaya daerah.
- 2) Pengukuran terhadap indikator kinerja program sebagian besar belum dilaksanakan
- 3) Masih belum optimalnya pembinaan dan koordinasi seni budaya di masyarakat, sehingga cenderung berjalan sendiri-sendiri.



4) Kegiatan seni dan budaya tradisional mengalami pengurangan frekuensi event karena terdesak oleh perkembangan kegiatan modern yang cenderung lebih tren.

b) Upaya Pemecahan dalam mengantisipasi hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut:

Perlu digali dan dilestarikan budaya tradisional yang ada di daerah untuk menjadi satu keunggulan dan kebanggaan lokal sebagai aset budaya bangsa yang dapat mendorong industri pariwisata (budaya pariwisata) serta menyelenggarakan kegiatan lomba budaya tradisional se Kabupaten Sintang dengan mengikutsertakan para pelaku seni dan budaya. Melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah tentang budaya-budaya daerah yang ada di Kabupaten Sintang serta meningkatkan jumlah festival-festival seni.

**Sasaran 3:
Meningkatnya Akses Dan Mutu Pelayanan
Kesehatan Terutama Untuk Kesehatan Ibu Dan
Anak Serta Penduduk Miskin**

Pelaksanaan sasaran ini untuk mencapai misi Melaksanakan pembangunan kesehatan yang menyeluruh, adil dan terjangkau bagi masyarakat.

Kinerja sasaran “Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan terutama untuk kesehatan ibu dan anak serta penduduk miskin”, dapat dilihat dari capaian indikator kinerja sebagai berikut:

1. Perbandingan Antara Target Dan Realisasi Kinerja Tahun 2019

Tabel III.8

Indikator Pencapaian Sasaran 3



	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Angka Usia Harapan Hidup	Tahun	71,85	71,29	99,22
2.	Angka Kelangsungan hidup bayi (AKHB) per 1000 Kelahiran Hidup	per 1000 kh	976	990	101,43
3.	Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan Yang Memiliki Kompetensi Kebidanan	%	93,5	81,97	87,67
4.	Persentase Balita Gizi Buruk	%	2,30	0,26	188,70
5.	Persentase Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan	%	100	100,00	100,00
6.	Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	%	93,04	85,01	91,02
7.	Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA (+)	%	80,02	45,37	56,70
8.	Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin	%	25,55	62,63	245,13
9.	Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu per 100.000 penduduk	Per 100 ribu pddk	21,69	92,52	426,56
10.	Rasio Rumah Sakit per 100.000 penduduk	Per 100 ribu pddk	1,09	0,97	88,99
Capaian Kinerja Sasaran Sangat Berhasil					89,50

1) Angka Usia Harapan Hidup

Capaian indikator Angka Usia Harapan Hidup sebesar 99,22%, sehingga dapat dikategorikan **Sangat Berhasil**. Pada tahun 2019 indikator Angka Usia Harapan Hidup ditargetkan sebesar 71,85 tahun dan sudah terealisasi 71,29 Tahun.

2) Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB) Per 1000 Kelahiran Hidup

Capaian indikator Angka Kelangsungan hidup bayi (AKHB) per 1000 Kelahiran Hidup sebesar 101,43%, sehingga dapat dikategorikan **Sangat Berhasil**. Pada tahun 2019 indikator Angka Kelangsungan hidup bayi (AKHB) per 1000 Kelahiran Hidup ditargetkan sebesar 976 per 1000 kh dan sudah terealisasi 990 per 1000 kh.

3) Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan Yang Memiliki Kompetensi Kebidanan

Capaian indikator Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan Yang Memiliki Kompetensi Kebidanan sebesar 87,67%,



sehingga dapat dikategorikan **Sangat Berhasil**. Pada tahun 2019 indikator Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan Yang Memiliki Kompetensi Kebidanan ditargetkan sebesar 93,50% dan sudah terealisasi 81,97%.

4) Persentase Balita Gizi Buruk

Capaian indikator Persentase Balita Gizi Buruk sebesar 188,70%, sehingga dapat dikategorikan **Sangat Berhasil**. Pada tahun 2019 indikator Persentase Balita Gizi Buruk ditargetkan sebesar 2,30% dan terealisasi 0,26%.

5) Persentase Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan

Capaian indikator Persentase Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan sebesar 100%, sehingga dapat dikategorikan **Sangat Berhasil**. Pada tahun 2019 indikator Persentase Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan ditargetkan sebesar 100% dan terealisasi 100%.

6) Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)

Capaian indikator Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) sebesar 91,37%, sehingga dapat dikategorikan **Sangat Berhasil**. Pada tahun 2019 indikator Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) ditargetkan sebesar 93,04% dan sudah terealisasi 85,01%.

7) Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA (+)

Capaian indikator Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA (+) sebesar 56,70%, sehingga dapat dikategorikan **Cukup Berhasil**. Pada tahun 2019 indikator Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA (+) ditargetkan sebesar 80,02% dan sudah terealisasi 45,37%.

8) Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin



Capaian indikator Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin sebesar 245,13%, sehingga dapat dikategorikan **Sangat Berhasil**. Pada tahun 2019 indikator Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin ditargetkan sebesar 25,55% dan sudah terealisasi 62,63%.

9) Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu per 100.000 Penduduk

Capaian indikator Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu per 100.000 penduduk sebesar 426,56%, sehingga dapat dikategorikan **Sangat Berhasil**. Pada tahun 2019 indikator Rasio Rumah Sakit per 100.000 penduduk ditargetkan sebesar 21,69 per 100.000 penduduk dan sudah terealisasi 92,52 per 100.000 penduduk.

10) Rasio Rumah Sakit per 100.000 Penduduk

Capaian indikator Rasio Rumah Sakit per 100.000 penduduk sebesar 88,99%, sehingga dapat dikategorikan **Sangat Berhasil**. Pada tahun 2019 indikator Rasio Rumah Sakit per 100.000 penduduk ditargetkan sebesar 1,09 per 100.000 penduduk dan sudah terealisasi 0,97 per 100.000 penduduk.

2. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel III.9
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran Strategis	Program	Anggaran			Capaian Kinerja (%)	Tingkat Efisiensi
			Target (Rp.)	Realisasi Rp.)	%		
3	Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan terutama untuk kesehatan ibu dan anak serta penduduk miskin	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	10.657.791.250	10.298.793.697	96,63	148,58	
		Program Upaya Kesehatan Masyarakat	27.281.939.575,00	25.977.438.860,00	95,22		
		Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat	573.370.650,00	545.902.383,00	95,21		
		Program Pengembangan lingkungan sehat	763.521.967,00	699.306.556,00	91,59		
		Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	1.669.134.800,00	1.278.806.822,00	76,61		
		Program standarisasi pelayanan kesehatan	388.315.300,00	1.276.806.822,00	328,81		



No	Sasaran Strategis	Program	Anggaran			Capaian Kinerja (%)	Tingkat Efisiensi
			Target (Rp.)	Realisasi Rp.)	%		
		Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	1.577.945.440,00	1.191.793.043,00	75,53		
		Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya	17.235.413.000,00	16.573.067.906,00	96,16		
		Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	3.785.258.000,00	2.303.968.916,00	60,87		
		Program Badan Layanan Umum Daerah	3.647.540.000,00	3.028.111.722,00	83,02		
		Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular	556.045.200,00	508.416.500,00	91,43		
		Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	4.593.085.000,00	4.390.108.598,00	95,58		
		Program Perbaikan Gizi Masyarakat	6.509.929.956,00	4.313.499.858,00	66,26		
		Rata-rata			104,07	148,58	44,51

Apabila dibandingkan antara persentase realisasi anggaran sebesar 104,07% dan realisasi capaian kinerja sasaran sebesar 148,58%, maka pada sasaran ini tingkat efisiensi penggunaan sumber dayanya efisien dengan tingkat efisiensi 44,51%.

3. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Sasaran ini dilaksanakan dengan usaha melakukan pemerataan dan peningkatan jumlah jaringan, sarana dan prasarana, dan kualitas fasilitas kesehatan dasar dan peningkatan dan pengembangan kemampuan RSUD sebagai pusat rujukan kawasan timur Kalimantan Barat. Selain itu, dilakukan peningkatan sosialisasi kesehatan lingkungan dan pola hidup bersih dan sehat serta pendidikan kesehatan sejak usia dini.



4. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2019 Dengan Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2015), Realisasi Tahun 2017 Dan 2018 Serta Target Akhir RPJMD (tahun 2021)

Tabel III.10

Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 3 dengan kondisi awal, realisasi tahun 2017 dan 2018 serta target akhir RPJMD

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Sat	Kondisi Awal (Tahun 2015)	Realisasi Tahun 2017	Realisasi Tahun 2018	Realisasi Tahun 2019	Target Tahun 2021	Target RPJMD Provinsi Tahun 2018	Target RPJMN Tahun 2019	
1	2	3	4	5	6			7	8	9	
3	Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan terutama untuk kesehatan ibu dan anak serta penduduk miskin.	1	Angka usia harapan hidup	Tahun	70,95	70	71,11	71,29	72,45	69,3	-
		2	Angka kelangsungan hidup bayi	Per 100 kh	970	950	994	990	980	-	-
		3	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	%	90,49	90,03	86,06	81,97	95	-	-
		4	Persentase balita gizi buruk	%	2,96	2,80	0,15	0,26	2	-	17
		5	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	%	100	100	100	100	100	-	-
		6	Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	%	79,12	79,12	84,77	85,01	100	-	-
		7	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	%	60,07	36,00	35,48	45,37	90	-	-
		8	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	%	16,64	16,64	62,63	62,63	30	-	-
		9	Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk	Per 100 ribu pddk	19,68	19,68	32,32	92,52	22,7	1:19.566	-
		10	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk	Per 100 ribu pddk	0,76	0,76	0,92	0,97	1,26	1:122.775	-

Realisasi Angka Usia Harapan Hidup pada tahun 2019, dibandingkan dengan kondisi awal indikator kinerja di dalam RPJMD sebesar 70,95 tahun mengalami kenaikan 0,34 tahun, dibandingkan dengan realisasi



pada tahun 2017 dan 2018 mengalami kenaikan 1,29 tahun dan 0,18 tahun. Selanjutnya, dibandingkan dengan target kinerja pada akhir periode RPJMD tahun 2021 sebesar 72,45%, realisasi pada tahun 2019 sudah mencapai 98,40%. Lebih lanjut bila dibandingkan dengan target kinerja akhir periode RPJMD Provinsi Kalimantan Barat tahun 2018 sebesar 69,3 tahun, maka realisasi tahun 2019 mencapai 102,87%.

Realisasi Angka Kelangsungan hidup bayi (AKHB) per 1000 Kelahiran Hidup pada tahun 2019, dibandingkan dengan kondisi awal indikator kinerja di dalam RPJMD sebesar 970 per 1000 kh, mengalami kenaikan 20 per 1000 kh, dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2017 sebesar 950 per 1000 kh dan tahun 2018 sebesar 994 per 100 kh mengalami kenaikan 40 per 100 kh dan penurunan 4 per 100 kh. Selanjutnya, dibandingkan dengan target kinerja pada akhir periode RPJMD tahun 2021 sebesar 980 per 1000 kh, realisasi pada tahun 2019 sudah mencapai 101,02%.

Realisasi Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan Yang Memiliki Kompetensi Kebidanan pada tahun 2019, dibandingkan dengan kondisi awal indikator kinerja di dalam RPJMD sebesar 90,49%, mengalami penurunan 8,52%, apabila dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2017 sebesar 90,03% dan 2018 sebesar 86,06% mengalami penurunan 8,06% dan 4,09%. Selanjutnya, dibandingkan dengan target kinerja pada akhir periode RPJMD tahun 2021 sebesar 95%, realisasi pada tahun 2019 sudah mencapai 86,28%.

Realisasi Persentase Balita Gizi Buruk pada tahun 2019, dibandingkan dengan kondisi awal indikator kinerja di dalam RPJMD sebesar 2,96%, mengalami perbaikan 2,7%, dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2017 sebesar 2,80% dan 2018 sebesar 0,15% mengalami perbaikan sebesar 2,54% dan penurunan sebesar 0,11%. Selanjutnya dibandingkan dengan target kinerja pada akhir periode



RPJMD tahun 2021 sebesar 2%, realisasi tahun 2019 sudah mencapai 13%. Bila dibandingkan dengan target kinerja akhir periode RPJMN tahun 2019 sebesar 17%, maka realisasi tahun 2019 mencapai 1,53%.

Realisasi Persentase Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan pada tahun 2019, dibandingkan dengan kondisi awal indikator kinerja di dalam RPJMD dan realisasi pada tahun 2017 dan 2018 sebesar 100%, tidak mengalami perubahan. Selanjutnya, dibandingkan dengan target kinerja pada akhir periode RPJMD tahun 2021 juga sebesar 100%, realisasi pada tahun 2019 mencapai 100%.

Realisasi Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) pada tahun 2019, dibandingkan dengan kondisi awal indikator kinerja di dalam RPJMD 79,12% mengalami kenaikan sebesar 5,89% dan dibandingkan tahun 2017 sebesar 79,12 dan tahun 2018 sebesar 84,77 mengalami kenaikan sebesar 5,89% dan 0,24%. Dibandingkan dengan target kinerja pada akhir periode RPJMD tahun 2021 sebesar 100%, realisasi pada tahun 2019 baru mencapai 85,01%.

Realisasi Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA (+) pada tahun 2019, dibandingkan dengan kondisi awal indikator kinerja di dalam RPJMD sebesar 60,07%, mengalami penurunan 14,7%, apabila dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2017 sebesar 36% mengalami kenaikan 9,37% dan tahun 2018 sebesar 35,48% mengalami kenaikan sebesar 9,89%. Selanjutnya dibandingkan dengan target kinerja pada akhir periode RPJMD tahun 2021 sebesar 90%, realisasi pada tahun 2019 baru mencapai 50,41%.

Realisasi Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin pada tahun 2019, dibandingkan dengan kondisi awal indikator kinerja pada RPJMD dan realisasi pada tahun 2017



sebesar 16,64%, mengalami kenaikan 45,99%. Dibandingkan realisasi tahun 2018 sebesar 16,64% tidak mengalami perubahan. Apabila dibandingkan dengan target kinerja pada akhir periode RPJMD tahun 2021 sebesar 30%, realisasi pada tahun 2019 sudah mencapai 208,77%.

Realisasi Puskesmas, Poliklinik, Pustu per 100.000 penduduk pada tahun 2019, dibandingkan dengan kondisi awal indikator kinerja di dalam RPJMD dan realisasi pada tahun 2017 sebesar 19,68 per 100.000 penduduk mengalami peningkatan sebesar 72,84 per 100.000 penduduk, dibandingkan tahun 2018 sebesar 32,32 per 100.000 penduduk, mengalami peningkatan 60,2 per 100.000 penduduk. Sedangkan apabila dibandingkan dengan target kinerja pada akhir periode RPJMD tahun 2021 sebesar 22,7 per 100.000 penduduk, realisasi pada tahun 2019 sudah mencapai 407,58%.

Realisasi Rasio Rumah Sakit per 100.000 penduduk pada tahun 2019, dibandingkan dengan kondisi awal indikator kinerja di dalam RPJMD dan realisasi pada tahun 2017 sebesar 0,76 mengalami peningkatan sebesar 0,21%, dibandingkan tahun 2018 sebesar 0,92 per 100.000 penduduk, mengalami peningkatan 0,05 per 100.000 penduduk. Sedangkan apabila dibandingkan dengan target kinerja pada akhir periode RPJMD tahun 2021 sebesar 1,26 per 100.000 penduduk, realisasi pada tahun 2019 baru mencapai 76,98%.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

- a) Hambatan dan kendala dalam pencapaian kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut:



- 1) Terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan khususnya tenaga kesehatan jabatan fungsional penyuluh kesehatan masyarakat .
- 2) Penyebaran tenaga kesehatan yang tidak merata. Tenaga kesehatan dari tahun ke tahun diupayakan penambahannya untuk mengisi formasi pegawai pada unit-unit pelayanan kesehatan sampai di tingkat desa.
- 3) Rendahnya Perilaku Hidup Sehat masyarakat sangat dipengaruhi oleh pendidikan masyarakat. Tingkat pendidikan yang masih rendah merupakan salah satu penyebab rendahnya pemahaman masyarakat terhadap informasi kesehatan serta pembentukan perilaku sehat.
- 4) Masih terbatasnya kualitas dan kuantitas sarana dan parasarana kesehatan yang sesuai dengan perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK).
- 5) Pembinaan posyandu bersama lintas sektoral belum terlaksana secara optimal.
- 6) Sistem kewaspadaan dini penyakit berpotensi wabah belum dapat dilaksanakan di seluruh desa karena belum semua desa ada fasilitas kesehatan dan petugasnya.

b) Upaya Pemecahan dalam mengantisipasi hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut:

- 1) Penambahan sumber daya kesehatan khususnya tenaga bidan dan tenaga kesehatan jabatan fungsional penyuluh kesehatan masyarakat pada tahun mendatang.
- 2) Pemerataan, kecukupan dan kualitas tenaga kesehatan serta tenaga penunjang lainnya lebih merata di seluruh desa/kelurahan di Kabupaten Sintang.
- 3) Sosialisasi kepada masyarakat luas mengenai pentingnya perilaku hidup sehat dengan mengaktifkan gerakan ibu PKK untuk



mensosialisasikan dengan didampingi tenaga penyuluh kesehatan serta memasang baliho dan spanduk mengenai pentingnya perilaku hidup sehat.

- 4) Sarana dan Prasarana Kesehatan sebagai penunjang di dalam pelayanan kesehatan kepada masyarakat masih perlu ditingkatkan kualitas dan kuantitasnya sehubungan dengan kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) di dalam upaya pendekatan pelayanan kesehatan dasar kepada masyarakat.
- 5) Pelatihan penyegaran bagi kader posyandu di tingkat puskesmas maupun kabupaten.
- 6) Memperkuat koodinasi lintas sektor untuk pembinaan posyandu, dan menekan angka gizi buruk karena kemiskinan.

Sasaran 4: Terkendalnya Laju Pertumbuhan Penduduk

Pelaksanaan sasaran ini untuk mencapai misi Melaksanakan pembangunan kesehatan yang menyeluruh, adil dan terjangkau bagi masyarakat.

Kinerja sasaran “Terkendalnya laju pertumbuhan penduduk”, dapat dilihat dari capaian indikator kinerja sebagai berikut:

1. Perbandingan Antara Target Dan Realisasi Kinerja Tahun 2019

Tabel III.11

Indikator Pencapaian Sasaran 4

	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Rasio Akseptor KB	%	75,16	78,45	104,38
2	Cakupan Peserta KB Aktif	Akseptor	55.392	61.227	110,53
3	Jumlah Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I	KK	19.299	19.299	100
Capaian Kinerja Sasaran Sangat Berhasil					92,50



1) Rasio Akseptor KB

Capaian indikator Rasio Akseptor KB sebesar 104,38%, sehingga dapat dikategorikan **Sangat Berhasil**. Pada tahun 2019 indikator Rasio Akseptor KB ditargetkan sebesar 75,16% dan sudah terealisasi 78,45%.

2) Cakupan Peserta KB Aktif

Capaian indikator Cakupan Peserta KB Aktif sebesar 110,53%, sehingga dapat dikategorikan **Sangat Berhasil**. Pada tahun 2019 indikator Peserta KB Aktif ditargetkan sebesar 55.392 akseptor dan sudah terealisasi 61.227 akseptor.

3) Jumlah Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I

Capaian indikator Jumlah Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I sebesar 100%, sehingga dapat dikategorikan **Sangat Berhasil**. Pada tahun 2019 indikator Jumlah Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I ditargetkan sebesar 19.299 KK dan sudah terealisasi 19.299 KK.

2. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel III.12

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran Strategis	Program	Anggaran			Capaian Kinerja (%)	Tingkat Efisiensi
			Target (Rp.)	Realisasi Rp.)	%		
4	Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk	Program Keluarga Berencana	5.402.251.180,00	5.151.216.818,00	95,35		
		Program pelayanan kontrasepsi	179.908.000,00	161.358.100,00	89,69		
		Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan	35.000.000,00	24.400.000,00	69,71		
		Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	652.794.500,00	643.675.478,00	98,60		
		Program Kesehatan Reproduksi Remaja	222.272.000,00	220.860.970,00	99,37		



No	Sasaran Strategis	Program	Anggaran			Capaian Kinerja (%)	Tingkat Efisiensi
			Target (Rp.)	Realisasi Rp.)	%		
		Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri	2.105.350.590,00	2.076.206.950,00	98,62		
		Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga	750.000.000,00	724.376.911,00	96,58		
		Rata-rata			92,56	104,97	12,41

Apabila dibandingkan antara persentase realisasi anggaran sebesar 92,56% dan realisasi capaian kinerja sasaran sebesar 104,97%, maka pada sasaran ini tingkat efisiensi penggunaan sumber dayanya sudah efisien dengan capaian kinerjanya melebihi dari 100% dan tingkat efisiensi 12,41%.

3. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Sasaran ini diarahkan pada peningkatan akses dan kualitas Perempuan dalam Pembangunan dan Anak menuju Keluarga Sejahtera serta penataan kebutuhan administrasi kependudukan guna meningkatkan kualitas data/informasi penduduk dalam mendukung perencanaan dan pelaksanaan pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat.

4. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2019 Dengan Kondisi Awal RPJMD (tahun 2015), Tahun 2017 dan 2018 Serta Target Akhir RPJMD (tahun 2021)

Tabel III.13
Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 4 dengan kondisi awal dan target akhir RPJMD



NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	Kondisi Awal (Tahun 2015)	Realisasi Tahun 2017	Realisasi Tahun 2018	Realisasi Tahun 2019	TARGET TAHUN 2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	8	
4	Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk.	1	Rasio akseptor KB	%	73,24	74,89	78,77	78,45	76,1
		2	Cakupan peserta KB aktif	akseptor	53.392	57.221	59.783	61.227	56.392
		3	Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I	KK	19.659	11.724	11.724	19.299	19.119

Realisasi Rasio Akseptor KB pada tahun 2019 dibandingkan dengan kondisi awal indikator kinerja di dalam RPJMD sebesar 73,24%, mengalami kenaikan 5,21%, dibandingkan dengan realisasi tahun 2017 sebesar 74,89%, mengalami kenaikan 3,56%, dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 sebesar 78,77% mengalami penurunan 0,32%. Sedangkan dibandingkan dengan target kinerja pada akhir periode RPJMD tahun 2021 sebesar 76,1%, realisasi pada tahun 2019 sudah mencapai 103,09%.

Realisasi Cakupan Peserta KB Aktif pada tahun 2019 dibandingkan dengan kondisi awal indikator kinerja di dalam RPJMD sebesar 53.392 akseptor, realisasi tahun 2017 dan tahun 2018 sebesar 57.221 dan 59.783, masing-masing mengalami kenaikan sebesar 7.835, 4.006, dan 1.444 akseptor. Apabila dibandingkan dengan target kinerja pada akhir periode RPJMD tahun 2021 sebesar 56.392 akseptor, realisasi pada tahun 2019 sudah mencapai 108,57%.

Realisasi Jumlah Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I pada tahun 2019 dibandingkan dengan kondisi awal indikator kinerja di dalam RPJMD sebesar 19.659 KK, realisasi tahun 2017 dan 2018 sebesar 11.724 KK dan 19.299 KK, masing-masing mengalami penurunan 360 KK, kenaikan 7.575 KK dan kenaikan 7.575 KK. Dengan



berkurangnya Jumlah Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I, berarti tingkat kesejahteraan masyarakat meningkat. Sedangkan apabila dibandingkan dengan target kinerja pada akhir periode RPJMD tahun 2021 sebesar 19.119 KK, realisasi pada tahun 2019 sudah mencapai 100,94%.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

a) Hambatan dan kendala dalam pencapaian kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut:

- 1). Partisipasi pria dalam ber-KB masih rendah karena pengetahuan para pria tentang masalah KB pria masih rendah.
- 2). Keterbatasan tenaga lapangan Penyuluh KB untuk melakukan operasional program yang disebabkan tidak adanya sarana mobilitas serta luasnya wilayah.
- 3). Berkurangnya jumlah tenaga PLKB/PKB sehingga melemahkan mekanisme operasional dan pembinaan institusi masyarakat dalam pengelolaan KB, serta dukungan bagi pelaksanaan pendataan keluarga.
- 4). Masih ada yang beranggapan bahwa penanganan pelayanan penyandang masalah kesejahteraan sosial sepenuhnya merupakan tugas dan tanggung jawab pemerintah semata, sehingga pemerintah harus menanggung semua keperluan penyandang masalah kesejahteraan sosial.
- 5). Sulitnya akses karena keterbatasan sarana prasarana dan SDM (mobil sesuai kebutuhan medan).

b) Upaya Pemecahan dalam mengantisipasi hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut:



- 1). Meningkatkan kinerja agar pencapaian program KB di Kabupaten Sintang dapat tercapai secara maksimal;
- 2). Meningkatkan sosialisasi terhadap pria agar ikut berperan/berpartisipasi dalam ber KB.
- 3). Mengefektifkan rapat-rapat koordinasi, konsultasi dan rapat evaluasi bulanan untuk mengevaluasi pencapaian program dan mengatasi permasalahan yang dihadapi secara menyeluruh oleh masing-masing bidang;
- 4). Mengupayakan penambahan jumlah PKB yang membina desa/kelurahan karena idealnya satu desa/kelurahan dibina oleh satu orang PKB, disamping itu juga untuk bisa memperhatikan dukungan operasional bagi pelaksanaan program KB.
- 5). Melakukan koordinasi sebanyak mungkin kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait dan masyarakat untuk memberikan informasi tentang pemahaman terhadap perlunya upaya penanganan pelayanan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang sifatnya memerlukan lintas sektor atau yang terkait.
- 6). Meningkatkan keterampilan bidan/faskes yang menyebar merata setiap faskes di Kabupaten Sintang, melalui pelatihan-pelatihan.

Sasaran 5:
**Tersedianya Infrastruktur Transportasi Yang Handal
Untuk Mendukung Pergerakan Orang Dan Barang**

Pelaksanaan sasaran ini untuk mencapai misi Mengoptimalkan penyediaan infrastruktur dasar guna pengembangan potensi ekonomi dan sumber daya daerah.



Kinerja sasaran “Tersedianya infrastruktur transportasi yang handal untuk mendukung pergerakan orang dan barang” dapat dilihat dari capaian indikator kinerja sebagai berikut:

a. Perbandingan Antara Target Dan Realisasi Kinerja Tahun 2019

Tabel III.14
Indikator Pencapaian Sasaran 5

Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1. Proporsi Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Baik dan Sedang	%	49,28	50,16	101,79
2. Persentase Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam)	%	20,96	9,36	44,66
Capaian Kinerja Sasaran Sangat Berhasil				60,00

1) Proporsi Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Baik dan Sedang

Capaian indikator Proporsi Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Baik dan Sedang sebesar 101,79%, sehingga dapat dikategorikan **Sangat Berhasil**. Pada tahun 2019 indikator Proporsi Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Baik dan Sedang ditargetkan sebesar 49,28% dan sudah terealisasi 50,16%.

2) Persentase Panjang Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik (> 40 KM/Jam)

Capaian indikator Persentase Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam) sebesar 44,66%, sehingga dapat dikategorikan **Tidak Berhasil**. Pada tahun 2019 indikator Persentase Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam) ditargetkan sebesar 20,96% dan sudah terealisasi 9,36%.

b. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel III.15
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya



No	Sasaran Strategis	Program	Anggaran			Capaian Kinerja (%)	Tingkat Efisiensi
			Target (Rp.)	Realisasi Rp.)	%		
5	Tersedianya infrastruktur transportasi yang handal untuk mendukung pergerakan orang dan barang	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	65.228.270.897,00	62.850.393.652,00	96,35		
		Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan	17.666.767.000,00	17.332.445.190,00	98,11		
		Program Pembangunan Turap/Talud/bronjong	1.201.750.000,00	999.157.900,00	83,14		
		Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	10.628.902.550,00	8.663.940.950,00	81,51		
		Program Pemeliharaan Saluran Drainase atau Gorong-gorong	199.100.000,00	199.060.000,00	99,98		
		Rata-rata					

Apabila dibandingkan antara persentase realisasi anggaran sebesar 91,82% dan realisasi capaian kinerja sasaran sebesar 60%, maka pada sasaran ini tingkat efisiensi penggunaan sumber dayanya belum efisien.

c. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Pembangunan jalan yang dilaksanakan memperhatikan keserasian dengan perkembangan transportasi jalan raya, terutama keserasian antara beban dan kepadatan lalu lintas kendaraan. Kemudian pembangunan jalan dalam upaya meningkatkan kemampuan daya dukung jalan di pusat pertumbuhan atau pusat produksi, pusat produksi dengan daerah pemasaran. Di samping itu juga dilakukan pembangunan jalan yang membuka daerah terpencil dan mendukung pengembangan pemukiman.

Kinerja jaringan jalan berdasarkan kondisi dengan terminologi baik, sedang, rusak dan rusak berat. Total panjang jalan Kabupaten Sintang adalah 1.708,02 km. Kondisi jalan di 14 kecamatan yang ada di Kabupaten Sintang masih terjadi perbedaan. Di tujuh kecamatan yaitu Kayan Hilir, Kayan Hulu, Serawai, Ambalau, Binjau Hulu, dan Ketungau



Hulu masih berupa jalan tanah dalam arti tidak ada ruas jalan dengan permukaan aspal atau kerikil.

Keterbatasan dana dan luasnya wilayah menjadi hambatan utama dalam pencapaian sasaran ini. Sementara untuk indikator Prosentase Panjang jalan kabupaten dalam kondisi rusak berat masih tinggi, keterbatasan dana dan luasnya wilayah menjadi kendala dalam pencapaian indikator ini, Pemerintah Kabupaten Sintang berupaya agar untuk mendapatkan dana DAK Infrastruktur Jalan dari Pemerintah Pusat.

d. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2019 Dengan Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2015), Realisasi Tahun 2017, Tahun 2018 Dan Target Akhir RPJMD (Tahun 2021)

Tabel III.16
Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 5 dengan kondisi awal, realisasi tahun 2017, 2018 dan target akhir RPJMD

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi Awal (Tahun 2015)	Realisasi Tahun 2017	Realisasi Tahun 2018	Realisasi Tahun 2019	Target Tahun 2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
5	Tersedianya infrastruktur transportasi yang handal untuk mendukung pergerakan orang dan barang.	1	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik dan sedang	%	25,92	39,18	50,49	50,16	60,18
		2	Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam)	%	17,32	15,24	52,92	9,36	22,78

Realisasi Proporsi Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Baik dan Sedang pada tahun 2019 dibandingkan dengan kondisi awal indikator kinerja di dalam RPJMD sebesar 25,92%, mengalami kenaikan 24,24%, dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2017 sebesar 39,18 mengalami kenaikan sebesar 10,98%, dibandingkan tahun 2018 sebesar 50,49 mengalami penurunan 0,33%. Selanjutnya dibandingkan dengan



target kinerja pada akhir periode RPJMD tahun 2021 sebesar 60,18%, realisasi pada tahun 2019 baru mencapai 83,35%.

Realisasi Persentase Panjang Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik (> 40 KM/Jam) pada tahun 2019 dibandingkan dengan kondisi awal indikator kinerja di dalam RPJMD sebesar 17,32% mengalami penurunan sebesar 7,96%, dibandingkan realisasi pada tahun 2017 sebesar 15,24% penurunan 5,88%, dibandingkan realisasi 2018 sebesar 52,92% mengalami penurunan sebesar 43,56%. Apabila dibandingkan dengan target kinerja pada akhir periode RPJMD tahun 2021 sebesar 22,78%, realisasi pada tahun 2019 sudah mencapai 41,09%.

e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

a) Hambatan dan kendala dalam pencapaian kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut:

- 1). Meningkatnya penggunaan kendaraan bermotor mengakibatkan cepatnya terjadi kerusakan jalan.
- 2). Minimnya anggaran dalam mendukung pembangunan infrastruktur di kabupaten Sintang
- 3). Masih lemahnya pengawasan terhadap kendaraan truk dengan tonase melebihi kapasitas.
- 4). Kurangnya jasa kontraktor yang professional.
- 5). Luasnya jangkauan Kabupaten Sintang dan Kondisi geografis yang sulit.
- 6). Tidak memiliki kendaraan kawal yang dapat melewati medan yang berat karena jalan rusak cukup parah ke daerah-daerah kecamatan.

b) Upaya Pemecahan dalam mengantisipasi hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut:



- 1). Membuat penyuluhan kepada pemilik perusahaan angkutan umum dalam kota dan mode transportasi massal lainnya untuk meningkatkan kenyamanan dan keamanan penumpang sehingga bisa merangsang masyarakat untuk kembali menggunakan mode angkutan umum.
- 2). Menambah anggaran guna mendukung pembangunan infrastruktur dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan pemerintah Kabupaten Sintang.
- 3). Meningkatkan pengawasan terhadap kendaraan truk yang bertonase melebihi kapasitas.
- 4). Terhadap kurangnya jasa kontraktor yang profesional, diupayakan kerjasama yang baik dengan perhimpunan profesi untuk pembinaan dan peningkatan kompetensi.
- 5). Terhadap kondisi geografis yang sulit, diupayakan tersedianya sarana pendukung untuk kelancaran tugas.

Sasaran 6: Tersedianya Sumber Daya Air Untuk Memenuhi Kebutuhan Pertanian (irigasi)

Pelaksanaan sasaran ini untuk mencapai misi Mengoptimalkan penyediaan infrastruktur dasar guna pengembangan potensi ekonomi dan sumber daya daerah.

Kinerja sasaran “Tersedianya sumber daya air untuk memenuhi kebutuhan irigasi” dapat dilihat dari capaian indikator kinerja sebagai berikut:

a. Perbandingan Antara Target Dan Realisasi Kinerja Tahun 2019

Tabel III.17

Indikator Pencapaian Sasaran 6



Indikator		Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Rasio Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik	%	50,21	48,82	97,23
2	Luas Irigasi Kabupaten dalam Kondisi Baik	Ha	5.353	5.546,21	103,61
Capaian Kinerja Sasaran Sangat Berhasil					92,50

1) Rasio Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik

Capaian indikator Rasio Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik sebesar 97,23%, sehingga dapat dikategorikan **Sangat Berhasil**. Pada tahun 2019 Rasio Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik ditargetkan sebesar 50,21%, dan sudah terealisasi 48,82%.

2) Luas Irigasi Kabupaten dalam Kondisi Baik

Capaian indikator Luas Irigasi Kabupaten dalam Kondisi Baik sebesar 103,61%, sehingga dapat dikategorikan **Sangat Berhasil**. Pada tahun 2019 indikator Luas Irigasi Kabupaten dalam Kondisi Baik ditargetkan sebesar 5.353 ha dan sudah terealisasi 5.546,21 ha.

b. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel III.18

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran Strategis	Program	Anggaran			Capaian Kinerja (%)	Tingkat Efisiensi
			Target (Rp.)	Realisasi Rp.)	%		
6	Tersedianya sumber daya air untuk memenuhi kebutuhan pertanian (irigasi)	Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	12.992.982.000	12.815.137.850	98,63	100,42	
Rata-rata					98,63	100,42	0,42

Apabila dibandingkan antara persentase realisasi anggaran sebesar 98,50% dan realisasi capaian kinerja sasaran sebesar 100,42%, maka pada sasaran ini tingkat efisiensi penggunaan sumber dayanya sudah efisien dengan tingkat efisiensi 0,42%.



c. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Pengertian jaringan irigasi adalah saluran, bangunan dan bangunan pelengkap yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan dan pembuangan air irigasi. Selanjutnya secara operasional dibedakan ke dalam tiga kategori yaitu jaringan irigasi primer, sekunder dan tersier.

Dari ketiga kelompok jaringan tersebut, yang langsung berfungsi sebagai prasarana pelayanan air irigasi ke dalam petakan sawah adalah jaringan irigasi tersier yang terdiri dari saluran tersier, saluran kuarter dan saluran pembuang, boks tersier, boks kuarter serta bangunan pelengkap.

Rasio Jaringan Irigasi adalah perbandingan panjang jaringan irigasi terhadap luas lahan budidaya. Hal ini mengindikasikan ketersediaan saluran irigasi untuk kebutuhan budidaya pertanian.

Dilihat dari persebarannya untuk setiap Kecamatan, jaringan irigasi terpanjang berada di kecamatan Sepauk yaitu 135,409 km dengan luas lahan budidaya 3,056 Ha atau rasionya 44,31. Di urutan kedua dengan panjang lebih dari 100,000 km adalah kecamatan Dedai dan Kelam Permai dengan rasio di atas 55%. Untuk selengkapnya persebaran jaringan irigasi untuk setiap kecamatan dapat di lihat pada tabel di bawah ini.

Tabel III.19

Rasio Jaringan Irigasi Kabupaten Sintang Menurut Kecamatan
Tahun 2019

No	Kecamatan	Panjang Jaringan Irigasi			Total Panjang Jaringan Irigasi	Luas Lahan Budidaya	Rasio
		Primer	Sekunder	Tersier			
1	S e r a w a i	-	2,500	-	2,500	70	35,71
2	A m b a l a u	-	-	-	-	-	-
3	Kayan Hulu	-	49,354	-	49,354	560	88,13
4	S e p a u k	1,700	133,709	-	135,409	3,056	44,31
5	Tempunak	-	59,545	-	59,545	1,070	55,65



No	Kecamatan	Panjang Jaringan Irigasi			Total Panjang Jaringan Irigasi	Luas Lahan Budidaya	Rasio
		Primer	Sekunder	Tersier			
6	Sungai Tebelian	265	5,016	-	5,281	90	58,68
7	S i n t a n g	2,100	-	-	-	-	-
8	D e d a i	-	104,787	-	106,887	1,938	55,15
9	Kayan Hilir	2,200	85,574	-	85,574	967	88,49
10	Kelam Permai	-	103,277	-	105,477	1,819	57,99
11	Binjai Hulu	-	8,520	-	8,520	125	68,16
12	Ketungau Hilir	-	12,905	-	12,905	375	34,41
13	Ketungau Tengah	-	10,373	-	10,373	249	41,66
14	Ketungau Hulu	-	10,742	-	10,742	275	39,06
JUMLAH		6,265	586,302	-	592,567	10,594	47,67

d. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2019 Dengan Kondisi Awal Rpjmd (Tahun 2015), Realisasi Tahun 2017 Dan Tahun 2018 Serta Target Akhir Rpjmd (Tahun 2021)

Tabel III.20
Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 6 dengan kondisi awal, realisasi tahun 2017 dan 2018 serta target akhir RPJMD

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2015	Realisasi Tahun 2017	Realisasi Tahun 2018	Realisasi Tahun 2019	Target Tahun 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	Tersedianya sumber daya air untuk memenuhi kebutuhan pertanian (irigasi).	1 Rasio Jaringan Irigasi dalam kondisi baik	%	48,67	51,93	58,70	58,70	50,89
		2 Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik	Ha	5.156	5.336	6.181	6.181	5.391

Realisasi Rasio Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik pada tahun 2019 dibandingkan dengan kondisi awal indikator kinerja di dalam RPJMD sebesar 48,67%, mengalami kenaikan 10,03%, sedangkan apabila dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2017 sebesar 51,93% mengalami kenaikan 6,77%, dibandingkan dengan tahun 2018 tidak mengalami perubahan. Apabila dibandingkan dengan target kinerja pada



akhir periode RPJMD tahun 2021 sebesar 50,89%, realisasi pada tahun 2019 sudah mencapai 99,62%.

Realisasi Luas Irigasi Kabupaten dalam Kondisi Baik pada tahun 2019, dibandingkan dengan kondisi awal indikator kinerja di dalam RPJMD sebesar 5.156 ha, mengalami kenaikan 1.025 ha, sedangkan apabila dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2017, mengalami kenaikan 845 ha. Selanjutnya apabila dibandingkan dengan target kinerja pada akhir periode RPJMD tahun 2021 sebesar 5.391 ha, realisasi pada tahun 2019 sudah mencapai 114,65%

e. **Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan**

a) **Hambatan dan kendala dalam pencapaian kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut:**

1. Tidak didukung dengan kegiatan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi secara rutin dan berkala, menyebabkan kondisi jaringan tidak terawat
2. Pembangunan jaringan irigasi kadang tidak didukung dengan fasilitas penunjang yang memadai.
3. Belum terbentuknya Peraturan Daerah tentang Komisi Irigasi

b) **Upaya Pemecahan dalam mengantisipasi hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut:**

1. Pembangunan jaringan irigasi harus berkesinambungan dengan sarana dan prasarana penunjang kehidupan petani yang lain diantaranya : pembangunan jaringan transportasi yang baik, fasilitas lingkungan, tidak terpencil dan kemudahan untuk memenuhi kebutuhan yang lain
2. Menyusun regulasi tentang irigasi sehingga jaringan irigasi dapat bermanfaat dan dikelola sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



Sasaran 7: Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Sarana Dan Prasarana Dasar Pemukiman (Mencakup Persampahan, Air Bersih, Air Limbah)

Pelaksanaan sasaran ini untuk mencapai misi “Mengoptimalkan penyediaan infrastruktur dasar guna pengembangan potensi ekonomi dan sumber daya daerah”.

Kinerja sasaran “Meningkatnya akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana dasar pemukiman (mencakup persampahan, air bersih, air limbah)” dapat dilihat dari capaian indikator kinerja sebagai berikut:

a. Perbandingan Antara Target Dan Realisasi Kinerja Tahun 2019

Tabel III.21

Indikator Pencapaian Sasaran 7

Indikator		Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Persentase Rumah Tangga Pengguna Air Bersih/Minum (PDAM)	%	5,8	4,60	79,31
2	Rasio Tempat Pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk	%	0,24	0,11	45,83
3	Persentase Penanganan Sampah	%	75	62,37	83,16
Capaian Kinerja Sasaran Cukup Berhasil					60,83

1) Persentase Rumah Tangga Pengguna Air Bersih/Minum (PDAM)

Capaian indikator Persentase Rumah Tangga Pengguna Air Bersih/Minum (PDAM) sebesar 79,31%, sehingga dapat dikategorikan **Berhasil**. Pada tahun 2019 Persentase Rumah Tangga Pengguna Air Bersih/Minum (PDAM) ditargetkan sebesar 5,8%, dan sudah terealisasi 4,60%.

Jumlah pelanggan PDAM Kabupaten Sintang berjumlah 6.768 pelanggan, yang tersebar di empat kecamatan yaitu Kecamatan Sepauk, Kecamatan Tempunak, Kecamatan Sintang, dan Kecamatan Ketungau Tengah.



2) Rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS) Per Satuan Penduduk

Capaian indikator Rasio Tempat Pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk sebesar 45,83% sehingga dapat dikategorikan **Tidak Berhasil**. Pada tahun 2019 Rasio Tempat Pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk ditargetkan sebesar 1:402 persatuan penduduk atau 0,24%, dan sudah terealisasi 0,11%.

3) Persentase Penanganan Sampah

Capaian indikator Persentase Penanganan Sampah sebesar 83,16%, sehingga dapat dikategorikan **Berhasil**. Pada tahun 2019 Persentase Penanganan Sampah ditargetkan sebesar 75%, dan sudah terealisasi 62,37%.

b. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel III.22
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran Strategis	Program	Anggaran			Capaian Kinerja (%)	Tingkat Efisiensi
			Target (Rp.)	Realisasi Rp.)	%		
7	Meningkatnya akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana dasar pemukiman (mencakup persampahan, air bersih, air limbah)	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	2.570.349.900	2.120.204.087	82,49	69,43	
		Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	806.026.918	803.457.522	99,68		
		Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan	47.704.740.862	45.623.504.941	95,64		
		Rata-rata			92,60		

Apabila dibandingkan antara persentase realisasi anggaran sebesar 95,04% dan realisasi capaian kinerja sasaran sebesar 45,46%, maka pada sasaran ini tingkat efisiensi penggunaan sumber dayanya belum efisien.



c. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2019 Dengan Kondisi Awal RPJMD Tahun 2015, Realisasi Tahun 2017 Dan Tahun 2018 Serta Target Akhir Rpjmd Tahun 2021

Tabel III.23
Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 7 dengan kondisi awal, realisasi tahun 2017 dan tahun 2018 serta target akhir RPJMD.

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA		SATUAN	Kondisi Awal Tahun 2015	Realisasi Tahun 2017	Realisasi Tahun 2018	Realisasi Tahun 2019	TARGET TAHUN 2021
1	2	3		4	5	6	7		8
7	Meningkatnya akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana dasar pemukiman (mencakup persampahan, air bersih, air limbah)	1	Rumah tangga pengguna air bersih (PDAM)	%	4,5	4,80	4,60	4,60	6,6
		2	Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk	%	1:429	1:420	1:2000	0,11	1:391
		3	Persentase penanganan sampah	%	60	68	27	62,37	85

Dibandingkan dengan kondisi awal indikator kinerja di dalam RPJMD sebesar 4,5%, realisasi **Persentase Rumah Tangga Pengguna Air Bersih/Minum (PDAM)** pada tahun 2019 mengalami kenaikan 0,10%, sedangkan dibandingkan dengan realisasi tahun 2017 dan tahun 2018, mengalami penurunan 0,20%. Sedangkan apabila dibandingkan dengan target kinerja pada akhir periode RPJMD tahun 2021 sebesar 6,6%, realisasi pada tahun 2019 baru mencapai 69,70%.

Dibandingkan dengan kondisi awal indikator kinerja di dalam RPJMD sebesar 1:429, realisasi **Rasio Tempat Pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk** pada tahun 2019 mengalami penurunan, sedangkan bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2017 dan tahun 2018 sebesar 1:420 mengalami penurunan. Sedangkan apabila dibandingkan dengan target kinerja pada akhir periode RPJMD tahun 2021 sebesar 1:391, realisasi pada tahun 2019 baru mencapai 20%.



Dibandingkan dengan kondisi awal indikator kinerja di dalam RPJMD dan realisasi tahun 2017 sebesar 60%, realisasi **Persentase Penanganan Sampah** pada tahun 2018 mengalami penurunan 33%, sedangkan dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 sebesar 68%, mengalami penurunan 41%. Sedangkan apabila dibandingkan dengan target kinerja pada akhir periode RPJMD tahun 2021 sebesar 85%, realisasi pada tahun 2019 baru mencapai 31,76%.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

a) Hambatan dan kendala dalam pencapaian kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut:

- 1). Kurangnya data primer tentang kondisi kualitas air, udara dan tanah.
- 2). Kurangnya petugas teknis dibandingkan dengan penyebaran lokasi kegiatan.
- 3). Kurangnya ketersediaan dana, sarana dan prasarana penunjang kegiatan.
- 4). Kesadaran masyarakat dalam berpartisipasi berkenaan dengan penanganan sampah masih kurang.

b) Upaya Pemecahan dalam mengantisipasi hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut:

- 1). Mengintensifkan pengujian kualitas air, udara dan tanah secara rutin.
- 2). Perlunya penambahan personil petugas teknis/tenaga teknis.
- 3). Perlu dianggarkan dana khusus dalam pengawasan dan monitoring.
- 4). Melakukan sosialisasi Perda dan Perbup tentang pengelolaan sampah.
- 5). Memprogramkan pengadaan sarana dan prasarana persampahan baik melalui DAU atau DAK.



Sasaran 8: Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup

Pelaksanaan sasaran ini untuk mencapai misi Mengoptimalkan penyediaan infrastruktur dasar guna pengembangan potensi ekonomi dan sumber daya daerah.

Kinerja sasaran “Meningkatnya kualitas lingkungan hidup” dapat dilihat dari capaian indikator kinerja sebagai berikut:

a. Perbandingan Antara Target Dan Realisasi Kinerja Tahun 2019

Tabel III.24

Indikator Pencapaian Sasaran 8

	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
8	1. Tingkat Pencemaran Udara	ISPU	25	27,71	110,84
	2. Pencemaran Status Mutu Air (14 Sungai)	Status Kondisi sedang	14	7	50,00
Capaian Kinerja Sasaran Sangat Berhasil					92,50

1) Tingkat Pencemaran Udara

Capaian indikator Tingkat Pencemaran Udara di Kabupaten Sintang 110,84 dapat dikategorikan **Sangat Berhasil**. Pada tahun 2019 Cakupan tingkat pencemaran udara sebesar 27,71 dari target sebesar 25.

Angka tersebut berdasarkan data kualitas udara ambien dari BMKG Pontianak. Berdasarkan data tersebut maka Tingkat pencemaran udara Kabupaten Sintang tahun 2019 akibat transportasi 0,31, industri 15,20, perumahan 5,70 dan perkantoran 6,50. Apabila dijumlahkan unsur tersebut menjadi 27,71. Tingkat pencemaran udara sewaktu-waktu dapat terjadi apabila terjadi kebakaran hutan dimusim kemarau. Namun tingkat kebakaran hutan dari tahun ke tahun mengalami penurunan.



2) Pencemaran Status Mutu Air (14 Sungai)

Capaian indikator Pencemaran Status Mutu Air (14 Sungai) dengan indikator status kondisi sedang dengan sebesar 50% sehingga dapat dikategorikan **Cukup Berhasil**. Pada tahun 2019 Cakupan Pencemaran Status Mutu Air “kondisi sedang” terhadap 14 sungai dan terealisasi kondisi sedang menjadi 7 sungai.

b. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel III.25

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran Strategis	Program	Anggaran			Capaian Kinerja (%)	Tingkat Efisiensi
			Target (Rp.)	Realisasi Rp.)	%		
8	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	67.756.500	67.039.000	98,94	80,42	
		Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	470.255.569	461.805.252	98,20		
		Rata-rata			98,57		

Apabila dibandingkan antara persentase realisasi anggaran sebesar 98,07% dan realisasi capaian kinerja sasaran sebesar 80,42%, maka pada sasaran ini tingkat efisiensi penggunaan sumber dayanya belum efisien dengan capaian kinerjanya belum mencapai 100%.

c. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Pemerintah Kabupaten Sintang akan terus melakukan evaluasi atas indikator ini, yang dihubungkan dengan keberadaan program dan kegiatan pendukungnya. Sehingga kelestarian lingkungan hidup tetap terjaga kelestariannya.

Tingkat pencemaran udara di Kabupaten Sintang sangat baik. Antara lain disebabkan oleh masih banyaknya hutan yang hijau, khusus di



tengah kota Sintang masih terdapat “Hutan Alami” yang masih terjaga kelestariannya dan saat menjadi salah satu hutan yang dilindungi.

Pencemaran beberapa sungai di Kabupaten Sintang, antara lain disebabkan oleh limbah pertambangan emas liar dan limbah peternakan.

Pemerintah Kabupaten Sintang dengan pihak terkait selalu melakukan upaya preventif agar pertambangan emas dan kebakaran hutan dimusim kemarau tidak terjadi lagi.

d. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2019 Dengan Kondisi Awal RPJMD tahun 2015, Realisasi Tahun 2017 Dan Tahun 2018 Serta Target Akhir RPJMD tahun 2021

Tabel III.26

Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 8 dengan kondisi awal, realisasi tahun 2017 dan tahun 2018 serta target akhir RPJMD

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA		SATUAN	Kondisi Awal Tahun 2015	Realisasi Tahun 2017	Realisasi Tahun 2018	Realisasi Tahun 2019	Target Tahun 2021
1	2	3		4	5	6	7	8	9
8	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup.	1	Tingkat Pencemaran Udara	ISPU	-	-	-	27,71	-
		2.	Pencemaran Status Mutu Air (14 Sungai)	Status Kondisi	-	-		7	-

Indikator Tingkat Pencemaran Udara target tahun 2019 terealisasi sebesar 27,71 dari target 25. Capaian indikator ini belum dapat dibandingkan karena indikator ini masuk dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ditetapkan dalam IKU perubahan tahun 2018.

e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

a) Hambatan dan kendala dalam pencapaian kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut:



1. Masih rendahnya kesadaran masyarakat Kabupaten Sintang terhadap arti penting kelangsungan lingkungan hidup bagi sumber kehidupan.
2. Kurangnya data primer tentang kondisi kualitas air, udara dan tanah.
3. Masih adanya kegiatan PETI terutama di daerah aliran sungai dan kawasan lahan lainnya yang kurang terkendali.
4. Tingkat pendidikan masyarakat rendah dalam pemahaman kualitas Lingkungan Hidup.

b) Upaya Pemecahan dalam mengantisipasi hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut:

1. Mengintensifkan pengujian kualitas air, udara dan tanah secara rutin agar pencemaran lingkungan hidup dapat terdeteksi secara cepat.
2. Pengawasan terhadap aktivitas PETI sebaiknya ditempuh langkah-langkah seperti mengadakan sosialisasi mengenai peraturan yang mengatur lingkungan hidup kepada masyarakat serta memperkenalkan alat dan bahan yang digunakan dalam kegiatan PETI yang ramah lingkungan.
3. Sosialisasi Perda tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH).
4. Penambahan SDM yang memiliki kompetensi dibidang lingkungan.
5. Memprogramkan kegiatan peningkatan kualitas lingkungan hidup setiap tahun anggaran agar sasaran bisa tercapai sesuai target.
6. Koordinasi dan kerjasama antar instansi terkait baik menanggulangi pencemaran lingkungan hidup maupun pembakaran hutan dan lahan di Kabupaten Sintang sebaiknya dilakukan secara berkesinambungan.



Sasaran 9: Meningkatnya Kerukunan Antar Ummat Beragama

Pelaksanaan sasaran ini untuk mencapai misi Meningkatkan pemahaman, penghayatan dan pengamalan agama dalam kehidupan sosial.

Kinerja sasaran “Meningkatnya kerukunan antar umat beragama” dapat dilihat dari capaian indikator kinerja sebagai berikut:

a. Perbandingan Antara Target Dan Realisasi Kinerja Tahun 2019

Tabel III.27

Indikator Pencapaian Sasaran 9

Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1 Nilai Toleransi antara Pemeluk Agama	Nilai	baik	baik	100
Capaian Kinerja Sasaran Sangat Berhasil				92,50

1) Nilai Toleransi antara Pemeluk Agama

Indikator Nilai Toleransi antara Pemeluk Agama pada tahun 2019 ditargetkan dengan nilai baik terealisasi baik, sehingga capaiannya adalah baik (100%) dengan kategori “**Sangat Berhasil**”.

b. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel III.28

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran Strategis	Program	Anggaran			Capaian Kinerja (%)
			Target (Rp.)	Realisasi Rp.)	%	
9	Meningkatnya kerukunan antar umat beragama	Program Peningkatan Kerukunan Umat Beragama	1.426.464.248	1.418.861.280	99,47	100
Rata-rata					98,47	100



Apabila dibandingkan antara persentase realisasi anggaran sebesar 98,47% dan realisasi capaian kinerja sasaran sebesar 92,50%, maka pada sasaran ini tingkat efisiensi penggunaan sumber dayanya efisien.

c. **Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja**

Toleransi adalah membiarkan orang lain berpendapat lain, melakukan hal yang tidak sependapat dengan kita, tanpa kita ganggu ataupun intimidasi. istilah dalam konteks sosial, budaya dan agama yang berarti sikap dan perbuatan yang melarang adanya diskriminasi terhadap kelompok-kelompok yang berbeda atau tidak dapat diterima oleh mayoritas dalam suatu masyarakat. Contohnya adalah toleransi beragama, dimana penganut mayoritas dalam suatu masyarakat menghormati keberadaan agama atau kepercayaan lainnya yang berbeda. Itu maknanya, pengamalan toleransi harus menjadi suatu kesadaran pribadi dan kelompok yang selalu dihabitualisasikan dalam wujud interaksi sosial.

Toleransi/toleran dalam pengertian seperti itu terkadang menjadi sesuatu yang sangat berat bagi pribadi-pribadi yang belum menyadarinya. Padahal perkara tersebut bukan mengakibatkan kerugian pribadi, bahkan sebaliknya akan membawa makna besar dalam kehidupan bersama dalam segala bidang, apalagi dalam domain kehidupan beragama. Toleran dalam kehidupan beragama menjadi sangat mutlak adanya.

Pemerintah Kabupaten Sintang dalam meningkatkan dan mewujudkan kerukunan antar umat beragama tidak henti-hentinya mensosialisasikan pentingnya persatuan dan kesatuan yang berdasarkan Pancasila. Hampir dalam setiap pergelaran daerah semua unsur agama dan suku selalu dilibatkan secara bersama-sama.



d. Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2019 dengan kondisi awal RPJMD tahun 2015, realisasi tahun 2017 dan tahun 2018 serta target akhir RPJMD tahun 2021

Tabel III.29
Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 9 dengan kondisi awal, realisasi tahun 2017 dan tahun 2018 serta target akhir RPJMD

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi Awal (Tahun 2015)	Realisasi Tahun 2017	Realisasi Tahun 2018	Realisasi Tahun 2019	Target Tahun 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	Meningkatnya kerukunan antar umat beragama.	1 Toleransi antara pemeluk Agama	Nilai	100	100	100	100	100

Dibandingkan dengan kondisi awal indikator kinerja di dalam RPJMD, realisasi pada tahun 2017 dan tahun 2018 dengan nilai baik, realisasi pada tahun 2019 tetap BAIK. Sedangkan apabila dibandingkan dengan target kinerja pada akhir periode RPJMD tahun 2021, realisasi pada tahun 2019 sudah mencapai 100%. Hal ini menunjukkan adanya perkembangan dan peningkatan ke arah yang lebih baik. Sepanjang tahun 2019 tidak ada satu peristiwa yang mengganggu kerukunan antar umat beragama di Kabupaten Sintang.

Dalam pengukuran diambil satuan nilai 100= baik.

e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

a) Hambatan dan kendala dalam pencapaian kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut:

1. Masih kurangnya kegiatan-kegiatan keagamaan yang dilaksanakan dalam rangka mendukung peningkatan kehidupan beragama.
2. Pengurus FKUB yang terdiri dari Tokoh Agama masih belum optimal dalam meluangkan waktu untuk memberikan sosialisasi



kepada masyarakat sebagaimana jadwal kegiatan dan belum maksimal dalam melaksanakan Tupoksi serta rangkap jabatan.

3. FKUB Kabupaten Sintang belum menyusun Panduan/Pedoman Materi Pembinaan dalam memberikan Sosialisasi kepada Tokoh/Pemuka Agama dan masyarakat.
4. Tidak optimalnya anggota sekretariat FKUB dalam menunjang program/kegiatan FKUB dan belum berfungsinya sekretariat FKUB.
5. Minimnya anggaran untuk menunjang kegiatan.

b) Upaya Pemecahan dalam mengantisipasi hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut:

1. Tersedianya anggaran yang memadai guna menunjang pelaksanaan kegiatan kehidupan beragama dan menambah sarana dan prasarana dalam mendukung kegiatan keagamaan.
2. Koordinasi dan komunikasi antar anggota/pengurus FKUB yang intens serta penyegaran anggota/pengurus yang tidak aktif.
3. Keterbatasan Personil SDM Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sintang.
4. Dibentuknya FKUB di tingkat kecamatan sebagaimana usul/saran tokoh Agama, Tokoh Masyarakat di kecamatan.

Sasaran 10:

Meningkatnya Perekonomian Daerah

Pelaksanaan sasaran ini untuk mencapai misi Mengembangkan ekonomi kerakyatan berbasis pedesaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kinerja sasaran “Meningkatnya Perekonomian Daerah” dapat dilihat dari capaian indikator kinerja sebagai berikut:



a. Perbandingan Antara Target Dan Realisasi Kinerja Tahun 2019

Tabel III.30

Indikator Pencapaian Sasaran 10

	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
10	Persentase Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	5,5	5,09	92,55
Capaian Kinerja Sasaran Sangat Berhasil					92,55

1) Persentase Laju Pertumbuhan Ekonomi

Indikator Laju Pertumbuhan Ekonomi pada tahun 2019 ditargetkan sebesar 5,5 % terealisasi 5,09 dengan tingkat capaian 92,55%.

Berdasarkan data statistik laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sintang dalam empat tahun terakhir cenderung meningkat, sebagaimana data berikut ini :

- Tahun 2015 pertumbuhan ekonomi 4,57
- Tahun 2016 pertumbuhan ekonomi 5,28
- Tahun 2017 pertumbuhan ekonomi 5,33
- Tahun 2018 pertumbuhan ekonomi 5,47

Namun pada tahun 2019 ini kecenderungan menurun dimana laju pertumbuhan Kabupaten Sintang berada pada angka 5,09%.

b. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel III.31

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran Strategis	Program	Anggaran			Capaian Kinerja (%)
			Target (Rp.)	Realisasi Rp.)	%	
10	Meningkatnya Perekonomian Daerah	Program Peningkatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah	9.433.496.787,00	7.711.946.867,00	81,75	
Rata-rata					81,75	92,55

Persentase realisasi anggaran sebesar 81,75% dibanding dengan realisasi capaian kinerja sasaran sebesar 92,55%, maka pada sasaran ini tingkat efisiensi penggunaan sumber dayanya belum efisien.



c. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Untuk lebih meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi dan sekaligus mewujudkan pemerataan pendapatan, perlu adanya peningkatan mutu sumber daya manusia yang diikuti pengendalian jumlah penduduk serta peningkatan infrastruktur. Keterpaduan antara program pemerintah dengan peran swasta dan masyarakat perlu diperhatikan guna menyelaraskan langkah dalam menggali sektor-sektor potensial yang sekaligus memiliki potensi besar dalam mendukung pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi secara riil diikuti dengan perubahan harga yang cepat pada setiap sektor ekonomi.

Struktur lapangan usaha sebagian masyarakat Kabupaten Sintang masih didominasi lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan. Sumbangan terbesar dalam peningkatan laju pertumbuhan ekonomi tahun 2019 dihasilkan dari lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan motor, lapangan usaha industri pengolahan, lapangan usaha pertambangan dan penggalian serta lapangan usaha informasi dan komunikasi.

Untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sintang, Pemerintah membuat regulasi yang memudahkan bagi dunia usaha khususnya memberikan kemudahan dan kecepatan yang dalam perizinan untuk berusaha.

Beberapa faktor yang membuat laju pertumbuhan ekonomi di Sintang pada tahun 2019, diantaranya adalah dampak dari ekonomi global dimana harga komoditas pertanian dan perkebunan mengalami penurunan, terutama turunnya harga karet dan kelapa sawit. Komoditas pertanian karet dan sawit merupakan penghasilan utama masyarakat Kabupaten Sintang.



d. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2019 Dengan Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2015), Realisasi Tahun 2017, Tahun 2018 Dan Target Akhir RPJMD (Tahun 2021)

Tabel III.16
Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 10 dengan kondisi awal, realisasi tahun 2017, 2018 dan target akhir RPJMD

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi Awal (Tahun 2015)	Realisasi Tahun 2017	Realisasi Tahun 2018	Realisasi Tahun 2019	Target Tahun 2021
1	2	3	4	5	6			7
10	Meningkatnya Perekonomian Daerah.	1 Persentase Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	4,57	5,33	5,47	5,09	6

Untuk mengetahui Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sintang salah satu unsur utamanya adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

PDRB diperoleh dari perhitungan Untuk mengukur tingkat kemakmuran masyarakat, salah satu indikator yang digunakan adalah PDRB per kapita, yaitu PDRB atas dasar harga berlaku dibagi penduduk pertengahan tahun. Pada tahun 2018 PDRB per kapita Kabupaten Sintang adalah sebesar Rp. 32,53 juta yang berarti rata-rata pendapatan satu orang penduduk Kabupaten Sintang selama setahun adalah sebesar Rp.32,53 juta atau sebesar Rp. 2,71 juta per bulan. Jika dibandingkan tahun sebelumnya, angka PDRB per kapita meningkat sebesar Rp. 2,42 juta atau 8,04 persen.

Untuk lebih meningkatkan pendapatan per kapita, maka laju pertumbuhan ekonomi harus ditingkatkan dan sebaliknya laju pertumbuhan penduduk perlu untuk dikendalikan. Karena pada dasarnya laju pertumbuhan penduduk yang cepat akan berpengaruh terhadap pembangunan ekonomi terutama sekali terhadap perkembangan Gross Regional Domestic Product (GRDP) pendapatan regional.

Sedangkan, komponen PDRB menurut penggunaan meliputi konsumsi rumah tangga, konsumsi lembaga swasta nirlaba, konsumsi pemerintah,



Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), perubahan stok, serta ekspor dan impor.

Dengan turunnya laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sintang tahun 2019, secara langsung PDRB juga akan menurun. Pemerintah Kabupaten Sintang dalam waktu beberapa waktu terakhir berupaya untuk mengatasi inflansi dengan melibatkan beberapa pihak terkkait.

e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

a. Hambatan dan kendala dalam pencapaian kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut:

1. Menurunnya beberapa harga komoditas pertanian dan perkebunan.
2. Peningkatan biaya tenaga kerja
3. Rendahkan kemampuan pelaku usaha atau masyarakat dalam memanfaatkan tehnologi informasi.
4. Tingkat pengangguran cukup tinggi
5. Masih tingginya konsumsi barang dari luar daerah Kabupaten Sintang.

b. Upaya Pemecahan dalam mengantisipasi hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut:

1. Memanfaatkan sumber daya alam dengan memanfaatkan apa yang dihasilkan dari alam baik dari hutan maupun dari pertambangan.
2. Membuka kesempatan kepada perusahaan luar untuk berinvestasi di Kabupaten Sintang.
3. Meningkatkan stabilitas politik sehingga usaha perekonomian dapat berlangsung terpercaya dan aman.
4. Meningkatkan ketrampilan tenaga kerja dengan, peningkatan daya saing ekspor manufaktur dan penguatan strategi industri hulu.



5. Mendukung program-program Pemerintah Pusat dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Sasaran 11

Meningkatnya Investasi Yang Berbasis Potensi Unggulan Lokal Dan Lapangan Pekerjaan

Sasaran ini diarahkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah melalui pengembangan investasi dengan cara penyediaan wilayah sesuai peruntukannya, menyediakan akses jalan, mempermudah pemberian pelayanan perijinan yang saat ini masih tertumpu pada investasi bidang agro.

Pelaksanaan sasaran ini untuk mencapai misi Mengembangkan ekonomi kerakyatan berbasis pedesaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kinerja sasaran “Meningkatnya investasi yang berbasis potensi unggulan lokal dan lapangan pekerjaan” dapat dilihat dari capaian indikator kinerja sebagai berikut:

a. Perbandingan Antara Target Dan Realisasi Kinerja Tahun 2019

Tabel III.32
Indikator Pencapaian Sasaran 10

Indikator		Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)	buah	227	272	119,82
2	Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)	Milyar Rp.	1.695,20	3.489,20	205,83
3	Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi PMDN = Rp. 250 M	Milyar Rp.	325	1.461,75	449,77
4	Angka Partisipasi Angkatan Kerja	%	85,60	72,20	84,35
5	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3,01	2,99	100,66
Capaian Kinerja Sasaran Sangat Berhasil					89,50



1) Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)

Indikator Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA) pada tahun 2019 ditargetkan sebanyak 227 buah terealisasi sebanyak 272 buah, sehingga capaiannya adalah 119,82% dengan kategori "**Sangat Berhasil**".

2) Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)

Indikator Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA) pada tahun 2019 ditargetkan sebesar 1.695,20 milyar rupiah terealisasi sebesar 3.489,20 milyar rupiah, sehingga capaiannya adalah 205,83% dengan kategori "**Sangat Berhasil**".

3) Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi PMDN = Rp. 250 M

Indikator Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi PMDN pada tahun 2019 ditargetkan sebesar 325 milyar rupiah terealisasi sebesar 1.461,75 milyar rupiah, sehingga capaiannya adalah 449,77% dengan kategori "**Sangat Berhasil**".

4) Angka Partisipasi Angkatan Kerja

Indikator Angka Partisipasi Angkatan Kerja pada tahun 2019 ditargetkan sebesar 85,60% terealisasi sebesar 72,20%, sehingga capaiannya adalah 84,35% dengan kategori "**Berhasil**".

5) Tingkat Pengangguran Terbuka

Indikator Tingkat Pengangguran Terbuka pada tahun 2019 ditargetkan sebesar 3,01% terealisasi sebesar 2,99%, sehingga capaiannya adalah 100,66% dengan kategori "**Sangat Berhasil**".

b. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel III.33

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya



No	Sasaran Strategis	Program	Anggaran			Capaian Kinerja (%)	Tingkat Efisiensi
			Target (Rp.)	Realisasi Rp.)	%		
11	Meningkatnya investasi yang berbasis potensi unggulan lokal	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	166.080.500,00	165.377.140,00	99,58	140,79	
		Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	774.111.664,00	759.124.006,00	98,06		
		Program Peningkatan Kesempatan Kerja	410.037.000,00	405.704.368,00	98,94		
		Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	335.979.000,00	335.497.200,00	99,86		
		Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	441.128.050,00	435.974.193,00	98,83		
		Program Pengendalian dan Evaluasi Investasi	194.341.300,00	192.980.360,00	99,30		
		Rata-rata			99,10		

Apabila dibandingkan antara persentase realisasi anggaran sebesar 99,10% dan realisasi capaian kinerja sasaran sebesar 140,79%, maka pada sasaran ini tingkat efisiensi penggunaan sumber dayanya “efisien” dengan tingkat efisiensi 41,69%.

c. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Tidak bisa dipungkiri bahwa Kabupaten Sintang merupakan pusat pertumbuhan ekonomi di kawasan timur Provinsi Kalimantan Barat yang salah satunya dapat dilihat melalui perkembangan jumlah Bank.

Peningkatan jumlah Bank menunjukkan meningkatnya aktivitas ekonomi. Suatu Bank tidak akan membuka cabangnya di suatu daerah jika potensi ekonomi di daerah itu kurang berkembang. Perkembangan jumlah Bank ini tentu saja juga sejalan dengan perkembangan pertumbuhan ekonomi daerah.

Hingga tahun 2019 terdapat sebanyak 38 Bank Umum di Kabupaten Sintang, yang terdiri dari 33 Bank Konvensional dan 5 Bank Syariah. Dengan formasi seperti itu ditambah lagi dengan persebarannya yang sudah menjangkau hampir seluruh kecamatan serta keberadaan 4 BPR/LKM yang ada saat ini menyebabkan ruang untuk mendirikan



BPR/LKM baru di Sintang menjadi kecil. Dengan demikian, meskipun pemerintah daerah mengeluarkan kebijakan yang memberikan kemudahan bahkan reward terhadap pembentukan BPR/LKM baru tetap sulit direspon oleh pengusaha atau pemilik modal. Hingga tahun 2019 total BPR/LKM di Kabupaten Sintang hanya berjumlah 4 buah.

Perkembangan jumlah investor dalam lima tahun terakhir ini di Kabupaten Sintang cukup menggembirakan, yaitu 272 investor pada tahun 2019. Pola peningkatan jumlah investor ternyata hampir sama dengan pola peningkatan jumlah nilai investasinya. Sebagaimana kita ketahui bahwa besaran PDRB daerah berdasarkan pendekatan pengeluaran dipengaruhi secara positif oleh empat variable, yaitu konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah, dan ekspor. Setiap daerah umumnya mengharapkan sumber peningkatan utama berasal dari investasi dan ekspor karena kedua variable ini berpengaruh langsung terhadap penurunan angka pengangguran terbuka dan angka kemiskinan.

Pemerintah Kabupaten Sintang akan melakukan evaluasi terhadap program-program pendukung yaitu: Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan dan Program Penanganan Tenaga Kerja Indonesia (TKI), keterbatasan anggaran masih menjadi kendala utama dalam pengembangan program pendukung indikator tersebut, namun demikian Pemerintah Kabupaten Sintang akan berusaha melakukan kegiatan-kegiatan dengan ***budget*** seperti sosialisasi perlindungan tenaga kerja baik untuk para pengusaha maupun tenaga kerja, sehingga terjalin hubungan yang harmonis antara pengusaha dengan pekerjanya.

d. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2019 Dengan Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2015), Realisasi Tahun 2017 Dan Tahun 2018 Serta Target Akhir RPJMD (Tahun 2021)



Tabel III.34
Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 10 dengan kondisi awal, realisasi tahun 2017 dan tahun 2018 serta target akhir RPJMD

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi Awal (Tahun 2015)	Realisasi Tahun 2017	Realisasi Tahun 2018	Realisasi Tahun 2019	Target Tahun 2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
11	Meningkatnya investasi yang berbasis potensi unggulan daerah.	1	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) = 195 Buah	Buah	195	198	229	272	241
		2	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) = Rp 1.349,13 M	Milyar Rp	1.349,13	1.603,64	10.024,19	3.489,20	1.763,40
		3	Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah) =250 M	Milyar Rp	250	408,26	9.749,19	1.461,75	500
		4	Angka partisipasi angkatan kerja	%	72,08	73,00	73,00	72,20	95,03
		5	Tingkat pengangguran terbuka	%	3,06	3,05	1,81	2,99	2,99

Realisasi **Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)** pada tahun 2019 dibandingkan dengan kondisi awal indikator kinerja di dalam RPJMD sebanyak 195 buah mengalami kenaikan sebanyak 77 buah. Sedangkan apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2017 sebanyak 198 buah, mengalami kenaikan sebanyak 74 buah dan dibandingkan dengan tahun 2018 sebanyak 229 mengalami kenaikan sebesar 43 buah. Selanjutnya apabila dibandingkan dengan target kinerja pada akhir periode RPJMD tahun 2021 sebanyak 241 unit, realisasi pada tahun 2019 sudah melampaui target sebesar 31 buah atau 197, 87%

Realisasi **Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) = Rp 1.349,13 M** pada tahun 2019 dibandingkan dengan kondisi awal indikator kinerja di dalam RPJMD sebesar 1.349,13 realisasi pada tahun mengalami kenaikan sebesar 2.140,07 milyar rupiah, tahun 2017 sebesar 1.603,64 milyar rupiah, mengalami peningkatan sebesar 1.885,56 milyar rupiah dan tahun 2018 sebesar 10.024,19 milyar rupiah mengalami penurunan sebesar 6.534,99 milyar rupiah. Sedangkan



apabila dibandingkan dengan target kinerja pada akhir periode RPJMD tahun 2021 sebesar 1.763,40 milyar rupiah, realisasi pada tahun 2019 melewati target yaitu sebesar 1.725,80 milyar rupiah atau mencapai 197,87%.

Realisasi **Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi PMDN** pada tahun 2019 dibandingkan dengan kondisi awal indikator kinerja di dalam RPJMD sebesar 250 milyar rupiah mengalami kenaikan sebesar 1.211,75 miliar rupiah, dibandingkan tahun 2017 sebesar 408,26 milyar rupiah mengalami kenaikan sebesar 1.053,49 milyar rupiah, dibandingkan tahun 2018 sebesar 9.749,19 mengalami penurunan 8.287,44 milyar rupiah. Apabila dibandingkan dengan target kinerja pada akhir periode RPJMD tahun 2021 sebesar 500 milyar rupiah, realisasi pada tahun 2019 mencapai 292,35%.

Realisasi **Angka Partisipasi Angkatan Kerja** pada tahun 2019 dibandingkan dengan kondisi awal indikator kinerja di dalam RPJMD sebesar 72,08%, mengalami kenaikan 0,12%, dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2017 dan tahun 2018 sebesar 73% mengalami penurunan sebesar 0,8%. Selanjutnya, dibandingkan dengan target kinerja pada akhir periode RPJMD tahun 2021 sebesar 95,03%, realisasi pada tahun 2019 baru mencapai 75,98%.

Realisasi **Tingkat Pengangguran Terbuka** pada tahun 2019 dibandingkan dengan kondisi awal indikator kinerja di dalam RPJMD sebesar 3,06%, mengalami penurunan 0,07%, sedangkan apabila dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2017 sebesar 3,05 mengalami penurunan 0.06%, dibandingkan tahun 2018 sebesar 1,81 mengalami kenaikan sebesar 1,18%. Selanjutnya, dibandingkan dengan target kinerja pada akhir periode RPJMD tahun 2021 sebesar 2,99%, realisasi pada tahun 2019 mencapai 100%.



**e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/
Penurunan Kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

**a) Hambatan dan kendala dalam pencapaian kinerja sasaran ini
adalah sebagai berikut:**

- 1). Masih rendahnya volume perdagangan pada pasar perkampungan karena masyarakat belum terkonsentrasi di suatu wilayah.
- 2). Infrastruktur terutama jalan utama penghubung antar daerah masih banyak yang rusak sehingga menghambat mobilitas penduduk dan perdagangan.
- 3). Penguasaan teknologi terutama dibidang produksi sangat terbatas sehingga untuk meningkatkan hasil produksi masih banyak menimbulkan kendala.
- 4). Tidak adanya data base tentang keadaan Pengusaha Kecil Menengah (PKM) disetiap kecamatan sehingga belum diketahui potensi atau komoditi unggulan bagi PKM dan koperasi disetiap kecamatan.
- 5). Rendahnya daya inovasi/kreatifitas, kurangnya profesionalisme, kurang permodalan serta adanya ketergantungan/kurang mandiri sehingga PKM dan koperasi menjadi kurang berkembang
- 6). Menumbuhkan lapangan kerja sektor non formal, serta mendorong pertumbuhan perekonomian untuk memperluas lapangan kerja
- 7). Pertumbuhan lapangan kerja tidak sebanding dengan pertumbuhan angkatan kerja, sehingga selalu terjadi kelebihan angkatan kerja yang berarti menambah pengangguran.
- 8). Angkatan kerja yang ada sebagian besar masih rendah kualitasnya dan belum memiliki keterampilan yang diharapkan pasar.
- 9). Pemahaman tentang berbagai peraturan pelaksanaan tentang undang-undang ketenagakerjaan masih rendah, sehingga



berdampak pada kasus perselisihan industrial antara pihak perusahaan dan karyawan.

- 10).Perusahaan pemberi kerja belum melaksanakan pembukaan lowongan kerja secara transparan.

b) Upaya Pemecahan dalam mengantisipasi hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut:

- 1). Merangsang ekonomi bidang lainnya seperti pasar mikro melalui penyediaan sarana dan prasarana supaya dapat merangsang masyarakat dalam bergerak di bidang mikro.
- 2). Menyediakan sarana dan prasarana jalan dari perkampungan yang satu ke lainnya sehingga semua perkampungan saling terhubung.
- 3). Melakukan usaha perbaikan infrastruktur jalan secara bertahap dan berkualitas sehingga diharapkan seluruh jalan penghubung antar daerah berkualitas memadai.
- 4). Mengundang calon investor untuk datang dan melihat langsung potensi yang ada, serta memberikan insentif tertentu.
- 5). Dinas Perindagkop dan Usaha Kecil lebih memotivasi pengusaha kecil dan menengah agar dapat menciptakan usaha baru dengan mengimplementasikan hasil pelatihan keterampilan yang diberikan.
- 6). Meningkatkan keikutsertaan Pemerintah daerah dalam pemeran atau expo yang diadakan pihak luar.
- 7). Meningkatkan kemampuan SDM PKM dan koperasi terutama dibidang manajerial serta terus mendorong untuk lebih profesional dalam melaksanakan tugas dan fungsi PKM dan koperasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlakuMeningkatkan dukungan dana dan SDM untuk kegiatan-kegiatan pelatihan calon tenaga kerja serta peningkatan ketrampilan tenaga kerja.



- 8). Meningkatkan sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang Ketenagakerjaan dengan terpahaminya Perundang-undangan ketenagakerjaan sehingga mengurangi dampak dari kasus perselisihan industrial antara pihak perusahaan dan karyawan.
- 9). Melaksanakan kegiatan pelatihan ketrampilan tenaga kerja berbasis kompetensi untuk meningkatkan kualitas dan pengalaman kerja.
- 10). Meningkatkan hubungan kerjasama dengan Pengusaha dalam bidang ketenagakerjaan untuk mempermudah pengawasan dan pemeriksaan terhadap perusahaan.
- 11). Melaksanakan kegiatan bursa kerja (*JOB FAIR*) yang bertujuan untuk menjembatani/matching antara perusahaan pemberi kerja dengan pencari kerja.

Sasaran 12:
Meningkatnya Daya Saing Potensi Unggulan Daerah
Dan Terwujudnya Sentra Pertumbuhan Ekonomi
Berbasis Keunggulan Lokal

Pelaksanaan sasaran ini untuk mencapai misi Mengembangkan ekonomi kerakyatan berbasis pedesaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kinerja sasaran “Meningkatnya daya saing potensi unggulan daerah dan terwujudnya sentra pertumbuhan ekonomi berbasis keunggulan lokal” dapat dilihat dari capaian indikator kinerja sebagai berikut:

a. Perbandingan Antara Target Dan Realisasi Kinerja Tahun 2019

Tabel III.35
Indikator Pencapaian Sasaran 12



Indikator		Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Persentase Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB	%	10,73	9,31	86,77
2	Persentase Produk Usaha Kecil dan Menengah bersertifikat	%	50	37	74,00
3	Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB	%	17,88	9,32	52,13
Capaian Kinerja Sasaran Sangat Berhasil					85,00

1) Persentase Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB

Indikator Persentase Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB pada tahun 2019 ditargetkan sebesar 10,73% terealisasi sebesar 9,31%, sehingga capaiannya adalah 86,77% dengan kategori **“Sangat Berhasil”**.

2) Persentase Produk Usaha Kecil dan Menengah Yang Bersertifikat

Indikator Persentase Produk Usaha Kecil dan Menengah yang Bersertifikat pada tahun 2019 ditargetkan sebesar 50%, terealisasi sebesar 37%, sehingga capaiannya adalah 74% dengan kategori **“Berhasil”**.

3) Persentase Kontribusi sektor Perdagangan Terhadap PDRB

Indikator Persentase Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB pada tahun 2019 ditargetkan sebesar 17,88%, terealisasi sebesar 9,32%, sehingga capaiannya adalah 52,13% dengan kategori **“Tidak Berhasil”**.

b. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel III.36

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya



No	Sasaran Strategis	Program	Anggaran			Capaian Kinerja (%)	Tingkat Efisiensi
			Target (Rp.)	Realisasi Rp.)	%		
12	Meningkatnya daya saing potensi unggulan daerah	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	891.948.100,00	863.444.980,00	96,80	80,38	
		Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	221.777.500,00	208.271.900,00	93,91		
		Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	179.428.000,00	136.651.000,00	76,16		
		Program Penataan Struktur Industri	325.516.300,00	300.706.700,00	92,38		
		Program Peningkatan Efisiensi Pedagang Dalam Negeri	5.600.872.560,00	5.497.799.088,00	98,16		
		Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan	40.000.000,00	37.175.000,00	92,94		
		Rata-rata					

Apabila dibandingkan antara persentase realisasi anggaran sebesar 91,72% dan realisasi capaian kinerja sasaran sebesar 80,36%, maka pada sasaran ini tingkat efisiensi penggunaan sumber dayanya belum efisien.

c. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB

Pengelolaan sektor industri pada dasarnya merupakan masalah yang dihadapi semua daerah di Indonesia, baik di Jawa maupun luar Jawa. Walaupun intensitas dari masalah tersebut mungkin sekali berbeda karena adanya perbedaan pada faktor-faktor yang mempengaruhi seperti laju pertumbuhan ekonomi, teknologi yang dipergunakan dan kebijaksanaan pemerintah daerah. Dilihat dari sudut pandang makro ekonomi, perluasan sektor industri dapat terjadi melalui pertumbuhan ekonomi yaitu melalui proses kenaikan output produksi secara konstan dalam jangka panjang. Untuk itu kontribusi sektor industri sangatlah



penting dalam meningkatkan PDRB, dengan peningkatan output dari sektor industri maka tentu saja berdampak positif terhadap PDRB.

Pemerintah Kabupaten Sintang akan terus melakukan evaluasi atas indikator ini dengan menghubunginya dengan program dan kegiatan pendukungnya, walaupun sasaran sudah mencapai target yang telah ditetapkan.

d. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2019 Dengan Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2015), Realisasi Tahun 2018 Dan Target Akhir RPJMD (tahun 2021)

Tabel III.37

Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 12 dengan kondisi awal, realisasi tahun 2016 dan tahun 2017 serta target akhir RPJMD

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi Awal (Tahun 2015)	Realisasi Tahun 2017	Realisasi Tahun 2018	Realisasi Tahun 2019	Target Tahun 2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
12	Meningkatnya daya saing potensi unggulan daerah dan terwujudnya sentra pertumbuhan ekonomi berbasis keunggulan lokal	1	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB	%	10,03	9,21	9,31	9,31	10,75
		2	Persentase produk usaha kecil dan menengah yang bersertifikat.	%				37	
		3	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	%	17,60	17,69	17,69	9,32	18,15

Realisasi **Persentase Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB** pada tahun 2019 dibandingkan dengan kondisi awal indikator kinerja di dalam RPJMD 10,03 mengalami penurunan 0,72%, realisasi tahun 2017 sebesar 9,21% mengalami kenaikan sebesar 0,1%, Sedangkan apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 sebesar 9,31%, tidak mengalami kenaikan/penurunan. Selanjutnya apabila dibandingkan dengan target kinerja pada akhir periode RPJMD tahun 2021 sebesar 10,75%, realisasi pada tahun 2019 baru mencapai 86,60%.



Realisasi **Persentase Produk Usaha Kecil dan Menengah yang bersertifikat** pada tahun 2019 realisasinya 37% dari target 50% atau capaiannya 74%. Realisasi tahun 2019 tidak ada data pembandingnya karena Indikator ini dimunculkan pada perubahan IKU tahun 2018.

Realisasi **Persentase Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB** pada tahun 2019 dibandingkan dengan kondisi awal indikator kinerja di dalam RPJMD dan realisasi pada tahun 2017 sebesar 17,60%, mengalami kenaikan 0,09% sedangkan apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2018, tidak mengalami perubahan. Selanjutnya apabila dibandingkan dengan target kinerja pada akhir periode RPJMD tahun 2021 sebesar 18,15%, realisasi pada tahun 2019 baru mencapai 97,46%.

e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

a) Hambatan dan kendala dalam pencapaian kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut:

- 1). Rendahnya kemampuan usaha IKM, yaitu terkait pengembangan usaha dan peningkatan permodalan.
- 2). Penyaluran pinjaman dana bergulir belum optimal.
- 3). Belum terfokusnya pengembangan IKM daerah secara komprehensif.
- 4). Masih rendahnya volume perdagangan pada pasar perkampungan karena masyarakat belum terkonsentrasi di suatu wilayah.
- 5). Infrastruktur terutama jalan utama penghubung antar daerah masih banyak yang rusak sehingga menghambat mobilitas penduduk dan perdagangan.
- 6). Kewenangan belum semua dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten, misalnya ekspor impor sehingga tidak dapat menghitung PDRB secara utuh.



7). SDM dan anggaran yang belum memadai.

b) Upaya Pemecahan dalam mengantisipasi hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut:

- 1). Pembinaan kelembagaan dan manajemen IKM melalui Penyuluhan dan Pendidikan Pelatihan.
- 2). Peningkatan akses IKM untuk pembiayaan usaha yang bersumber dari lembaga keuangan mikro.
- 3). Membuat Peta Panduan (*roadmap*) Pengembangan Inti Industri Daerah.
- 4). Perlu adanya kerjasama lintas instansi dalam penghitungan PDRB tahunan.
- 5). Merangsang ekonomi bidang lainnya seperti pasar mikro melalui penyediaan sarana dan prasarana supaya dapat merangsang masyarakat dalam bergerak di bidang mikro.
- 6). Melakukan usaha perbaikan infrastruktur jalan secara bertahap dan berkualitas sehingga diharapkan seluruh jalan penghubung antar daerah berkualitas memadai
- 7). Meningkatkan keikutsertaan Pemerintah daerah dalam pameran atau expo yang diadakan pihak luar.
- 8). Perlunya pendidikan dan pelatihan SDM.

**Sasaran 13:
Meningkatnya Peran Koperasi, UMKM, dan Lembaga
Keuangan Non Perbankan Dalam Pengembangan
Perekonomian Rakyat**

Sasaran ini diarahkan untuk mengembangkan koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah. Pengembangan koperasi melalui iklim usaha yang kondusif merupakan jaringan pemasaran bagi komoditi yang dihasilkannya, Pelaksanaan sasaran ini untuk mencapai misi Mengembangkan ekonomi



kerakyatan berbasis pedesaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kinerja sasaran “Meningkatnya peran koperasi, UMKM, dan lembaga keuangan non perbankan dalam pengembangan perekonomian rakyat” dapat dilihat dari capaian indikator kinerja sebagai berikut:

a. Perbandingan Antara Target Dan Realisasi Kinerja Tahun 2019

Tabel III.38

Indikator Pencapaian Sasaran 13

Indikator		Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
13	Persentase Koperasi Aktif	%	71,50	87	121,68
Capaian Kinerja Sasaran Sangat Berhasil					92,50

1) Persentase Koperasi Aktif

Indikator Persentase Koperasi Aktif pada tahun 2019 ditargetkan sebesar 71,50%, terealisasi sebesar 87%, sehingga capaiannya adalah 121,68% dengan kategori “**Sangat Berhasil**”.

b. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel III.39

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran Strategis	Program	Anggaran			Capaian Kinerja (%)	Tingkat Efisiensi
			Target (Rp.)	Realisasi Rp.)	%		
13	Meningkatnya peran koperasi, UMKM, dan lembaga keuangan non perbankan dalam pengembangan perekonomian rakyat	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	261.919.420,00	256.748.060,00	98,03	121,68	
		Rata-rata			98,03	121,68	23,65

Apabila dibandingkan antara persentase realisasi anggaran sebesar 98,03% dan realisasi capaian kinerja sasaran sebesar 122,20%, maka pada sasaran ini tingkat efisiensi penggunaan sumber dayanya sudah



efisien dengan capaian kinerjanya melebihi 100% dengan tingkat efisiensi 23,65%.

c. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Data Kementerian Koperasi dan UMKM menunjukkan bahwa jumlah koperasi yang tidak aktif di Kalimantan Barat cukup besar, yaitu sebanyak 1.905 koperasi dari total 4.670 koperasi atau sekitar 40,80%. Dengan kata lain, hanya sekitar 60% koperasi yang aktif di Kalimantan Barat. Apabila dibandingkan dengan data tersebut dapat diketahui bahwa persentase koperasi aktif di Kabupaten Sintang yang mencapai 87% atau lebih tinggi dari rata-rata provinsi.

Jumlah Koperasi di Kabupaten Sintang sampai dengan akhir tahun 2019 sebanyak 326 koperasi, yang aktif 282 koperasi dan tidak aktif 42 koperasi.

Beberapa faktor yang diduga sebagai penyebab banyaknya koperasi tidak aktif di Kabupaten Sintang, yaitu antara lain:

- a. Perubahan fungsi lahan dari pertanian tanaman pangan dan hortikultura ke perkebunan yang memaksa sebagian koperasi pertanian kehilangan aktivitas.
- b. Pembinaan koperasi yang lebih fokus pada koperasi aktif karena sulitnya berkomunikasi dengan pengurus koperasi yang sudah tidak aktif. Keadaan semakin sulit karena anggota koperasi yang tidak aktif juga merupakan anggota pasif yang tidak mempersoalkan dan tidak responsif terhadap kondisi yang sedang dialami oleh koperasinya.
- c. Berpindahannya sebagian pengurus dan anggota koperasi ke aktivitas usaha sendiri yang lebih menjanjikan karena memberikan kebebasan dan lepas dari birokrasi rapat pengurus dan rapat anggota.
- d. Kesulitan modal yang menyebabkan koperasi berhenti menjalankan aktivitasnya.



- e. Minimnya dukungan infrastruktur yang menyebabkan aktivitas koperasi terganggu perkembangannya sehingga menyebabkan pengurus tidak termotivasi mengembangkan usaha.
- f. Efisiensi dan daya saing yang sulit ditingkatkan sehingga koperasi kalah bersaing dengan koperasi lainnya atau bahkan kalah bersaing dengan pelaku usaha lainnya yang terus menerus meningkatkan kualitas produk.

d. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2019 Dengan Kondisi Awal RPJMD (tahun 2015), Realisasi Tahun 2017 dan Tahun 2018 Serta Target Akhir RPJMD (tahun 2021)

Tabel III.41
Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 12 dengan kondisi awal, realisasi tahun 2017 dan tahun 2018, serta target akhir RPJMD

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi Awal (Tahun 2015)	Realisasi Tahun 2017	Realisasi Tahun 2018	Realisasi Tahun 2019	Target Tahun 2021
1	2	3	4	5	6	7		8
13	Meningkatnya peran koperasi, UMKM, dan lembaga keuangan non perbankan dalam pengembangan perekonomian rakyat.	1 Persentase koperasi aktif	%	69,23	91,20	86,71	87	72,37

Dibandingkan dengan kondisi awal indikator kinerja di dalam RPJMD sebesar 69,23%, realisasi pada tahun 2017 dan realisasi tahun 2018, masing-masing mengalami kenaikan 17,77%, penurunan 4,2% dan kenaikan 0,29% Sedangkan apabila dibandingkan dengan target kinerja pada akhir periode RPJMD tahun 2021 sebesar 72,37%, realisasi pada tahun 2019 sudah mencapai 120,22%.

e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

- a) Hambatan dan kendala dalam pencapaian kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut:



1. Rendahnya kemampuan usaha Koperasi dan UKM, yaitu terkait pengembangan usaha dan peningkatan permodalan.
2. Rendahnya produktivitas Koperasi dan UKM.
3. Penyaluran pinjaman dana bergulir belum optimal.

b) Upaya Pemecahan dalam mengantisipasi hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut:

1. Pembinaan kelembagaan dan manajemen koperasi dan UKM melalui Penyuluhan dan Pendidikan Pelatihan.
2. Peningkatan akses Koperasi dan UKM untuk pembiayaan usaha yang bersumber dari lembaga keuangan mikro.
3. Memperluas pelaksanaan dana bergulir, kepada Koperasi dan UMKM dengan perjanjian akad kredit paling lama 3 (tiga) tahun.

Sasaran 14:
**Meningkatnya Produksi Dan Produktivitas Komoditi
Pertanian Dan Perkebunan Di Desa Serta
Meningkatnya Ketahanan Pangan**

Pelaksanaan sasaran ini untuk mencapai misi Mengembangkan ekonomi kerakyatan berbasis pedesaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kinerja sasaran “Meningkatnya produksi dan produktivitas komoditi pertanian dan perkebunan di desa serta meningkatnya ketahanan pangan” dapat dilihat dari capaian indikator kinerja sebagai berikut:

a. Perbandingan Antara Target Dan Realisasi Kinerja Tahun 2019

Tabel III.42

Indikator Pencapaian Sasaran 14



	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Nilai Tukar Petani	poin	102,00	99	97,06
2.	Jumlah Produksi Padi per tahun	ton/thn	87.078,00	77.516	89,02
3.	Jumlah Produksi Jagung per tahun	ton/thn	3.960,00	8.758,00	221,16
4.	Persentase Kontribusi Sektor Pertanian/Perkebunan terhadap PDRB	%	28,43	21,23	74,67
5.	Produksi Karet per tahun	ton/thn	57.286,00	39.274,00	68,56
6.	Produksi Kelapa Sawit per tahun	ton/thn	1.330.360	1.169.879,00	87,94
7.	Produksi Lada per tahun	ton/thn	1.350,00	901,00	66,74
8.	Produksi Kakao per tahun	ton/thn	24,30	10,00	41,15
9.	Produksi Kopi per tahun	ton/thn	112,00	99,00	88,39
10.	Jumlah Produksi Peternakan (daging) per tahun	ton/thn	6.343,00	5.677,00	89,50
11.	Jumlah Produksi Perikanan per tahun	ton/thn	1.969,00	19.449,00	987,76
12.	Luas Kebun :	ha	309.550,00	278.857,00	90,08
	- Karet	ha	94.935,00	97.167,00	102,35
	- Kelapa Sawit	ha	212.078,00	178.992,00	84,40
	- Lada	ha	1.712,00	2.217,00	129,50
	- Kakao	ha	425,00	107,00	25,18
	- Kopi	ha	400,00	374,00	93,50
13.	Persentase Ketersediaan Pangan Utama	%	99,00	100,00	101,01
14.	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah	ton	90,00	75.612,00	84.013,33
Capaian Kinerja Sasaran Berhasil					80,92

1) Nilai Tukar Petani

Indikator Nilai Tukar Petani pada tahun 2019 ditargetkan sebesar 102 poin, terealisasi sebesar 99 poin, sehingga capaiannya adalah 97,06% dengan kategori “**Sangat Berhasil**”.

2) Jumlah Produksi Padi per tahun

Indikator Jumlah Produksi Padi pada tahun 2019 ditargetkan sebanyak 87.078 ton/tahun, terealisasi sebesar 77.516 ton/tahun, sehingga capaiannya adalah 89,02% dengan kategori “**Sangat Berhasil**”.

3) Jumlah Produksi Jagung per tahun

Indikator Jumlah Produksi Jagung pada tahun 2019 ditargetkan sebanyak 3.960 ton/tahun, terealisasi sebesar 8.758 ton/tahun, sehingga capaiannya adalah 221,16% dengan kategori “**Sangat Berhasil**”.



4) Persentase Kontribusi Sektor Pertanian/Perkebunan terhadap PDRB

Indikator Persentase Kontribusi Sektor Pertanian/Perkebunan terhadap PDRB pada tahun 2019 ditargetkan sebanyak 28,43%, terealisasi sebesar 21,23%, sehingga capaiannya adalah 74,67% dengan kategori “**Berhasil**”.

5) Produksi Karet Per Tahun

Indikator Produksi Karet per tahun pada tahun 2019 ditargetkan sebanyak 57.286 ton/tahun, terealisasi sebesar 39.274 ton/tahun, sehingga capaiannya adalah 68,56% dengan kategori “**Cukup Berhasil**”.

6) Produksi Kelapa Sawit Per Tahun

Indikator Produksi Kelapa Sawit per tahun pada tahun 2019 ditargetkan sebanyak 1.330.360 ton/tahun, terealisasi sebesar 1.169.879 ton/tahun, sehingga capaiannya adalah 87,94% dengan kategori “**Sangat Berhasil**”.

7) Produksi Lada Per Tahun

Indikator Produksi Lada per tahun pada tahun 2019 ditargetkan sebanyak 1.350 ton/tahun, terealisasi sebesar 901 ton/tahun, sehingga capaiannya adalah 66,74% dengan kategori “**Cukup Berhasil**”.

8) Produksi Kakao Per Tahun

Indikator Produksi Kakao per tahun pada tahun 2019 ditargetkan sebanyak 24,30 ton/tahun, terealisasi sebesar 10 ton/tahun, sehingga capaiannya adalah 41,15% dengan kategori “**Tidak Berhasil**”.

9) Produksi Kopi Per Tahun

Indikator Produksi Kopi per tahun pada tahun 2019 ditargetkan sebanyak 112 ton/tahun, terealisasi sebesar 99 ton/tahun, sehingga capaiannya adalah 88,39% dengan kategori “**Sangat Berhasil**”.



10) Jumlah Produksi Peternakan (daging) Per Tahun

Indikator Jumlah Produksi Peternakan (daging) pada tahun 2019 ditargetkan sebesar 6.343 ton/tahun, terealisasi sebesar 5.677 ton/tahun, sehingga capaiannya adalah 89,50% dengan kategori **“Sangat Berhasil”**.

11) Jumlah Produksi Perikanan Per Tahun

Indikator Jumlah Produksi Perikanan pada tahun 2019 ditargetkan sebanyak 1.969 ton/tahun, terealisasi sebesar 19.449 ton/tahun, sehingga capaiannya adalah 987,76% dengan kategori **“Sangat Berhasil”**.

Produksi perikanan pada tahun 2019 kenaikannya dari target sangat luar biasa, dimana perhitungan di atas adalah jumlah produksi ikan budi daya. Sedangkan jumlah produksi ikan tangkap tahun 2019 yaitu 12.127 ton/tahun apabila dijumlahkan menjadi 31.576 ton/tahun.

12) Luas Kebun (Karet,Kelapa Sawit,Lada,Kakao,Kopi)

Indikator Luas Kebun (Karet,Kelapa Sawit,Lada,Kakao,Kopi) pada tahun 2019 ditargetkan seluas 309.550 ha, terealisasi sebesar 278.857 ha, sehingga capaiannya adalah 90,08% dengan kategori **“Sangat Berhasil”**.

13) Persentase Ketersediaan Pangan Utama

Indikator Persentase Ketersediaan Pangan Utama pada tahun 2019 ditargetkan sebanyak 99%, terealisasi sebesar 100%, sehingga capaiannya adalah 101,01% dengan kategori **“Sangat Berhasil”**.

14) Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah

Indikator Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah pada tahun 2019 ditargetkan sebanyak 90 ton, terealisasi sebesar 110 ton, sehingga capaiannya adalah 122,22% dengan kategori **“Sangat Berhasil”**.



b. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel III.43
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran Strategis	Program	Anggaran			Capaian Kinerja (%)	Tingkat Efisiensi
			Target (Rp.)	Realisasi Rp.)	%		
14	Meningkatnya Produksi Dan Produktivitas Komoditi Pertanian Dan Perkebunan Di Desa Serta Katahanan Pangan	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan	13.228.870.000,00	13.167.056.663,00	99,53	4.555,33	
		Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	2.446.001.875,00	2.235.885.194,00	91,41		
		Program peningkatan produksi hasil peternakan	2.525.955.696,00	909.589.663,00	36,01		
		Program pengembangan budidaya perikanan	27.400.153.300,00	27.138.589.380,00	99,05		
		Program pembangunan perkebunan	612.000.000,00	606.878.900,00	99,16		
		Program Peningkatan Ketahanan Pangan	1.676.850.560,00	1.616.387.730,00	96,39		
		Program Pengembangan Perikanan Tangkap	19.405.000,00	19.390.000,00	99,92		
		Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Pertanian	114.200.000,00	113.357.000,00	99,26		
		Program Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan	77.862.000,00	71.167.200,00	91,40		
		Program Percepatan Diversifikasi Konsumsi Pangan	413.360.100,00	375.672.940,00	90,88		
		Program Peningkatan Distribusi dan Akses Pangan	86.269.400,00	86.179.400,00	99,90		
		Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Pertanian	114.200.000,00	113.357.000,00	99,26		
		Rata-rata					

Apabila dibandingkan antara persentase realisasi anggaran sebesar 91,17% dan realisasi capaian kinerja sasaran sebesar 4.555,33%, maka pada sasaran ini tingkat efisiensi penggunaan sumber dayanya sangat efisien dengan tingkat efisiensi 4.464,16%.

c. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja



Keseluruhan pencapaian sasaran indikator ini sesuai dengan yang diharapkan yaitu “**Sangat berhasil**”, namun terdapat pencapaian indikator yang tidak sesuai harapan yaitu terhadap produksi karet dan kakao. Penyebab tidak tercapainya indikator sangat terkait dengan harga komoditi tersebut dipasaran international. Harga karet yang selalu turun berdampak dengan rendahnya produksi karet pada tahun 2019.

Nilai Tukar Petani (NTP) diperoleh dari perbandingan antara Indeks Harga yang Diterima Petani (It) dengan Indeks Harga yang Dibayar Petani (Ib) dalam persentase. Pengeluaran konsumsi rumah tangga dan biaya produksi pertanian, merupakan salah satu Indikator Proxy untuk melihat tingkat kesejahteraan petani. NTP juga menunjukkan daya tukar (term of trade) dari produk pertanian dengan barang dan jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi. Semakin tinggi NTP, relatif semakin sejahtera tingkat kehidupan petani. Perkembangan dari waktu ke waktu, nilai tukar petani (NTP) semakin membaik.

Potensi Perkebunan, Produksi tanaman karet dan kelapa sawit cenderung mengalami penurunan, hal ini disebabkan oleh menurunnya harga jual di pasaran international. Akibat dengan menurunnya produksi juga berdampak terhadap perekonomian daerah. Komoditi sawit dan karet dalam beberapa tahun belakangan ini merupakan komoditi yang menopang perekonomian masyarakat Sintang.

Peningkatan produksi tanaman karet diusahakan melalui pola tanaman pengembangan Perkebunan Inti Rakyat dan Swadaya.

Potensi Pertanian terutama sub sektor tanaman pangan yang potensial di Kab. Sintang terdiri dari Padi, Palawija, Sayur-sayuran, dan buah-buahan. Padi sebagai penghasil beras merupakan makanan pokok. Peluang investasi yang dapat diusahakan adalah : Budi daya padi, buah-buahan, dan sayur-sayuran serta pada penyediaan dan pengolahan pupuk organik maupun anorganik. Pengembangan usaha tanaman pangan dilakukan dengan pola kemitraan dengan petani. Produksi sektor



pertanian terutama sub sektor tanaman bahan makanan perlu terus dipacu dengan tujuan untuk memantapkan swasembada pangan dan penganeekaragaman jenis bahan makanan. Sub sektor tanaman pangan terdiri dari padi, palawija, sayur-sayuran dan buah-buahan. Padi sebagai penghasil beras merupakan bahan makanan pokok bagi sebagian besar penduduk, oleh sebab itu padi merupakan komoditi strategis dalam konteks pembangunan terutama pembangunan sektor pertanian.

Potensi Perikanan yang Sangat Potensial di Kabupaten Sintang adalah Usaha Perikanan Keramba dan Budi daya Kolam Serta Perikanan Umum. Produksi Ikan Terbesar yang terdapat di Kabupaten Sintang adalah jenis ikan Jelawat, Tengadak/Lampan, Gurami, Semah dan Paten/Juara. Peluang investasi yang ditawarkan pada sektor perikanan adalah : Usaha Budi daya ikan Keramba dan Budi daya Ikan Kolam, penangkaran bibit ikan yang dapat dilakukan dengan pola kemitraan dengan petani.

Pada bidang peternakan peluang investasi yang dapat diusahakan cukup potensial meliputi: peternakan babi, sapi, kerbau, kambing, unggas yang terdiri dari itik dan ayam yang dapat dilakukan dengan pola kemitraan dan budidaya tanaman untuk pakan ternak.

d. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2019 Dengan Kondisi Awal RPJMD (tahun 2015), Realisasi Tahun 2017 Dan Tahun 2018 Serta Target Akhir RPJMD (Tahun 2021)

Tabel III.44

Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 14 dengan kondisi awal, realisasi tahun 2017 dan tahun 2018 serta target akhir RPJMD



No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi Awal (Tahun 2015)	Realisasi Tahun 2017	Realisasi Tahun 2018	Realisasi Tahun 2019	Target Tahun 2021	
14	Meningkatnya produksi dan produktivitas komoditi pertanian dan perkebunan di desa.	1	Nilai tukar petani	Poin	98	99	99	99	103
		2	Produksi Padi	Ton/Thn	74398	91.679	79.460	77.516	93.608
		3	Produksi Jagung	Ton/Thn	2849	2.500	4.186	8.758	3.621
		4	Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB	%	26,46	25,00	21,23	21.23	29
		5	Produktifitas Karet	Ton/Thn	47129	38.879	38.879	39.274	63.158
		6	Produktifitas Kelapa Sawit	Ton/Thn	908.654	1.376.124	1.391.472	1.169.879	1.609.735
		7	Produktifitas Lada	Ton/Thn	507	365	365	901	1.633
		8	Produktifitas Kakao	Ton/Thn	8,3	8	8	10	36
		9	Produktifitas Kopi	Ton/Thn	99	97	97	99	120
		10	Produksi peternakan (daging)	Ton/Thn	4.333	4.333	4.333	5.677	7.675
		11	Produksi perikanan	Ton/Thn	1.776	1.824,62	1.824,62	19.449	2.119
		12	Luas Kebun	Ha	236.399	245.847	257.518	278.857	356.886
		13	Ketersediaan pangan utama	%	97	62,85	62,85	100	100
		14	Cadangan Pangan Pemerintah	Ton	50	53,77	53,77	75.612	100

Realisasi Nilai Tukar Petani pada tahun 2019 dibandingkan dengan kondisi awal indikator kinerja di dalam RPJMD sebesar 98 poin, mengalami kenaikan 1 poin, dibandingkan dengan realisasi tahun 2017 dan tahun 2018 tidak mengalami perubahan. Sedangkan dibandingkan dengan target kinerja pada akhir periode RPJMD tahun 2021 sebesar 103 poin, realisasi pada tahun 2019 baru mencapai 96,12%.

Realisasi Jumlah Produksi Padi pada tahun 2019 dibandingkan dengan kondisi awal indikator kinerja di dalam RPJMD sebesar 74.398 ton/tahun, mengalami kenaikan 3.118 ton, dibandingkan dengan realisasi tahun 2017 mengalami penurunan 14.163 ton, dibandingkan tahun 2018 sebesar 79.460 ton mengalami penurunan 1.944 ton. Selanjutnya dibandingkan dengan target kinerja pada akhir periode RPJMD tahun 2021 sebesar 93.608 ton/tahun, realisasi pada tahun 2018 baru mencapai 82,81%.

Realisasi Jumlah Produksi Jagung pada tahun 2019 dibandingkan dengan kondisi awal indikator kinerja di dalam RPJMD sebesar 2.849 ton/tahun, mengalami kenaikan 5.909 ton, dibandingkan dengan



realisasi pada tahun 2017 mengalami kenaikan 6.258 ton, dibandingkan dengan tahun 2018 sebesar 4.186 ton mengalami kenaikan 4.572 ton. Selanjutnya, dibandingkan dengan target kinerja pada akhir periode RPJMD tahun 2021 sebesar 3.621 ton/tahun, realisasi pada tahun 2019 sudah mencapai 241,87%.

Realisasi Persentase Kontribusi Sektor Pertanian/Perkebunan terhadap PDRB pada tahun 2019 dibandingkan dengan kondisi awal indikator kinerja di dalam RPJMD sebesar 26,46%, mengalami penurunan 5,23%, dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2017 sebesar 25%, mengalami penurunan 3,77%, dan dengan realisasi tahun 2018 tidak mengalami perubahan. Selanjutnya, apabila dibandingkan dengan target kinerja pada akhir periode RPJMD tahun 2021 sebesar 29%, realisasi pada tahun 2019 baru mencapai 73,21%.

Realisasi Produksi Karet pada tahun 2019 dibandingkan dengan kondisi awal indikator kinerja di dalam RPJMD sebesar 47.129 ton/tahun, mengalami penurunan 7,855 ton/tahun, dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2017 dan tahun 2018 sebesar 38.879 ton/tahun mengalami kenaikan 395 ton/tahun. Selanjutnya, apabila dibandingkan dengan target kinerja pada akhir periode RPJMD tahun 2021 sebesar 63.158 ton/tahun, realisasi pada tahun 2019 baru mencapai 62,18%.

Realisasi Produksi Kelapa Sawit pada tahun 2019 dibandingkan dengan kondisi awal indikator kinerja di dalam RPJMD sebesar 908.654 ton/tahun, mengalami kenaikan 261.225 ton/tahun, dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2017 sebesar 1.376.124 ton/tahun, mengalami penurunan 206.245 ton, serta dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 mengalami penurunan 221.593 ton/tahun. Selanjutnya dibandingkan dengan target kinerja pada akhir periode RPJMD tahun 2021 sebesar 1.609.735 ton/tahun, realisasi pada tahun 2019 baru mencapai 72,68%.

Realisasi Produksi Lada pada tahun 2019 dibandingkan dengan kondisi awal indikator kinerja di dalam RPJMD sebesar 507 ton/tahun,



mengalami kenaikan 394 ton, dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2017 dan tahun 2018, mengalami kenaikan 536 ton. Selanjutnya dibandingkan dengan target kinerja pada akhir periode RPJMD tahun 2021 sebesar 1.633 ton/tahun, realisasi pada tahun 2019 baru mencapai 55,17%.

Realisasi Produksi Kakao pada tahun 2019 dibandingkan dengan kondisi awal indikator kinerja di dalam RPJMD sebesar 8,3 ton/tahun, mengalami kenaikan 1,7 ton, sedangkan apabila dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2017 dan tahun 2018, mengalami kenaikan 2 ton. Selanjutnya, apabila dibandingkan dengan target kinerja pada akhir periode RPJMD tahun 2021 sebesar 36 ton/tahun, realisasi pada tahun 2019 baru mencapai 27,78%.

Realisasi Produksi Kopi pada tahun 2019 dibandingkan dengan kondisi awal indikator kinerja di dalam RPJMD sebesar 99 ton/tahun, tidak mengalami penurunan/kenaikan, dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2017 dan tahun 2018 sebesar 97 ton/tahun, mengalami kenaikan sebesar 2 ton/tahun. Selanjutnya, apabila dibandingkan dengan target kinerja pada akhir periode RPJMD tahun 2021 sebesar 36 ton/tahun, realisasi pada tahun 2019 baru mencapai 82,50%.

Realisasi Jumlah Produksi Peternakan (daging) pada tahun 2019 dibandingkan dengan kondisi awal indikator kinerja di dalam RPJMD dan realisasi tahun 2017 dan tahun 2018 sebesar 4.333 ton/tahun (sama) mengalami kenaikan sebesar 1.344 ton/tahun Apabila dibandingkan dengan target kinerja pada akhir periode RPJMD tahun 2021 sebesar 7.675 ton/tahun, realisasi pada tahun 2019 baru mencapai 73,97%.

Realisasi Jumlah Produksi Perikanan pada tahun 2019 dibandingkan dengan kondisi awal indikator kinerja di dalam RPJMD sebesar 1.776 ton/tahun, mengalami kenaikan 17.673 ton/tahun, dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2017 dan tahun 2018 sebesar 1.824,62 ton/tahun mengalami kenaikan sebesar 17.624,38 ton/tahun. Selanjutnya, apabila



dibandingkan dengan target kinerja pada akhir periode RPJMD tahun 2021 sebesar 2.119 ton/tahun, realisasi pada tahun 2019 mencapai 917,84%.

Realisasi Luas Kebun (karet, kelapa sawit, lada, kakao, kopi) pada tahun 2019 dibandingkan dengan kondisi awal indikator kinerja di dalam RPJMD sebesar 236.399 ha, mengalami kenaikan 42.458 ha, dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2017, mengalami kenaikan 33.010 ha, dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 mengalami kenaikan 21.339 ha. Selanjutnya dibandingkan dengan target kinerja pada akhir periode RPJMD tahun 2021 sebesar 356.886 ha, realisasi pada tahun 2019 baru mencapai 78,14%.

Realisasi Persentase Ketersediaan Pangan Utama pada tahun 2019 dibandingkan dengan kondisi awal indikator kinerja di dalam RPJMD sebesar 97%, mengalami kenaikan 3%, sedangkan apabila dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2017 dan tahun 2018 sebesar 62,85%, mengalami kenaikan 37,15%. Apabila dibandingkan dengan target kinerja pada akhir periode RPJMD tahun 2021 sebesar 100%, realisasi pada tahun 2019 sudah mencapai 100%.

Realisasi Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah pada tahun 2019 dibandingkan dengan kondisi awal indikator kinerja di dalam RPJMD sebesar 50 ton, mengalami kenaikan 75.562 ton, dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2017 dan tahun 2018 sebesar 53,77 ton mengalami kenaikan sebesar 75.558,23 ton. Selanjutnya dibandingkan dengan target kinerja pada akhir periode RPJMD tahun 2021 sebesar 100 ton, realisasi pada tahun 2019 sudah melewati target, mencapai 75612%.

e. **Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/-Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan**

a) **Hambatan dan kendala dalam pencapaian kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut:**



- 1). Adanya penurunan luas panen yang mengakibatkan penurunan produksi yang disebabkan cuaca yang tidak dapat diprediksi, serta menurunnya harga komoditas pertanian, sehingga menimbulkan kelesuan bagi masyarakat untuk meningkatkan hasil produksinya.
- 2). Kurangnya koordinasi untuk penanganan infrastruktur yang mendukung kegiatan pertanian dan perkebunan.
- 3). Minimnya sarana dan prasarana pendukung peningkatan hasil produksi pertanian dan perkebunan.
- 4). Terbatasnya petugas lapangan dan sarana mobilisasi/fasilitas dibandingkan dengan luas wilayah dan jumlah kelompok binaan.
- 5). Kurangnya tersedianya dana khususnya bidang perkebunan rakyat yang langsung berhubungan dengan masyarakat mengakhibatkan pembangunan perkebunan rakyat berjalan sangat lambat.

b) Upaya Pemecahan dalam mengantisipasi hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut:

- 1). Untuk meningkatkan kemampuan SDM, maka dengan mengadakan pelatihan, Bimtek dan penyuluhan yang intensif, baik dibidang pertanian, peternakan, dan perikanan serta diberi bimbingan dalam menghadapi pasar.
- 2). Mengadakan koordinasi dengan instansi terkait untuk penanganan infrastruktur yang berhubungan dengan pertanian, dan perkebunan.
- 3). Mengoptimalkan penggunaan sarana dan prasarana yang dimiliki.
- 4). Terkait dengan keberadaan bibit karet, agar ada pembinaan khusus dari dinas terkait.
- 5). Berkaitan dengan jarak tempuh/jangkauan terhadap kegiatan yang akan dilaksanakan maka perlu adanya penambahan petugas, fasilitas dan ketersediaan dana yang memadai dan waktu pelaksanaan yang cukup.



Sasaran 15: Profesionalisme Pengelolaan Keuangan Daerah

Pelaksanaan sasaran ini untuk mencapai misi menata dan mengembangkan manajemen pemerintah daerah yang sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.

Kinerja sasaran “Profesionalisme Pengelolaan Keuangan Daerah” dapat dilihat dari capaian indikator kinerja sebagai berikut:

a. Perbandingan Antara Target Dan Realisasi Kinerja Tahun 2019

Tabel III.45

Indikator Pencapaian Sasaran 15

	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Penetapan APBD tepat waktu	Nilai	100	100	100
2	Opini WTP dari BPK	Nilai	100	-	-
Capaian Kinerja Sasaran Sangat Berhasil					92,50

1) Penetapan APBD tepat waktu

Indikator Penetapan APBD pada tahun 2019 yang ditargetkan tepat waktu, Pemerintah Kabupaten Sintang telah menetapkan Perda Nomor 4 Tahun 2018 tentang APBD Tahun Anggaran 2019. Atas hal tersebut, capaian indikator waktu penetapan Perda APBD Kabupaten Sintang tepat waktu atau capaian mencapai 100%

2) Opini WTP dari BPK

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selama 6 tahun terakhir ini memberikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap pengelolaan anggaran Kabupaten Sintang, dimulai tahun 2013 sampai dengan tahun 2018. Pada penyusunan laporan ini, pelaksanaan APBD Kabupaten Sintang tahun 2019 masih dalam proses diaudit oleh BPK,



namun diharapkan tahun 2019 Kabupaten Sintang masih mendapatkan opini WTP dari BPK.

b. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel III.46

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran Strategis	Program	Anggaran			Capaian Kinerja (%)	Tingkat Efisiensi
			Target (Rp.)	Realisasi Rp.)	%		
15	Profesionalisme Pengelolaan Keuangan Daerah	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	9.433.496.787,00	7.711.946.867,00	81,75	100	
		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	295.000.000,00	294.057.800,00	99,68		
		Rata-rata			82,29		

Apabila dibandingkan antara persentase realisasi anggaran sebesar 82,29% dan realisasi capaian kinerja sasaran sebesar 100%, maka pada sasaran ini tingkat efisiensi penggunaan sumber dayanya sudah efisien.

c. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Pemerintah Kabupaten Sintang telah menerima Opini WTP dari BPK RI sejak tahun 2013, dan dapat dipertahankan sampai dengan tahun 2018, sedangkan untuk tahun 2019 masih pada tahap proses audit. Keberhasilan ini terkait juga dengan penetapan APBD yang tepat waktu sehingga pelaksanaan program dan kegiatan dapat berjalan dengan baik. Suksesnya pengelolaan APBD Kabupaten Sintang tidak terlepas juga dari hubungan kerjasama dan koordinasi yang baik antara eksekutif dan legislatif.

Keberhasilan dari pencapaian indikator kinerja utama antara lain disebabkan hal-hal berikut ini :



1. Didukung dengan hubungan kerjasama dan koordinasi yang baik antara pimpinan dan staf BPKAD, antar OPD dan legislatif sehingga tercipta suasana kerja yang kondusif dan nyaman.
2. Adanya komitmen dari kepala daerah dalam pencapaian pemerintahan yang baik, peraturan pengelolaan keuangan dan aset daerah yang jelas.
3. Pengelolaan keuangan dan aset daerah berbasis sistem informasi (komputerisasi) sehingga mempermudah dalam penyusunan pelaporan keuangan daerah.
4. Mengikutsertakan PNS pada pelatihan/bimtek dan melaksanakan kaji terap sendiri atau mengikuti kaji terap yang dilaksanakan oleh OPD lain.

d. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2019 Dengan Kondisi Awal RPJMD (tahun 2015), Realisasi Tahun 2017 Dan Tahun 2018 Serta Target Akhir RPJMD (tahun 2021)

Tabel III.47

Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 14 dengan kondisi awal, realisasi tahun 2017 dan tahun 2018 serta target akhir RPJMD

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi Awal (Tahun 2015)	Realisasi Tahun 2017	Realisasi Tahun 2018	Realisasi Tahun 2019	Target Tahun 2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
15	Profesionalisme Pengelolaan Keuangan Daerah	1	Penetapan APBD Tepat Waktu	Nilai	100	100	100	100	100
		2	Opini WTP dari BPK	Nilai	100	100	100	-	100

Realisasi **Penetapan APBD** pada tahun 2018 dibandingkan dengan kondisi awal indikator kinerja di dalam RPJMD, realisasi tahun 2017 dan tahun 2018, tidak ada perubahan dan tepat waktu. Sedangkan apabila dibandingkan dengan target kinerja pada akhir periode RPJMD tahun 2021, sudah mencapai target yang yaitu tetap tepat waktu.



Realisasi Opini WTP dari BPK pada tahun 2018 yang sudah didapatkan sejak kondisi awal indikator kinerja di dalam RPJMD, realisasi tahun 2017 dan tahun 2018 tidak ada perubahan. Sedangkan apabila dibandingkan dengan target kinerja pada akhir periode RPJMD tahun 2021, sudah sesuai target dan diharapkan tetap mendapatkan opini WTP dari BPK sampai tahun 2021.

e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

a) Hambatan dan kendala dalam pencapaian kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut:

1. Data Laporan Keuangan dan Aset antara OPD yang telah diinput ke Aplikasi Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) dan SIMBADA untuk beberapa OPD belum sinkron.
2. Belum terintegrasinya Aplikasi Pengelolaan Barang Milik Daerah (SIMBADA) dengan Aplikasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIKD) secara online sehingga menyebabkan lambannya penyelesaian laporan pertanggungjawaban keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Sintang terutama untuk menyusun saldo awal neraca Restatement per 1 Januari 2018 terhambat.
3. Aplikasi SIKD yang belum sempurna untuk diterapkan pada laporan keuangan berbasis akrual.

b) Upaya Pemecahan dalam mengantisipasi hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut:

1. Rekonsiliasi data laporan keuangan dengan OPD.
2. Melakukan integrasi Aplikasi Pengelolaan Barang Milik Daerah (SIMBADA) dengan Aplikasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIKD) secara online untuk percepatan penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.



3. Penyempurnaan untuk data dasar OPD dalam Sistem Aplikasi Laporan Keuangan dan selanjutnya dapat disesuaikan dengan data manual.

Sasaran 16 :
Meningkatnya Transparansi, Akuntabilitas Dan Partisipasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Pelaksanaan sasaran ini untuk mencapai misi “Menata dan mengembangkan manajemen pemerintah daerah yang sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih”.

Kinerja sasaran “Meningkatnya transparansi, akuntabilitas dan partisipasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah” dapat dilihat dari capaian indikator kinerja sebagai berikut:

a. Perbandingan Antara Target Dan Realisasi Kinerja Tahun 2019

Tabel III.48
Indikator Pencapaian Sasaran 16

Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1. Ketersediaan sistem informasi pelayanan perijinan dan administrasi pemerintah	unit	1	1	100,00
2. Nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP)	skor	65	55,15	84,85
3. Persentase hasil Musrenbang yang terakomodir dalam RPJMD/RKPD	%	40	23	57,50
Capaian Kinerja Sasaran Berhasil				77,50

- 1) **Ketersediaan Sistem Informasi Pelayanan Perijinan Dan Administrasi Pemerintah**
Capaian Ketersediaan sistem informasi pelayanan perijinan dan administrasi pemerintah sebesar 100%, sehingga dapat dikategorikan **Sangat Berhasil**. Pada tahun 2019 indikator Ketersediaan sistem



informasi pelayanan perijinan dan administrasi pemerintah ditargetkan sebanyak 1 unit dan sudah terealisasi 1 unit.

2) Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)

Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebesar 84,85%, sehingga dapat dikategorikan **Berhasil**. Pada tahun 2019 Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ditargetkan B (skor 65) terealisasi CC atau skor 55,15.

Dari perhitungan capaian tersebut berhasil, namun apa yang menjadi target Pemerintah Kabupaten Sintang untuk mendapat nilai SAKIP menjadi B belum tercapai dan masih pada nilai CC.

3) Persentase Hasil Musrembang Yang Terakomodir Dalam RPJMD/RKPD

Capaian Persentase Hasil Musrembang Yang Terakomodir dalam RPJMD/RKPD sebesar 62,5%, sehingga dapat dikategorikan **Berhasil**. Pada tahun 2019 indikator Persentase Hasil Musrembang Yang Terakomodir dalam RPJMD/RKPD ditargetkan 40% sudah terealisasi 23%.

b. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel III..49

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran Strategis	Program	Anggaran			Capaian Kinerja (%)	Tingkat Efisiensi
			Target (Rp.)	Realisasi Rp.)	%		
16	Meningkatnya transparansi, akuntabilitas dan partisipasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	1.088.427.180,00	1.049.080.394,00	96,38	80,78	
		Program Perencanaan Pembangunan Daerah	1.986.542.095	1.952.481.490	98,29		
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	54.429.900,00	54.384.900,00	99,92		
		Rata-rata		98,20	80,78		



Apabila dibandingkan antara persentase realisasi anggaran sebesar 98,20% dan realisasi capaian kinerja sasaran sebesar 80,78%, maka pada sasaran ini tingkat efisiensi penggunaan sumber dayanya belum efisien karena belum mencapai 100%.

c. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Pemerintah Kabupaten Sintang akan melakukan evaluasi terhadap program-program pendukungnya. Keterbatasan anggaran masih menjadi kendala utama dalam pengembangan program pendukung indikator tersebut, namun demikian Pemerintah Kabupaten Sintang akan berusaha melakukan kegiatan-kegiatan dengan **budget**. Meningkatkan sarana dan prasarana baik aparatur maupun publik secara bertahap sehingga penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan dan pembangunan dapat meningkat.

d. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2019 Dengan Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2015), Realisasi Tahun 2017 Dan Tahun 2018 Serta Target Akhir RPJMD (Tahun 2021)

Tabel III.50

Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 15 dengan kondisi awal, realisasi tahun 2017 dan tahun 2018 serta target akhir RPJMD

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Sat	Kondisi Awal (Tahun 2016)	Realisasi Tahun 2017	Realisasi Tahun 2018	Realisasi Tahun 2019	Target Tahun 2021	
16	Meningkatnya transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.	1	Ketersediaan sistem informasi pelayanan perijinan dan administrasi pemerintah	Unit	1	1	1	1	
		2	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	skor	51,71	53,04	54,55	55,15	80
		3	Persentase hasil Musrembang yang terakomodir dalam RPJMD/RKPD	%				23	



Realisasi **Ketersediaan sistem informasi pelayanan perijinan dan administrasi pemerintah** pada tahun 2019 dibandingkan dengan kondisi awal indikator kinerja di dalam RPJMD, realisasi pada tahun 2017 dan tahun 2018 sebanyak 1 unit, tidak mengalami perubahan. Sedangkan apabila dibandingkan dengan target kinerja pada akhir periode RPJMD tahun 2021 sebesar 1 unit, realisasi pada tahun 2019 sudah mencapai 100%.

Realisasi **Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)** pada tahun 2019 menerima hasil penilaian AKIP CC dengan skor 55,15, dibandingkan dengan kondisi awal indikator kinerja di dalam RPJMD, nilai CC (51,71) naik (3,44) tahun 2017 nilai CC (53,04) naik (2,11) dan tahun 2018 nilai CC (54,55) naik (0,6).

Hasil Penilaian AKIP tahun 2019 akan diterima pada tahun 2021, dengan harapan bisa mendapat nilai BB, Pada saat ini jajaran perangkat daerah Kabupaten Sintang berupaya memperbaiki SAKIP sesuai dengan hasil evaluasi Kemenpan, BPKP dan Inspektorat Kabupaten Sintang.

Realisasi **Persentase Hasil Musrembang Yang Terakomodir dalam RPJMD/RKPD** pada tahun 2019 terealisasi 70% dari yang ditargetkan sebesar 90%. Mengingat Indikator Kinerja Utama (IKU) ini merupakan hasil dari perbaikan IKU tahun 2018 maka capaian realisasi tidak ada data pembandingnya.

e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

a) Hambatan dan kendala dalam pencapaian kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut:



1. Masih terdapat beberapa perijinan dan non perijinan yang belum diserahkan oleh Perangkat Daerah/unit penyelenggara pelayanan ke Dinas Penanaman Modal dan Terpadu satu Pintu.
2. Luasnya wilayah kerja dan keadaan geografis yang kurang mendukung disertai kurangnya memadainya dukungan prasarana dan sarana untuk pelaksanaan aplikasi pelayanan secara online.
3. Masih terdapat penyajian data SAKIP yang tidak konsisten.
4. Masih belum optimalnya hasil Musrembang yang dapat tertampung dalam RPJMD/RKPD.

b) Upaya Pemecahan dalam mengantisipasi hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan perijinan dan non perijinan.
2. Melakukan pelayanan secara offline bagi masyarakat di wilayah yang tiak terjangkau secara online.
3. Memberikan fasilitasi, masukan, bimbingan dan arahan kepada setiap organisasi perangkat daerah untuk memperbaiki Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
4. Mengoptimalkan dan menselaraskan hasil Musrembang dengan program-program pemerintah.

**Sasaran 17:
Meningkatnya Kesadaran Hukum Masyarakat,
Stabilitas Keamanan Dan Ketertiban Umum**

Pelaksanaan sasaran ini untuk mencapai misi Menata dan mengembangkan manajemen pemerintah daerah yang sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.



Kinerja sasaran “Meningkatnya Kesadaran Hukum Masyarakat, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Umum” dapat dilihat dari capaian indikator kinerja sebagai berikut:

a. Perbandingan Antara Target Dan Realisasi Kinerja Tahun 2019

Tabel III.50

Indikator Pencapaian Sasaran 17

Indikator		Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Cakupan Penyelesaian Pelanggaran Peraturan Daerah	Per 10.000 penduduk	0,85	0,59	69,41
Capaian Kinerja Sasaran Cukup Berhasil					62,50

1) Cakupan Penyelesaian Pelanggaran Peraturan Daerah

Capaian Cakupan Penyelesaian Pelanggaran Peraturan Daerah sebesar 69,41%, sehingga dapat dikategorikan **Cukup Berhasil**. Pada tahun 2019 indikator Cakupan Penyelesaian Pelanggaran Peraturan Daerah ditargetkan sebesar 0,85 Per 10.000 penduduk dan sudah terealisasi 0,59 per 10.000 penduduk.

b. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel III.51

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran Strategis	Program	Anggaran			Capaian Kinerja (%)	Tingkat Efisiensi
			Target (Rp.)	Realisasi Rp.)	%		
17	Meningkatnya Kesadaran Hukum Masyarakat, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Umum	Program Pemeliharaan Kantribmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	365.285.000,00	365.058.469,00	99,94	69,41	
		Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan	432.970.000,00	432.696.000,00	99,94		
		Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (pekat)	250.995.000,00	248.495.000,00	99,00		
		Rata-rata			99,63	69,41	



Apabila dibandingkan antara persentase realisasi anggaran sebesar 99,63% dan realisasi capaian kinerja sasaran sebesar 69,41%, maka pada sasaran ini tingkat efisiensi penggunaan sumber belum efisien.

c. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Keberhasilan Satuan Polisi Pamong Praja didukung program dan kegiatan yang ada di Satuan Polisi Pamong Praja, adanya pimpinan yang visioner, adanya kewenangan yang diberikan serta adanya dukungan dari Eksekutif dan Legislatif.

Adapun kegagalan pencapaian kinerja antara lain disebabkan oleh kurangnya tenaga atau SDM yang terlatih, minimnya Anggaran, kurangnya sarana dan Prasarana yang menunjang kegiatan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sintang. Faktor luar yang menjadi kegagalan dalam pencapaian sasaran ini yaitu masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk mematuhi Peraturan Daerah yang berlaku.

d. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2019 Dengan Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2015), Realisasi Tahun 2017 Dan Tahun 2018 Serta Target Akhir RPJMD (Tahun 2021)

Tabel III.52

Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 15 dengan kondisi awal, realisasi tahun 2017 dan tahun 2018 serta target akhir RPJMD

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Sat	Kondisi Awal (Tahun 2015)	Realisasi Tahun 2017	Realisasi Tahun 2018	Realisasi Tahun 2019	Target Tahun 2021
17	Meningkatnya Kesadaran Hukum Masyarakat, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Umum.	1	Cakupan Penyelesaian Pelanggaran Peraturan Daerah	Per 100 00 pdd k			0,59	



Realisasi **Cakupan Penyelesaian Pelanggaran Peraturan Daerah** pada tahun 2019 teralisasi sebesar 0,59 per 10.000 penduduk. Mengingat Indikator Kinerja Utama (IKU) ini ditetapkan dalam perubahan IKU tahun 2018 maka untuk realisasi sasaran ini tidak ada data pembandingnya.

e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

a. Hambatan dan kendala dalam pencapaian kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut:

- 1) Terbatasnya Anggaran yang ada pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sintang, sehingga banyak kegiatan yang terkendala menyebabkan Tupoksi Satuan Polisi Pamong Praja belum Optimal.
- 2) Kurangnya Sarana dan Prasarana untuk menunjang kegiatan seperti kendaraan dinas Roda Empat dan Roda Enam (Mobil Dalmas, Mobil Patroli, Mobil pemadam kebakaran, Mobil Angkutan Barang/orang sehingga menyebabkan aktifitas kantor terganggu.
- 3) Masih lemahnya pengawasan terhadap masyarakat yang melanggar hukum, terutama pada jalur perairan yang disebabkan belum tersedianya fasilitas pendukung.
- 5) Satuan Polisi Pamong Praja sebagai Koordinator PPNS dari seluruh PPNS yang ada di Kabupaten Sintang, sampai saat ini Anggota Satpol PP yang sudah mengikuti Diklat PPNS pola 300 Jam, baru ada 1 (Satu) orang.
- 6) Belum semua Anggota Satuan Polisi Pamong Praja mengikuti pendidikan dan pelatihan dasar akibat anggaran terbatas.

b. Upaya Pemecahan dalam mengantisipasi hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut:



- 1) Mengajukan penambahan anggaran untuk Belanja Modal dan Belanja Pegawai dalam melaksanakan Tupoksi Satuan Polisi Pamong Praja.
- 2) Selalu pro aktif dalam pengajuan usulan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU) untuk pengadaan kendaraan dinas termasuk kendaraan yang melalui jalur sungai, juga sarana dan prasarana penunjang lainnya.
- 3) Meningkatkan penyuluhan dan pengawasan kepada masyarakat tentang ketaatan hukum termasuk pengawasan pada jalur perairan.
- 4) Usulan untuk peserta mengikuti diklat PPNS pola 300 jam pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sintang.
- 5) Melakukan Pembentukan Tim Operasional Terpadu dalam Penegakan PERDA dan Perkada.
- 6) Usulan untuk Anggota Satuan Polisi Pamong Praja dan Petugas Pemadam Kebakaran mengikuti pendidikan dan pelatihan dasar.
- 7) Meningkatkan pengawasan atas pelaksanaan tugas Anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang bertugas di Kecamatan.
- 8) Meningkatkan hubungan koordinasi dengan Instansi terkait baik TNI maupun POLRI, bina administrasi kewilayahan urusan Satpol PP atau pun dengan Satpol PP di tingkat Propinsi Kalbar.



B. Realisasi Anggaran

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Penjelasan

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun Anggaran 2019 yang dijelaskan pada Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pemerintah Kabupaten Sintang Tahun 2019 ini merupakan rancangan LRA TA 2019 yang belum belum diaudit oleh BPK RI tapi sudah dilakukan Pra Audit. LRA dapat disajikan sebagai berikut:

a. Pendapatan/Penerimaan Keadaan 31 Desember 2019

No.	Jenis penerimaan	Target Murni	Target Perubahan	Realisasi	%
1.	Pendapatan Asli Daerah	150.923.284.660,00	177.924.246.157,00	177.924.246.157,00	117,89
2.	Dana Perimbangan	1.336.343.383.000,00	1.336.343.383.000,00	1.336.343.383.000,00	100
3.	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang sah	455.576.326.000,00	457.610.374.000,00	457.610.374.000,00	100,45
JUMLAH		1.942.842.993.660,00	1.971.878.003.157,00	1.971.878.003.157,00	101,49

Analisis Anggaran dan Realisasi Pendapatan/Penerimaan

Realisasi pendapatan tahun 2019 sebesar **Rp. 1.971.878.003.157,00** dari target sebesar **Rp. 1.942.842.993.660,00** atau sebesar 101,49%, terdapat kenaikan dari target murni sebesar **Rp. 29.035.009.497,00** atau sebesar **1,49%**. Perbandingan realisasi pendapatan mulai tahun 2016 dapat dilihat pada tabel berikut ini :





Jika dibandingkan dengan tahun 2018, dimana realisasi pendapatan adalah sebesar **Rp. 1.910.376.928.766,51** maka terjadi peningkatan realisasi pendapatan pada tahun 2019 yaitu sebesar **Rp. 61.501.074.390,49** atau meningkat sebesar **3,22%**.

b. Belanja Keadaan 31 Desember 2019

No.	Jenis Belanja	Target	Realisasi	%
1.	Belanja Tidak Langsung	1.195.321.432.938,98	1.189.190.652.939,80	(0,51)
2.	Belanja Langsung	866.918.456.382,00	1.015.864.862.449,23	17,18
JUMLAH BELANJA DAERAH		2.062.239.889.320,98	2.205.055.515.389,03	6,93

Analisis Anggaran dan Realisasi Belanja

Realisasi belanja tidak langsung tahun 2019 yaitu sebesar Rp. **1.189.190.652.939,80** dan berkurang sebesar **Rp. 6.130.779.999,18** atau turun 0,51%. Realisasi belanja langsung sebesar Rp. **1.015.864.862.449,23** atau naik sebesar **148.946.406.067,23** atau naik 17,18%. **Belanja Daerah terealisasi sebesar Rp.2.205.055.515.389,03** dari target yang sebesar **Rp. 2,062.239.889.320,98** sehingga terjadi penambahan belanja daerah sebesar **Rp. 142.815.626.068,05** atau naik 6,93%.

Pada tabel berikut ini dapat dilihat perbandingan realisasi belanja dari tahun 2016.





Jika dibandingkan dengan tahun 2018 dimana realisasi belanja yaitu sebesar **Rp. 1.870.328.042.149,98** maka terjadi peningkatan belanja pada tahun 2019 sebesar **Rp. 334.727.473.239,05** atau meningkat sebesar **17,90%**.

2. Realisasi Belanja Sasaran Strategis

Untuk mewujudkan target kinerja sasaran strategis, alokasi anggaran tiap program yang dilaksanakan sebagaimana ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2019, dialokasikan dana sebesar **Rp. 428.704.790.832,00** dan terealisasi sebesar **Rp. 370.881.090.302,00** atau **86.51%**.

Rincian besaran alokasi dan realisasi belanja untuk setiap sasaran strategis setelah perubahan dapat dilihat sebagai berikut :

NO	PROGRAM YANG DILAKSANAKAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%	
1	2	3	4	5	
1	Sasaran : Meningkatnya Angka Melek Huruf dan Tuntasnya Wajib Belajar Pendidikan 9 Tahun				
	1)	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	94.996.341.156,00	58.019.125.077,00	61,08
	Jumlah		94.996.341.156,00	58.019.125.077,00	61,08
2	Sasaran : Meningkatnya Nilai Budaya Lokal				
	1)	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	943.932.000,00	941.737.727,00	99,77
	2)	Program Pengembangan Nilai Budaya	1.419.574.750,00	1.411.952.112,00	99,46
	3)	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	10.000.000,00	9.395.000,00	93,95
	Jumlah		2.373.506.750,00	2.363.084.839,00	99,56
3	Sasaran : Meningkatnya Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan Terutama Untuk Kesehatan Ibu dan Anak Serta Penduduk Miskin				
	1)	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	10.657.791.250	10.298.793.697	96,63
	2)	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	27.281.939.575,00	25.977.438.860,00	95,22
	3)	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat	573.370.650,00	545.902.383,00	95,21



NO	PROGRAM YANG DILAKSANAKAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%
4)	Program Pengembangan lingkungan sehat	763.521.967,00	699.306.556,00	91,59
5)	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	1.669.134.800,00	1.278.806.822,00	76,61
6)	Program standarisasi pelayanan kesehatan	388.315.300,00	1.276.806.822,00	328,81
7)	Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	1.577.945.440,00	1.191.793.043,00	75,53
8)	Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya	17.235.413.000,00	16.573.067.906,00	96,16
9)	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	3.785.258.000,00	2.303.968.916,00	60,87
10)	Program Badan Layanan Umum Daerah	3.647.540.000,00	3.028.111.722,00	83,02
11)	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular	556.045.200,00	508.416.500,00	91,43
12)	Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	4.593.085.000,00	4.390.108.598,00	95,58
13)	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	6.509.929.956,00	4.313.499.858,00	66,26
	Jumlah	79.239.290.138,00	72.386.021.683,00	91,35
Sasaran : Terkendalnya Laju Pertumbuhan Penduduk				
1)	Program Keluarga Berencana	5.402.251.180,00	5.151.216.818,00	95,35
2)	Program pelayanan kontrasepsi	179.908.000,00	161.358.100,00	89,69
3)	Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan	35.000.000,00	24.400.000,00	69,71
4)	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	652.794.500,00	643.675.478,00	98,60
5)	Program Kesehatan Reproduksi Remaja	222.272.000,00	220.860.970,00	99,37
6)	Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri	2.105.350.590,00	2.076.206.950,00	98,62
7)	Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga	750.000.000,00	724.376.911,00	96,58
	Jumlah	9.347.576.270,00	9.002.095.227,00	96,30



NO	PROGRAM YANG DILAKSANAKAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%	
5	Sasaran : Tersedianya Infrastruktur Transportasi yang Handal Untuk Mendukung Pergerakan Orang dan Barang				
	1)	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	65.228.270.897,00	62.850.393.652,00	96,35
	2)	Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan	17.666.767.000,00	17.332.445.190,00	98,11
	3)	Program Pembangunan Turap/Talud/bronjong	1.201.750.000,00	999.157.900,00	83,14
	4)	Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	10.628.902.550,00	8.663.940.950,00	81,51
	5)	Program Pemeliharaan Saluran Drainase atau Gorong-gorong	199.100.000,00	199.060.000,00	99,98
	Jumlah	94.924.790.447,00	90.044.997.692,00	94,86	
6	Sasaran: Tersedianya Sumber Daya Air Untuk Memenuhi Kebutuhan Pertanian (Irigasi)				
	1)	Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	12.992.982.000,00	12.815.137.850,00	98,63
		Jumlah	12.992.982.000,00	12.815.137.850,00	98,63
7	Sasaran : Meningkatnya akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana dasar pemukiman (mencakup persampahan, air bersih, air limbah)				
	1)	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	2.570.349.900,00	2.120.204.087,00	82,49
	2)	Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	806.026.918,00	803.457.522,00	99,68
	3)	Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan	47.704.740.862,00	45.623.504.941,00	95,64
		Jumlah	51.081.117.680,00	48.547.166.550,00	5,04
8	Sasaran : Meningkatnya kualitas lingkungan hidup				
	1)	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	67.756.500,00	67.039.000,00	98,94
	2)	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	470.255.569,00	461.805.252,00	98,20
		Jumlah	538.012.069,00	528.844.252,00	98,30
9	Sasaran Meningkatnya Kerukunan Antar Umat Beragama				
	1)	Program Peningkatan Kerukunan Beragama	1.426.464.248,00	1.418.861.280,00	99,47
		Jumlah	1.426.464.248,00	1.418.861.280,00	99,47



NO	PROGRAM YANG DILAKSANAKAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%	
10	Sasaran : Meningkatnya Perekonomian Daerah				
	1)	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	9.433.496.787,00	7.711.946.867,00	81,75
	Jumlah		9.433.496.787,00	7.711.946.867,00	81,75
11	Sasaran : Meningkatnya Investasi Yang Berbasis Potensi Unggulan Lokal dan Lapangan Pekerjaan				
	1)	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	166.080.500,00	165.377.140,00	99,58
	2)	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	774.111.664,00	759.124.006,00	98,06
	3)	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	410.037.000,00	405.704.368,00	98,94
	4)	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	335.979.000,00	335.497.200,00	99,86
	5)	Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	441.128.050,00	435.974.193,00	98,83
	6)	Program Pengendalian dan Evaluasi Investasi	194.341.300,00	192.980.360,00	99,30
	Jumlah		2.321.677.514,00	2.294.657.267,00	98,84
12	Sasaran : Meningkatnya Daya Saing Potensi Unggulan Daerah Dan Terwujudnya Sentra Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Keunggulan Lokal				
	1)	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	891.948.100,00	863.444.980,00	96,80
	2)	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	221.777.500,00	208.271.900,00	93,91
	3)	Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	179.428.000,00	136.651.000,00	76,16
	4)	Program Penataan Struktur Industri	325.516.300,00	300.706.700,00	92,38
	5)	Program Peningkatan Efisiensi Pedagang Dalam Negeri	5.600.872.560,00	5.497.799.088,00	98,16
	6)	Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan	40.000.000,00	37.175.000,00	92,94
	Jumlah		7.259.542.460,00	7.044.048.668,00	97,03
13	Sasaran : Meningkatnya Peran Koperasi, UMKM, dan Lembaga Keuangan Non Perbankan Dalam Pengembangan Perekonomian Rakyat				
	1)	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	261.919.420,00	256.748.060,00	98,03
	Jumlah		261.919.420,00	256.748.060,00	98,03



NO	PROGRAM YANG DILAKSANAKAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%	
14	Sasaran : Meningkatnya Produksi dan Produktivitas Komoditi Pertanian dan Perkebunan Di Desa Serta Meningkatnya Ketahanan Pangan				
	1)	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan	13.228.870.000,00	13.167.056.663,00	99,53
	2)	Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	2.446.001.875,00	2.235.885.194,00	91,41
	3)	Program peningkatan produksi hasil peternakan	2.525.955.696,00	909.589.663,00	36,01
	4)	Program pengembangan budidaya perikanan	27.400.153.300,00	27.138.589.380,00	99,05
	5)	Program pembangunan perkebunan	612.000.000,00	606.878.900,00	99,16
	6)	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	1.676.850.560,00	1.616.387.730,00	96,39
	7)	Program Pengembangan Perikanan Tangkap	19.405.000,00	19.390.000,00	99,92
	8)	Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Pertanian	114.200.000,00	113.357.000,00	99,26
	9)	Program Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan	77.862.000,00	71.167.200,00	91,40
	10)	Program Percepatan Diversifikasi Konsumsi Pangan	413.360.100,00	375.672.940,00	90,88
	11)	Program Peningkatan Distribusi dan Akses Pangan	86.269.400,00	86.179.400,00	99,90
	Jumlah	48.600.927.931,00	46.340.154.070,00	95,35	
15	Sasaran : Profesionalisme Pengelolaan Keuangan Daerah				
	1)	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	9.433.496.787,00	7.711.946.867,00	81,75
	2)	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	295.000.000,00	294.057.800,00	99,68
		Jumlah	9.728.496.787,00	8.006.004.667,00	82,29
16	Sasaran : Meningkatnya Transparansi, Akuntabilitas dan Partisipasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah				
	1)	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	1.088.427.180,00	1.049.080.394,00	96,38
	2)	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	1.986.542.095,00	1.952.481.490,00	98,29



NO	PROGRAM YANG DILAKSANAKAN		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%
	3)	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	54.429.900,00	54.384.900,00	99,92
		Jumlah	3.129.399.175,00	3.055.946.784,00	97,65
17	Sasaran : Meningkatnya Kesadaran Hukum Masyarakat, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Umum				
	1)	Program Pemeliharaan Kantribmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	365.285.000,00	365.058.469,00	99,94
	2)	Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan	432.970.000,00	432.696.000,00	99,94
	3)	Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (pekat)	250.995.000,00	248.495.000,00	99,00
		Jumlah	1.049.250.000,00	1.046.249.469,00	99,71



BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Sintang tahun 2019 memuat sasaran Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Sintang yang telah mengalami perbaikan sesuai hasil evaluasi SAKIP yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Dalam IKU perubahan ditetapkan 18 sasaran namun dalam Perjanjian Kinerja tahun 2019 yang ditetapkan 17 sasaran dan 1 sasaran tidak dicantumkan dalam perjanjian kinerja karena sasaran tersebut tidak didukung dengan program dan kegiatan pada tahun 2019. Mengingat IKU dalam laporan ini mengacu pada IKU perubahan tahun 2018, maka tidak semua realisasi indikator kinerja ada data pembandingnya.

Dari 17 sasaran tersebut, **sebelas sasaran (64,70%) dengan predikat sangat berhasil, tiga sasaran (17,65%) dengan predikat berhasil, dan tiga sasaran (17,65%) dengan predikat cukup berhasil.**

Dapat disimpulkan bahwa secara rata-rata hasil capaian kinerja sangat berhasil, tentunya hal itu menjadi tantangan bagi Pemerintah Kabupaten Sintang untuk meningkatkan kinerja dimasa mendatang bukan saja dalam bentuk laporan formal namun secara nyata kinerja Pemerintah Kabupaten Sintang dapat membawa perubahan yang lebih baik bagi masyarakat.

Bertolak dari masih adanya kendala dan hambatan dalam pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan seperti telah dijelaskan pada Bab III, maka Pemerintah Kabupaten Sintang berupaya untuk meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang, dengan melakukan langkah-langkah berikut ini :

1. Lebih mempercepat proses pembangunan Kabupaten Sintang melalui pendekatan pembangunan yang lebih komprehensif seperti aspek



- prosperity, security, hukum dan sampai pada aspek politik yang bermuara pada pembangunan karakter bangsa (*Character Nation Building*).
2. Lebih menggerakkan faktor dukungan Pemerintah Daerah dari masyarakat dalam mewujudkan kondisi kondusif bagi pembangunan, sebagai implementasi dan faktor dinamika otonomi “Dukungan Lokal”, sehingga lahir kesepakatan dalam kebersamaan.
 3. Lebih menggerakkan serta mengoptimalkan pemberdayaan sumber daya Pembangunan Daerah berkelanjutan, sebagai implementasi dari faktor dinamika otonomi “*Manajemen Skill*”, sehingga lahir kesamaan visi dan misi serta keselarasan tujuan pembangunan antara aparat pemerintah, pelaku bisnis dan masyarakat.
 4. Lebih mengoptimalkan pembangunan dan penyediaan informasi dalam rangka mendorong peningkatan investasi dalam bentuk kerjasama bilateral, sebagai implementasi faktor kunci dinamika otonomi “Kemampuan dalam pengelolaan dan penyediaan informasi potensi”, sehingga lahir jejaring kerja yang luas dan berdaya jangkau global.
 5. Lebih mempercepat pembangunan di wilayah-wilayah tertinggal di Kabupaten Sintang. Program aksinya melalui program inti yang meliputi penataan ruang, penataan infrastruktur dan pembenahan institusi kelembagaan serta program strategis berbagai kegiatan pembangunan, baik ekonomi, sosial budaya, politik dan pertahanan keamanan.
 6. Lebih fokus pada penetapan penggerak utama (*prime mover*) pembangunan daerah yang terdiri dari :
 - a. Membangun wilayah dari pinggiran;
 - b. Penataan dan pemekaran wilayah;
 - c. Aksesibilitas terhadap sumber daya listrik dan energi lainnya;
 - d. Hilirisasi produk;
 - e. Kegawatdaruratan infrastruktur transportasi; dan
 - f. Tata kelola pemerintahan.
-

PENGUKURAN KINERJA
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KABUPATEN SINTANG TAHUN 2019

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Utama (IKU)	SATUAN	TAHUN 2019			Capaian Kinerja Sasaran
				TARGET	REALISASI	%	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Meningkatnya angka melek huruf dan tuntasnya wajib belajar pendidikan 9 tahun	1. Angka Melek Huruf (AMH)	%	92,04	91,18	99,07	92,50
		2. Angka Partisipasi Sekolah SD/MI	%	98,55	96,97	98,40	92,50
		3. Angka Partisipasi Sekolah SMP/MTs	%	68,84	58,76	85,36	92,50
		4. Angka Partisipasi Kasar (APK) SD / MI	%	122,40	116,97	95,56	92,50
		5. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP / MTs	%	101,39	100,97	99,59	92,50
		6. Angka Partisipasi Murni (APM) SD / MI	%	98,69	99,99	101,32	92,50
		7. Angka Partisipasi Murni (APM) SMP / MTs	%	80,52	70,17	87,15	92,50
		8. Angka Rata-rata Lama Sekolah (ARLS)	Tahun	7,43	6,73	90,58	92,50
Capaian Kinerja Sasaran Sangat Berhasil						94,63	92,50
2.	Meningkatnya nilai budaya lokal	1. Jumlah grup kesenian	grup	37,00	51	137,84	92,50
		2. Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya	even	2,00	2	100,00	92,50
		3. Tingkat Penganalan Budaya Lokal	unit	75,00	50	66,67	62,50
Capaian Kinerja Sasaran Berhasil						101,50	82,50
3.	Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan terutama untuk kesehatan ibu dan anak serta penduduk miskin	1. Angka Usia Harapan Hidup	tahun	71,85	71,29	99,22	92,50
		2. Angka Kelangsungan hidup bayi (AKHB) per 1000 Kelahiran Hidup	per 1000 kh	976,00	990	101,43	92,50
		3. Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan Yang Memiliki Kompetensi Kebidanan	%	93,50	81,97	87,67	92,50
		4. Persentase Balita Gizi Buruk	%	2,30	0,26	188,70	92,50
		5. Persentase Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan	%	100,00	100,00	100,00	92,50
		6. Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	%	93,04	85,01	91,37	92,50
		7. Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA (+)	%	80,02	45,37	56,70	62,50
		8. Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin	%	25,55	62,63	245,13	92,50
		9. Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu per 100.000 penduduk	Per 100 ribu pddk	21,69	92,52	426,56	92,50
		10. Rasio Rumah Sakit per 100.000 penduduk	Per 100 ribu pddk	1,09	0,97	88,99	92,50
Capaian Kinerja Sasaran Sangat Berhasil						148,58	89,50
4.	Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk	1. Rasio Akseptor KB	%	75,16	78,45	104,38	92,50
		2. Cakupan Peserta KB Aktif	Akseptor	55.392	61.227	110,53	92,50

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Utama (IKU)	SATUAN	TAHUN 2019			Capaian Kinerja Sasaran
				TARGET	REALISASI	%	
1	2	3	4	5	6	7	8
		3. Jumlah Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I	KK	19.299	19.299	100,00	92,50
Capaian Kinerja Sasaran Sangat Berhasil						104,97	92,50
5.	Tersedianya infrastruktur transportasi yang handal untuk mendukung pergerakan orang dan barang	1. Proporsi Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Baik dan Sedang	%	49,28	50,16	101,79	92,50
		2. Persentase Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam)	%	20,96	9,36	44,66	27,50
Capaian Kinerja Sasaran Cukup Berhasil						66,61	60,00
6.	Tersedianya sumber daya air untuk memenuhi kebutuhan pertanian (irigasi)	1. Rasio Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik	%	50,21	48,82	97,23	92,50
		2. Luas Irigasi Kabupaten dalam Kondisi Baik	ha	5.353	5.546,21	103,61	92,50
Capaian Kinerja Sasaran Sangat Berhasil						100,42	92,50
7.	Meningkatnya akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana dasar pemukiman (mencakup persampahan, air bersih, air limbah)	1. Persentase Rumah Tangga Pengguna Air Bersih/Minum (PDAM)	%	5,80	4,60	79,31	77,50
		2. Rasio Tempat Pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk	%	0,24	0,11	45,83	27,50
		3. Persentase Penanganan Sampah	%	75,00	62,37	83,16	77,50
Capaian Kinerja Sasaran Cukup Berhasil						69,43	60,83
8.	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	1. Tingkat Pencemaran Udara (ISPU 0-50 =Baik)	ISPU	25,00	27,71	110,84	92,50
		2. Pencemaran Status Mutu Air (14 Sungai)	Kondisi sedang	14,00	7,00	50,00	27,50
Capaian Kinerja Sasaran Sangat Berhasil						80,42	92,50
9.	Meningkatnya kerukunan antar umat beragama	1. Nilai Toleransi antara Pemeluk Agama	nilai	baik	baik	100,00	92,50
Capaian Kinerja Sasaran Sangat Berhasil						100,00	92,50
10.	Meningkatnya Perekonomian Daerah	1. Persentase Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	5,50	5,1	92,55	92,50
Capaian Kinerja Sasaran Sangat Berhasil						92,55	92,50
11.	Meningkatnya investasi yang berbasis potensi unggulan lokal dan lapangan pekerjaan	1. Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)	buah	227	272	119,82	92,50
		2. Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)	Milyar Rp.	1.695,20	3.489,20	205,83	92,50
		3. Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi PMDN = Rp. 250 M	Milyar Rp.	325,00	1.461,75	449,77	92,50
		4. Angka Partisipasi Angkatan Kerja	%	85,60	72,20	84,35	77,50
		5. Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3,01	2,99	100,66	92,50
Capaian Kinerja Sasaran Sangat Berhasil						140,79	89,50
12.	Meningkatnya daya saing potensi unggulan daerah dan Terwujudnya sentra pertumbuhan ekonomi berbasis keunggulan lokal	1. Persentase Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB	%	10,73	9,31	86,77	92,50
		2. Persentase Produk Usaha Kecil dan Menengah yang Bersertifikat	%	50,00	37,00	74,00	77,50
		3. Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB	%	17,88	9,32	52,13	27,50
Capaian Kinerja Sasaran Sangat Berhasil						80,38	85,00
13.	Meningkatnya peran koperasi, UMKM, dan lembaga keuangan non perbankan dalam pengembangan perekonomian rakyat	1. Persentase Koperasi Aktif	%	71,50	87,00	121,68	92,50

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Utama (IKU)	SATUAN	TAHUN 2019			Capaian Kinerja Sasaran
				TARGET	REALISASI	%	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Capaian Kinerja Sasaran Sangat Berhasil				121,68	92,50
14.	Meningkatnya produksi dan produktivitas komoditi pertanian dan perkebunan di desa serta meningkatnya ketahanan pangan	1. Nilai Tukar Petani	poin	102,00	99,00	97,06	92,50
		2. Jumlah Produksi Padi per tahun	ton/thn	87.078,00	77.516,00	89,02	92,50
		3. Jumlah Produksi Jagung per tahun	ton/thn	3.960,00	8.758,00	221,16	92,50
		4. Persentase Kontribusi Sektor Pertanian/Perkebunan terhadap PDRB	%	28,43	21,23	74,67	77,50
		5. Produksi Karet per tahun	ton/thn	57.286,00	39.274,00	68,56	62,50
		6. Produksi Kelapa Sawit per tahun	ton/thn	1.330.360,00	1.169.879,00	87,94	92,50
		7. Produksi Lada per tahun	ton/thn	1.350,00	901,00	66,74	62,50
		8. Produksi Kakao per tahun	ton/thn	24,30	10,00	41,15	27,50
		9. Produksi Kopi per tahun	ton/thn	112,00	99,00	88,39	92,50
		10. Jumlah Produksi Peternakan (daging) per tahun	ton/thn	6.343,00	5.677,00	89,50	92,50
		11. Jumlah Produksi Perikanan per tahun	ton/thn	1.969,00	19.449,00	987,76	92,50
		12. Luas Kebun :	ha	309.550,00	278.857,00	90,08	92,50
		- Karet	ha	94.935,00	97.167,00	102,35	92,50
		- Kelapa Sawit	ha	212.078,00	178.992,00	84,40	77,50
		- Lada	ha	1.712,00	2.217,00	129,50	92,50
		- Kakao	ha	425,00	107,00	25,18	27,50
		- Kopi	ha	400,00	374,00	93,50	92,50
		13. Persentase Ketersediaan Pangan Utama	%	99,00	100,00	101,01	92,50
		14. Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah	ton	90,00	75.612,00	84.013,33	92,50
		Capaian Kinerja Sasaran Berhasil				4.555,33	80,92
15.	Profesionalisme Pengelolaan Keuangan Daerah	1. Penetapan APBD tepat waktu	nilai	100,00	100,00	100,00	92,50
		2. Opini WTP dari BPK	nilai	100,00	-	-	
		Capaian Kinerja Sasaran Sangat Berhasil				100,00	92,50
16.	Meningkatnya transparansi, akuntabilitas dan partisipasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	1. Ketersediaan sistem informasi pelayanan perijinan dan administrasi pemerintah	unit	1,00	1,00	100,00	92,50
		2. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Nilai	65,00	55,15	84,85	77,50
		3. Persentase Hasil Musrembang Yang Terakomodir dalam RPJMD/RKPD	%	40,00	23,00	57,50	62,50
		Capaian Kinerja Sasaran Berhasil				80,78	77,50
17.	Meningkatnya Kesadaran Hukum Masyarakat, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Umum	1. Cakupan Penyelesaian Pelanggaran Peraturan Daerah	per 10.000 pddk	0,85	0,59	69,41	62,50
		Capaian Kinerja Sasaran Cukup Berhasil				69,41	62,50